

**STRATEGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DALAM PEMENANGAN
PEMILIHAN UMUM 1955**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memeroleh Gelar
Sarjana Pendidikan**



**Oleh:
UNI EKOWATI
08406244031**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Strategi Partai Komunis Indonesia dalam Pemenangan Pemilihan Umum 1955” telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

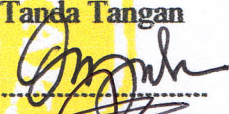




Yogyakarta, 01 Maret 2012
Pembimbing,

Dr. Aman, M.Pd
NIP. 19741015 20031 21001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Strategi Partai Komunis Indonesia dalam Pemenangan Pemilihan Umum 1955” ini telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Maret 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dyah Kumalasari, M.Pd	Ketua penguji		21-03-2012
Dr. Aman, M.Pd	Sekretaris Penguji		21-03-2012
Terry Irenewaty, M.Hum	Penguji Utama		21-03-2012

Yogyakarta, Maret 2012
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Uni Ekowati

NIM : 08406244031

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul : Strategi Partai Komunis Indonesia dalam Pemenangan
Pemilihan Umum 1955

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis dan terbitkan orang lain atau pernah dipergunakan untuk syarat penyelesaian studi di perguruan tinggi lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai sumber atau acuan dengan tata tulis ilmiah yang lazim. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 01 Maret 2012
Yang menyatakan,



Uni Ekowati
08406244031

MOTTO

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(Qs. Ar-Ra'd: 11)

Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan

(Thomas A. Edison)

Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah melakukan sesuatu yang ditakutinya. Maka, bila merasa takut, anda akan punya kesempatan

untuk bersikap berani.

(Mario Teguh)

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”

(Confusius)

PERSEMBAHAN



Dengan tidak mengurangi rasa syukurku kepada Allah SWT yang telah memberiku karunia yang tak terhingga, skripsi ini kupersembahkan untuk.

- ♥ Kedua orang tuaku. **Ibu Isholiyah** dan **Bapak Muhiman**. Atas limpahan doa, keikhlasan, semangat, kerja keras, pengorbanan, dukungan baik moral serta materiil.
- ♥ Almamater tercinta Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial

Kubingkiskan skripsi ini untuk.

- ♥ Kakakku Nurawati yang selalu membantuku, mendoakan dan menyayangiku, terima kasih atas bantuannya.
- ♥ Keponakanku tersayang Achmad Nugraha Putra (Agha) yang selalu memberikan semangat dan doanya untukku.
- ♥ Mz Susilo Setyo Utomo (mz uthe) yang selalu memberikan semangat, doa dan kasih sayangnya untukku.

STRATEGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM 1955

Oleh
Uni Ekowati
NIM: 08406244031

ABSTRAK

Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan yang kesekian kalinya di Madiun pada tanggal 18 September 1948. PKI bermaksud mendirikan Negara Soviet Indonesia di Madiun. Peristiwa tersebut tentunya mengancam kedaulatan negara Indonesia, selain itu banyak korban jiwa yang jatuh dalam peristiwa tersebut. Akibat peristiwa itu membuat citra buruk bagi PKI sendiri, namun pasca peristiwa 1948 tersebut, PKI mampu bangkit kembali dan terbukti dengan kemenangan empat besar dalam perolehan suara pada pemilihan umum 1955. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: (1) mengetahui latar belakang berdirinya PKI di Indonesia dan seputar pemberontakan PKI, (2) PKI dalam kancah politik nasional, dan (3) strategi PKI dalam kemenangan pemilihan umum 1955.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima langkah, yakni: (1) Pemilihan Topik, yaitu kegiatan awal dalam sebuah penelitian untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji (2) Heuristik, yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lalu yang dikenal dengan sumber sejarah, (3) Kritik Sumber, kegiatan meneliti jejak atau sumber sejarah yang telah dihimpun sehingga diperoleh fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan; (4) Interpretasi, yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh; (5) historiografi, yaitu kegiatan menyampaikan sintesa yang telah diperoleh ke dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKI pada awalnya bernama ISDV. ISDV berganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia Belanda dan tahun 1924 berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam perjalanannya PKI telah melakukan beberapa pemberontakan di Indonesia yang dilakukan sepanjang 1926-1927. Tahun 1948 PKI melakukan pemberontakan kembali di Madiun, namun dapat ditumpas oleh Pemerintah RI. Hal ini membawa citra buruk bagi PKI. Demokrasi Liberal memberikan kesempatan bagi PKI untuk ikut berpartisipasi dalam perpolitikan nasional yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet. PKI mampu menjadi pemenang ke-4 dalam pemilihan umum 1955. PKI dibawah Aidit dan kawan-kawannya menerapkan strategi yang lebih moderat dengan cara melakukan konsolidasi organisasi, pendekatan ke desa-desa yang meliputi petani, buruh, wanita, pemuda desa, menerapkan MKTBP. Optimalisasi kampanye dan Propaganda yang tinggi dari PKI mampu menarik simpati rakyat sehingga mendapat dukungan yang besar pada pemilihan umum 1955.

Kata Kunci: Pemilu 1955, Partai Komunis Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Partai Komunis Indonesia dalam Pemenangan Pemilihan Umum 1955”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
3. Bapak M. Nur Rokhman, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah memberikan saran dan bimbingannya.
4. Ibu Terry Irenewaty, M.Hum., selaku narasumber yang senantiasa memberikan motivasi dan bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. Aman, M.Pd., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya selama penulisan skripsi ini.

6. Ibu Taat Wulandari, M.Pd., selaku penasehat akademik yang selalu mengarahkan dan membina selama ini.
7. Ibu Dyah Kumalasari, M.Pd., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Sejarah yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua orang tuaku (Bapak Muhiman dan Ibu Isholiyah), Kakakku dan keponakanku (Nurmawati dan Agha), dan mz Uthe (Susilo Setyo Utomo) terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini.
10. Seluruh informan (Bapak Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma'arif. PhD, Bapak Wagiman Susanto, Bapak Kartomo Hadasmo, Bapak Harno Sutiman, Bapak Yoso Tariyo, Bapak Yatno) selaku narasumber wawancara telah memberikan keterangannya yang dibutuhkan penulis untuk menyusun skripsi.
11. Semua Staf Perpustakaan UPT UNY, UPT UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas FIS UNY, FIB UGM, Perpustakaan Kolese Ignatius, Jogya Library atas pelayanan yang baik sehingga sumber kajian dapat penulis peroleh.
12. Teman-teman seperjuangan (Ranti, Mbokdwe Ira, Diah, Rendra, Na'afi, Bang Arif Setya, Endri, Pak Wal, Asep, Ika dll) yang selalu memberikan bantuan dan semangat.
13. Seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah 2008, terimakasih atas persahabatannya yang terjalin selama ini.

14. Seluruh pengurus Lab Sejarah, terimakasih atas kemudahan yang diberikan kepada saya dalam mencari berbagai sumber referensi dan mengurus surat-surat yang terkait dalam penyusunan skripsi.
15. Teman-teman KKN-PPL SMA Negeri 1 Depok 2011, terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini.
16. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (Waidkha Yuliat, Diana, Jumai, Teh Nisa, Mz Afeb, Mz Estu, Crist, Ajik dll) terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan selama ini di HMPS.
17. Teman-temanku di GW.15 (Ranti, de'Umay, mbk Dwi, Atiks, Titin Markutin, Endah teriyaki, Ecy, Ida, Novi, Okta, Risa , Titin Jawa, Heni Jawa dan semua penghuni GW 15) terimakasih atas kebersamaan selama ini.
18. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memperlancar jalannya penelitian dari awal sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi satu karya yang bermanfaat.

Yogyakarta, 01 Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISTILAH	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Historiografi yang Relevan	17
G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	29

BAB II. SEPUTAR PKI DAN PEMBERONTAKANNYA	
A. Latar Belakang Berdirinya Partai Komunis Indonesia ...	31
B. Sekilas Pemberontakan PKI.....	38
BAB III PKI DALAM KANCAH POLITIK NASIONAL	
A. PKI Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950).....	46
B. PKI Masa Tahun 1950-1955	55
BAB IV PKI DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM 1955	
A. Strategi PKI dalam Pemilu 1955.....	65
1. Konsolidasi Organisasi	65
2. Pendekatan PKI kepada petani.....	71
3. Pendekatan PKI kepada buruh.....	76
4. Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan	78
5. Optimalisasi propaganda dan kampanye	86
6. Pendekatan PKI kepada wanita.....	93
B. Pemilihan Umum 1955.....	96
C. Hasil Pemilu 1955	104
BAB V. KESIMPULAN.....	111
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Foto Lambang PKI.....	121
2. Foto Aidit	122
3. Foto M.H Lukman	123
4. Foto Njoto....	124
5. Gambar Partai-partai pada pemilu 1955	125
6. Narasumber Sezaman (Bapak Wagiman Susanto).....	126
7. Narasumber Sezaman Bapak Harno Sutiman	127
8. Narasumber Sezaman Bapak Yoso Tariyo	128
9. Narasumber Sezaman Bapak Yatno.....	129
10. Narasumber Sezaman Bapak Prof. Dr. A. Syafii Ma'arif. PhD.....	130
11. Kuesioner	131
12. Tabel 1. Hasil Pemilihan umum Parlemen 1955.....	132
13. Tabel 2. Hasil Pemihan Umum Konstituante 1955	133
14. Tabel 3. Perolehan Suara semua partai pada pemilu 1955	134
15. Tabel 4. Hasil Pemilu Parlemen dan Konstituante menurut distrik	135

16. Tabel 5.Perincian Kursi menurut daerah pemilihan	141
17. Koran Kedaulatan Rakyat 27 September 1955	142
18. Koran Kedaulatan Rakyat 1 Oktober 1955	143
19. Koran Kedaulatan Rakyat 7 Oktober 1955	144
20. Surat PBNU	145

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BTI	: Barisan Tani Indonesia
FPT	: Front Persatuan Tani
ISDV	: <i>Indische Sociaal Democratische Vereniging</i>
FDR	: Front Demokrasi Rakyat
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
Gerwis	: Gerakan Wanita Indonesia Sedar
LEKRA	: Lembaga Kebudayaan Rakyat
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MKTBP	: Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan.
NU	: Nahdlatul Ulama
Pemilu	: Pemilihan Umum
PERMAI	: Persatuan Marhaen Indonesia
Pesindo	: Pemuda Sosialis Indonesia
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PRRI	: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
RTI	: Rukun Tani Indonesia
SARBUPRI	: Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SARBUFIS	: Serikat Buruh Film Indonesia

SBG	: Serikat Buruh Gula
SBPU	: Serikat Buruh Pekerjaan Umum
SBK	: Serikat Buruh Kependaraan
SBKA	: Serikat Buruh Kereta Api
SBKB	: Serikat Buruh Kendaraan Bermotor
SBKP	: Serikat Buruh Kementrian Pertahanan
SEPDA	: Serikat Pegawai Daerah
SERBAUD	: Serikat Buruh Angkatan Udara
SI	: Sarekat Islam
SPP	: Serikat Pegawai Pemerintahan
SR	: Serikat Rakyat
SOBSI	: Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia

DAFTAR ISTILAH

Agitasi	: Mempengaruhi/ hasutan.
Basis massa	: Wilayah berkumpulnya pengikut-pengikut organisasi
Ceremony	: Upacara keagamaan.
Demokrasi	: Pemerintah yang seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah dengan perantaraan wakilnya.
Faksi	: Aktifitas dari kelompok internal partai.
Feodalisme	: Paham yang ada dalam susunan masyarakat yang dikuasai oleh bangsawan.
Formatur	: Orang atau sekelompok orang yang menyusun/ membuat sesuatu.
Fraksi	: Bagian kecil: pecahan; kelompok dalam DPR atau parlemen yang terdiri dari beberapa anggota yang sepaham dan sependirian.
Ideologi	: Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
Imperialisme	: Sistem politik yang bertujuan menjajah Negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar
Kabinet	: Badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri.

Kapitalisme	: Sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas.
Koalisi	: Kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di Parlemen
Kolonialisme	: Paham tentang penguasaan oleh suatu Negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara tersebut.
Komintern	: Komunis Internasional.
Komunisme	: Paham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx dan Fredrich Engels, yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara.
Konsolidasi	: Memperkuat hubungan jaringan organisasi.
Konstituante	: Lembaga pembentuk undang-undang dasar.
Konstitusi	: Segala ketentuan, aturan tentang ketatanegaraan.
Legislatif	: Berhak dan mempunyai wewenang dalam membuat undang-undang; badan yang berhak membuat undang-undang.
Legitimasi	: Pernyataan yang diakui keabsahannya: pengesahan.
Maklumat pemerintah	: Pengumuman yang dikeluarkan pemerintah.
Mosi	: Keputusan rapat atau pernyataan pendapat pribadi.
Madiun Affair 1948	: Peristiwa pemberontakan FDR/PKI di Madiun tanggal

19 September 1948.

Nasionalisme	: Paham untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri.
Parlemen	: Lembaga yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-Undangan dan pengendalian anggaran keuangan Negara; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Partai	: Perkumpulan (segolongan orang) yang satu asas, satu haluan, dan satu tujuan terutama di bidang politik.
Politik	: Pengetahuan mengenai ketatanegaraan.
Propaganda	: Menyebarkan paham-paham tertentu untuk mencari pengikut.
Radikal	: Semangat juang yang keras menuntut perubahan.
Revolusi	: Perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan seperti dengan perlawanan bersenjata.
Sosialis	: Ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha agar harta benda, industri dan perusahaan menjadi milik negara.
Strategi	Taktik atau cara untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu/langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam meraih sesuatu.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis.¹ Gerakan Komunis Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dan berliku dalam mewujudkan masyarakat komunis di Indonesia. Pada masa pergerakan nasional awal abad ke-20, gerakan komunis Indonesia melakukan aksi perlawanan terhadap penguasa kolonial. Keterlibatan PKI dalam perlawanan tersebut dilakukan sepanjang tahun 1926-1927. PKI berhasil mencetuskan pergolakan rakyat yang terjadi di beberapa tempat, yaitu pada tanggal 12–14 November 1926 di Karesidenan Jakarta, tanggal 12 November-5 Desember 1926 di Banten, tanggal 12–18 November 1926 di Priangan, tanggal 17–23 November 1926 di Kediri, dan tanggal 1 Januari– akhir Februari 1927 di Silungkang, Sumatra Barat.²

Bentuk perlawanan rakyat itu akhirnya dapat dipadamkan oleh penguasa kolonial Belanda. Beberapa tokoh komunis dan nasionalis dapat ditangkap dan di buang ke Digul Tanah Merah, Irian Jaya. Tokoh komunis

¹ PKI merupakan bentuk modern organisasi kaum komunis Indonesia. Sebelumnya telah ada ISDV yang menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi sosialis. Pada bulan Mei 1920 ISDV berubah nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia dan pada tahun 1924 berganti nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia, M.C. Ricklefs a.b Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada, 2005, hlm. 265.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994, hlm.13.

Alimin dan Muso berhasil melarikan diri ke luar negeri. Tahun 1935 *Komintern* (jaringan komunis Internasional) mengirim kembali Muso ke Indonesia untuk melanjutkan kegiatan Partai Komunis Indonesia yang akhirnya dilakukan dengan kegiatan bawah tanah. Tahun 1935 Muso kembali ke luar negeri dengan alasan tidak merasa aman berada di Indonesia. Peristiwa tersebut mengakibatkan PKI semakin lemah. Pihak kolonial sendiri memperlihatkan ketidaksenangannya terhadap PKI dengan melakukan pelarangan terhadap kegiatan PKI di wilayah Indonesia mulai tanggal 23 Maret 1928. PKI mulai bergerak dibawah tanah sehingga sulit untuk melacak atau mengetahui aksi-aksi yang dilakukan PKI. Ketika PKI bergerak melalui bawah tanah dapat dikatakan sebagai masa kelam bagi PKI karena Partai Komunis Indonesia kehilangan fungsinya.

Beberapa peristiwa yang berliku telah dialami oleh PKI, namun kondisi PKI berubah setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang penting bagi seluruh elemen bangsa dimana Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka. Setelah Proklamasi Indonesia tentunya akan menentukan eksistensi dan masa depan sendiri yang bebas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Di bidang politik, Indonesia telah menempatkan berbagai kekuatan politik di masa Kolonial Belanda untuk memainkan peranan dalam konstelasi politik nasional pasca proklamasi.

PKI sebagai salah satu kekuatan muncul kembali secara legal pada 21 Oktober 1945.³ Semenjak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 3 November 1945⁴ oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, partai-partai politik banyak bermunculan pada waktu itu. Haluan politik PKI tentunya berbeda dengan haluan kekuatan politik lainnya. Pada awal kemerdekaan, gerakan partai yang berbeda ideologi telah mewarnai kegiatan politik Indonesia waktu itu. Pasca proklamasi para pemimpin bangsa Indonesia sepakat untuk memilih negara yang bersifat "Republik Nasionalis". Kegiatan PKI muncul kembali pada tahun 1947. Komunisme Internasional kembali kepada Doktrin Zhdanov⁵ dan sesuai dengan garis keras terhadap kubu Kapitalisme. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan dan selama perang kemerdekaan, baik gerakan komunisme Internasional maupun PKI di Indonesia tidak pernah mempunyai sikap yang menguntungkan Republik Indonesia. Kehadiran PKI dianggap lebih banyak merugikan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

³ Subhan SD, *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996, hlm. 8.

⁴ Maklumat Pemerintah 3 November 1945 berisi: "Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala faham yang ada dalam masyarakat. Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 33.

⁵ *Doktrin Zhdanov* yaitu dilanjutkannya politik garis keras terhadap kubu kapitalisme. Zhdanov menganjurkan agar partai-partai komunis bersatu atas dasar anti imperialis dan demokratis.

PKI kembali beraksi kembali pada peristiwa *Madiun Affair*⁶ 18 September 1948. Pemberontakan FDR/PKI di Madiun sendiri merupakan pemberontakan yang kesekian kalinya dilakukan oleh kaum komunis di Indonesia untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia di Madiun. *Madiun Affair* menjadi salah satu bagian sejarah di Indonesia yang membawa citra buruk bagi PKI. Pemberontakan PKI Madiun menimbulkan korban jiwa yang banyak dan pada akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah RI yaitu pada tanggal 30 September 1948, pasukan TNI telah berhasil menduduki kembali kota Madiun. Pada tanggal 4 Desember 1948 setelah pemberontakan PKI-Madiun berhasil ditumpas dan Muso⁷ tertembak mati. Beberapa minggu kemudian tokoh-tokoh PKI banyak yang terbunuh dan melarikan diri.

Ketika Pemerintah Republik Indonesia sedang sibuk membahas konsolidasi pasca pemberontakan PKI, ternyata dalam situasi demikian Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II sehingga pemberontakan PKI tidak diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Tindakan hukum bagi

⁶ *Madiun Affair* adalah suatu peristiwa dalam sejarah revolusi Indonesia yang terjadi antara bulan September sampai dengan Desember 1948 di Kabupaten Madiun, Magetan, Kediri, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi, Cepu, Blora, Pati, Kudus, Wonogiri, dan Purwodadi. Maksum, dkk, *Lubang-Lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. ix.

⁷ Muso merupakan tokoh komunis Indonesia. Muso amat dikenal sebagai otak di balik Peristiwa Madiun 1948. Ada juga yang menyebut Muso sebagai tokoh pemberontakan PKI terhadap pemerintah kolonial Hindia pada tahun 1926. Pelopor komunisme Indonesia itu tewas di ujung senjata tentara di kala berusaha melarikan diri. Tim Narasi, 2009, *100 Tokoh yang mengubah Indonesia*, Jakarta: NARASI, hlm. 150-151.

pemimpin dan anggota PKI tidak dilakukan secara tuntas dan tokoh kunci gerakan PKI yaitu Muso akhirnya ditembak mati.

Demokrasi Liberal di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1950-1959, memberikan kesempatan bagi PKI untuk ikut berpartisipasi dalam politik meskipun sebelumnya PKI telah terlibat dalam pemberontakan di Madiun. Alimin mengaktifkan kembali PKI pada tanggal 4 Februari 1950. Kepemimpinan Alimin tidak bertahan lama karena digantikan oleh D.N.Aidit yang datang kembali ke Indonesia. D.N.Aidit melakukan penyatuan kembali seluruh kekuatan dan potensi yang ada di partai.⁸ Kepemimpinan D.N.Aidit semakin kuat karena dukungan tokoh-tokoh pemudanya yang berhasil mengembangkan PKI. Setelah D.N.Aidit berhasil merehabilitasi PKI pada masa demokrasi Liberal, D.N.Aidit dan kawan-kawannya sepakat mengadakan kerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik yang dianggap penting untuk memperoleh kesempatan duduk dalam pemerintahan salah satunya PNI.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu perwujudan atau tindakan simbolik dari sebuah negara demokrasi. Pemilu dilaksanakan pada suatu saat tertentu yang memiliki makna dalam perjalanan sosial masyarakat suatu bangsa. Di Indonesia, pemilu merupakan saat-saat penting yang diharapkan dapat mengubah rezim politik yang berkuasa. Pemilu 1955

⁸ D.N. Aidit merupakan salah satu pemimpin partai komunis Indonesia. Konon nama aslinya Dipa Nusantara Aidit (mengikuti nama idolanya, Pangeran Diponegoro) pada tanggal 30 Juli 1932. Di PKI aidit menjabat Ketua Komite Sentral (CC). Di pemerintahan ia pernah menjadi Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS. Tim Narasi, *op.cit.* hlm. 62.

merupakan pemilu pertama bagi bangsa Indonesia semenjak bangsa Indonesia merdeka. Suasana persiapan pemilu 1955 ini terasa hangat, penuh antusiasme dan harapan baik di kalangan petinggi partai politik maupun rakyat pada umumnya.

Pemilu dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih konstituante yang diikuti setidaknya 28 partai politik. Pemilihan umum 1955 diikuti oleh banyak partai politik yang menganut sistem proporsional dengan tiga aliran ideologi besar yaitu Islam, Nasionalis, dan Komunis. Pemilu 1955 menurut Undang-undang No.7 tahun 1953 menggunakan sistem *proporsional representative* dikombinasikan dengan stelsel daftar (*lystelsel*)⁹.

PKI merupakan salah satu partai politik yang ikut dalam pemilu 1955 dan termasuk salah satu dari empat partai besar setelah PNI, Masjumi, dan Nahdlatul Ulama/NU. PKI berhasil memperoleh suara cukup banyak dalam pemilihan umum 1955. Hal ini mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya citra buruk telah melekat di tubuh PKI akibat pemberontakan Madiun 1948 yang mengancam keutuhan negara. Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu partai yang menang karena berhasil mendapatkan suara yang cukup banyak dalam Pemilu 1955. Dalam masa-masa pemilihan umum 1955 PKI

⁹ Stelsel Daftar (*lystelsel*) ialah setiap partai atau golongan mengajukan daftar calon secara kolektif dalam daftar, sehingga bagi pemilih cukup memilih (dengan menusuk) tanda gambar partai, dan menurut Undang-Undang ini boleh juga memilih seorang yang ada dalam daftar dengan menulis calon tersebut. Imam Suhadi, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977: Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1981, hlm. 20-21.

juga memiliki masalah dengan partai lainnya. Pada perpolitikan waktu itu muncul suatu pertentangan antara PKI dengan Masyumi¹⁰. Berawal dari pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948, diawali dengan perang pamflet dan bentrokan antara pendukung Masyumi dengan FDR (Front Demokrasi Rakyat)¹¹ yang beraliran komunis di bawah pimpinan Muso, sikap Masyumi terhadap PKI menjadi tidak baik. Masyumi mengutuk keras pemberontakan FDR dan menuduh kaum komunis sebagai “ Penghianat terhadap Bangsa dan Negara”.¹²

Perseteruan antara PKI dengan Masyumi secara ideologi memang wajar karena keduanya memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda. Pada masa kampanye Pemilihan Umum 1955, Masyumi sangat menentang PKI dengan banyak menggunakan kata-kata keras dan sangat menekankan retorika anti PKI. Masyumi juga cenderung berseberangan dengan pemerintah yang ditandai dengan ketidaksetujuannya terhadap gagasan Nasionalis, Agama, Komunis (NASAKOM) dan Demokrasi Terpimpin.

¹⁰ Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) merupakan kelanjutan dari MIAI yang didirikan pada 7 November 1943. Merupakan partai dari golongan Islam, pada masa Jepang hanya NU dan Muhammadiyah saja yang diakui. Farid Wajidi, NU Tradisi, *Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm.49.

¹¹ Front Demokrasi Rakyat (FDR) adalah badan yang dibentuk oleh Amir Syarifudin pada tanggal 26 Februari 1948 di Sala yang berasal dari fraksi Sayap Kiri yang terdiri dari PKI, Partai Sosialis (Amir), Partai Buruh Indonesia (BTI), SOBSI, Pesindo, FDR adalah dalam penggerak pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.

¹² Samsuri, *Politik Islam anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004, hlm.4.

Berbeda dengan sikap NU¹³ terhadap PKI yang menunjukkan sikap *limited cooperative*¹⁴ terhadap PKI yang tidak secara tegas menolak, tetapi juga tidak langsung larut dalam permainan.

Banyak pihak yang terkejut dan kecewa dengan hasil Pemilu 1955 karena PKI dalam waktu yang cukup singkat pasca pemberontakan Madiun 1948 begitu berhasil memperoleh suara banyak dalam pemilu 1955. Hal ini bertolak belakang dengan citra buruk PKI dalam *Madiun Affair*. Ketakutan terhadap kemenangan PKI dalam pemilu 1955 menimbulkan rasa takut dari berbagai golongan yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang PKI dalam Pemenangan Pemilu 1955, terutama latar belakang pendirian PKI, PKI dalam kancah perpolitikan nasional (1945-1955) dan strategi PKI dalam menggalang massa sehingga memperoleh dukungan suara yang cukup banyak pada Pemilihan Umum tahun 1955.

¹³ Nahdlatul Ulama didirikan sebagai reaksi pembaharu Islam yang mulai merebak di Indonesia. Sebagai benteng pertahanan kaum tradisionalis Islam dibentuklah Nahdlatul Ulama "Kebangkitan Ulama" pada 31 Januari 1926. Organisasi ini menganut paham Islam Ahlul Sunnah Waljama'ah. Farid Wajidi, *op.cit.*, hlm.29.

¹⁴ *Limited cooperative* adalah bentuk kerjasama terbatas dalam hal ini dilakukan oleh NU untuk mencapai tujuannya terutama dalam menjalin hubungan baik dengan pemerintah maupun PKI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang Partai Komunis Indonesia?
2. Bagaimana dinamika Partai Komunis Indonesia dalam kancah politik nasional dari tahun 1945-1955?
3. Bagaimana strategi Partai Komunis Indonesia dalam kemenangan Pemilihan Umum 1955?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir logis, kritis, sistematis, analitis serta obyektif sesuai dengan metodologi dalam mengkaji adanya suatu peristiwa sehingga dapat memahami segala nilai yang terkandung di dalamnya.
 - b. Melatih kemampuan dalam rangka penerapan metode sejarah dalam suatu permasalahan sejarah yang dihadapi atau diteliti.
 - c. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mengetahui awal pendirian Partai Komunis Indonesia
 - b. Mengetahui Partai Komunis Indonesia dalam perpolitikan di Indonesia tahun 1945-1955.

- c. Mengetahui strategi Partai Komunis Indonesia dalam Pemilihan Umum 1955.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

- a. Pembaca diharapkan memperoleh pengetahuan yang jelas tentang eksistensi PKI dalam pemilu 1955.
- b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai strategi PKI pada Pemilihan Umum 1955.

2. Bagi Penulis

- a. Dapat melatih kemampuan meneliti, menganalisis dan merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yang sedang diteliti.
- b. Memberikan wawasan sejarah yang kritis dan bermanfaat bagi penulis terutama keikutsertaan dan strategi Partai Komunis Indonesia pada pemilihan umum 1955.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.¹⁵ Kajian pustaka sangat penting dan diperlukan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Melalui kajian pustaka

¹⁵ Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2006, hlm.3.

penulis mendapatkan literatur atau beberapa pustaka yang akan digunakan dalam penelitian sejarah.

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sebuah tonggak awal berdirinya Republik Indonesia. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa ini tidak serta merta membawa negeri ini bebas dari penjajahan. Pasca kemerdekaan, wajar saja jika berbagai pihak maupun golongan di negeri ini mempunyai caranya sendiri-sendiri dalam memperjuangkan dan mempertahankan negeri ini. Perbedaan dikalangan masyarakat Indonesia akan menghasilkan sebuah wadah yang dapat menampung suara atau aspirasi masyarakat yaitu munculnya berbagai organisasi baik organisasi sosial, keagamaan, maupun politik.

Dalam pembahasan Bab dua tentang pemberontakan PKI Madiun 1948, penulis menggunakan buku yang berjudul Lubang-lubang pembantaian: Petualangan PKI di Madiun. Salah satu pemberontakan besar pasca kemerdekaan yang mengancam negeri Indonesia yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan yang dilakukan oleh FDR/PKI di Madiun dalam usahanya menghancurkan negara Republik Indonesia telah menelan banyak korban jiwa dan harta benda yang tak terhitung jumlahnya. Pemberontakan PKI Madiun 1948 dapat ditumpas oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun sangat memukul Bangsa Indonesia karena pada saat itu, Bangsa Indonesia sedang bersiap-siap untuk menghadapi Agresi Militer Belanda II.

Pemberontakan PKI Madiun 1948 membawa citra buruk bagi PKI karena kegagalannya melakukan kudeta kepada Negara Republik Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak dibubarkan dan bahkan muncul sebagai pemenang ke-4 dalam Pemilihan Umum 1955. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang kebebasan berdirinya partai-partai politik tentunya membawa angin segar bagi PKI untuk tetap tumbuh di negeri ini. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem Demokrasi Parlementer dimana akan menghasilkan banyak partai. Pada saat itu juga mulai muncul berbagai partai yang saling bersaing satu sama lain dalam memperoleh dukungan dari masyarakat.

Pemilihan umum tahun 1955 merupakan saat yang penting bagi Partai Komunis Indonesia untuk membuktikan eksistensinya sebagai partai politik yang memiliki basis massa yang cukup kuat. PKI menjadi empat besar dalam perolehan suara pada pemilu 1955. Perolehan suara dalam pemilu 1955 sangat berarti bagi PKI karena keberhasilannya dalam meraih dukungan massa. Perkembangan PKI sangat menakjubkan terbukti yaitu antara bulan Maret dan November 1954 jumlah anggota PKI meningkat tiga kali lipat dari 165.206 menjadi 500.000 dan pada akhir tahun 1955 mencapai jumlah 1.000.000 orang.¹⁶ Pada saat itu PKI termasuk partai yang paling kaya diantara partai politik lainnya dimana penerimaan berasal dari iuran anggota, pemungutan dana dan sumber-sumber lainnya.

¹⁶ M.C. Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm.374.

Kegagalan PKI dalam aksi kudeta di Madiun tahun 1948 membawa kemerosotan PKI dimana tokoh-tokohnya tewas, dipenjara dan bersembunyi. Pada masa-masa itu PKI semakin porak-poranda. Pada tahun 1950 pemerintah mengeluarkan keputusan dengan tidak melarang PKI maka tokoh-tokoh PKI yang lolos dari hukuman muncul untuk membangun kembali PKI. Lima tahun kemudian yaitu pada tahun 1955 keadaan politik Indonesia dikejutkan dengan munculnya PKI menjadi kekuatan politik dari empat partai besar setelah PNI, Masjumi, dan Nahdlatul Ulama (NU). Bagi PKI, hasil itu merupakan suatu yang menakjubkan dan bertolak belakang dengan citra buruk PKI selama itu, sebab ternyata trauma politik peristiwa Madiun 1948 dan peran PKI dalam aksi mogok sepanjang 1950-1951 tidak berpengaruh.¹⁷

Dalam Bab empat tentang Pemilihan umum merupakan perwujudan sebuah negara demokrasi, penulis menggunakan buku yang ditulis oleh Herbert Feith dengan judul *The Indonesian Election of 1955* yang sudah dialih bahasakan oleh Katjasungkana, dkk dengan judul *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. Tujuan pemilihan umum itu yaitu menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat melalui organisasi maupun partai politik. Pemilihan umum berhasil diselenggarakan secara demokratis pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum pertama ini diikuti kurang lebih 28 partai politik. Rencana pemilihan umum sebenarnya sudah

¹⁷ Subhan SD, *op.cit.*, hlm. 58.

direncanakan sejak beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1945. Rencana pemilihan umum tersebut belum dapat terealisasi karena ada hal lain yang dianggap lebih mendesak untuk diselesaikan. Dalam kenyataannya, pemerintah menunda pemilihan umum untuk mengurus hal-hal yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan pemilihan umum, ditambah dengan adanya gerakan menentang diadakannya pemilihan umum yang dilancarkan oleh sejumlah partai serta kelompok-kelompok anggota Parlemen sementara.¹⁸

Peristiwa 17 Oktober 1952 membuat pemilihan umum menjadi persoalan politik yang penting. Beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang didukung oleh demonstrasi politik, gagal mendesak presiden untuk membubarkan parlemen sementara. Sejak peristiwa itu mulai ada pertarungan kekuasaan antara golongan-golongan tertentu dalam pimpinan angkatan darat dan presiden. Krisis tersebut meningkatkan pertentangan terhadap parlemen sementara yang sudah lama menjadi sasaran utama kekecewaan umum terhadap hasil kemerdekaan yang baru dicapai. Secara khusus kekecewaan itu menyangkut kehidupan politik yang terus tidak stabil sesudah revolusi, dan menyangkut hasil yang belum maksimal yang dicapai oleh tiga kabinet pertama.

Pada bulan November 1952 kabinet Wilopo menyusun Rencana Undang-Undang pemilihan umum dan disahkan sebagai undang-undang pada

¹⁸ Herbert Feith, *The Indonesian Elections of 1955*, a.b. Nugroho Katjasungkana dkk, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999, hlm. 3.

4 April 1953. Menurut Undang-undang tersebut, pemilu akan diadakan dua kali, yang pertama adalah pemilihan anggota DPR dan yang kedua adalah pemilihan anggota Konstituante yang nantinya akan menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap karena UUD negara yang dipakai pada waktu itu adalah UUD S 1950 yang sifatnya masih sementara. Pemilihan umum akan diadakan secara langsung dengan sistem perwakilan proporsional.

Undang-undang itu membagi Indonesia menjadi 16 daerah pemilihan. Setiap daerah pemilihan mendapatkan jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak memperoleh jarak minimum enam kursi di Konstituante dan tiga di Parlemen. Organisasi penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tanggung jawab bersama Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri, tetapi kekuasaan besar diberikan kepada Panitia Pemilihan Indonesia yang multi partai dan dipercaya untuk mengorganisir dan membuat peraturan mengenai pemilihan.¹⁹

Pemilihan umum 1955 dianggap masyarakat sebagai salah satu jalan keluar dari situasi politik yang tidak memuaskan. Kekecewaan masyarakat atas kemerdekaan yang dicapai dengan revolusi belum juga menghasilkan perbaikan dan justru krisis politik yang terjadi. Situasi politik ini tercermin pada krisis kabinet yaitu tiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masyarakat berharap dengan adanya pemilu segera tercipta pemerintahan yang stabil.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Itulah sebabnya pemilihan umum menjadi tumpuan harapan bagi segenap hati rakyat Indonesia.

Pembahasan tentang langkah PKI setelah Pemberontakan di Madiun, PKI menggunakan buku dari Subhan SD dengan judul Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955. Keberhasilan PKI menjadi empat besar dalam pemilu 1955 karena strategi baru PKI dibawah kepemimpinan Aidit dan kawan-kawannya. PKI dibawah kepemimpinan Aidit, melakukan perubahan strategi dan melakukan konsolidasi untuk memperbaiki citra buruk yang melekat ditubuh PKI pasca pemberontakan Madiun 1948. Partai ini berhasil bangkit kembali menjadi partai yang kecil tetapi disiplin, tidak korupsi dan terus berkembang, terutama sejak Maret 1952. Salah satu keunggulan PKI adalah kemampuan berkomunikasi yang sangat tinggi kepada rakyat. PKI melakukan propaganda dan agitasi menjelang pemilu 1955. PKI akan memperkenalkan suatu rumusan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi rakyat.

Kampanye PKI dengan sengaja menghindari kaum elite baik tingkat nasional maupun lokal, tetapi lebih mengarahkan diri kepada rakyat bawah (akar rumput) antara lain masyarakat miskin di perkotaan, kaum muda, kalangan buruh dan petani. Pada Pemilu 1955 PNI berhasil memperoleh suara 8.434.653, Masyumi memperoleh suara 7.903.886, NU memperoleh suara 6.955.141 sedangkan PKI hanya memperoleh suara 6.179.914. Perolehan suara PKI dalam Pemilu tersebut merupakan suatu yang menakjubkan karena dengan masa silam PKI ternyata tidak berpengaruh besar terhadap hasil

pemilu 1955 karena keberhasilan strateginya dalam upaya kemenangan pemilihan umum 1955.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi yang relevan adalah kajian-kajian historis yang mendahului sebuah penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Fungsi historiografi yang relevan adalah untuk menunjukkan keaslian sebuah karya ilmiah. Adanya penjelasan mengenai perbedaan penelitian-penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, tentunya sudah cukup untuk menunjukkan karya ilmiah. Berawal dari penjelasan mengenai historiografi yang relevan tersebut, maka penulis menemukan beberapa historiografi yang relevan dengan penulisan yang diajukan, sebagai berikut.

Buku yang berjudul *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* karangan Subhan SD, menjelaskan bahwa pemberontakan PKI Madiun 1948 telah membawa citra buruk di tubuh PKI. Hal tersebut membuat PKI menentukan langkah yang tepat untuk memperbaiki partainya yang hancur dan tercerai berai. Titik berat permasalahan yang dibahas dalam buku ini yaitu langkah-langkah yang dilakukan PKI pasca pemberontakan PKI Madiun 1948 yang dibahas secara umum, sedangkan skripsi yang penulis buat yaitu strategi PKI khusus dalam menghadapi pemilihan Umum 1955.

Buku karya Samsuri yang berjudul "Politik Islam anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal". Dalam buku ini memaparkan tentang perjuangan Masyumi dalam menghadapi PKI selama era

Demokrasi Liberal. Pembahasan dalam buku ini lebih menekankan pada pertentangan ideologi antara Islam sebagai ideologi dasar Masyumi dengan komunisme sebagai ideologi Partai Komunis Indonesia. Buku ini tidak menjelaskan tentang PKI dalam memanfaatkan Demokrasi liberal di Indonesia sehingga nantinya bisa ikut dalam pemilu 1955.

Skripsi karya Wasul Nuri, mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun penulisan 2008 tentang Perseteruan Partai Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia 1945-1960. Skripsi ini Membahas juga tentang perseteruan antara Partai Masyumi dengan partai komunis Indonesia dalam kapasitasnya sebagai partai politik dengan segala tugas, fungsinya dan konspirasi internasional terkait dengan adanya komunisme di Indonesia. Skripsi ini juga membahas bentuk-bentuk perjuangan Masyumi dalam melawan Komunisme yang dilakukan oleh PKI dan langkah-langkah PKI dalam menghadapi serangan dari Masyumi.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis buat adalah bahasan materi kajian. Penulis akan mengkaji lebih dalam tentang strategi Partai Komunis Indonesia dalam kemenangan pemilihan umum 1955. Skripsi Wasul Nuri secara umum mengamati tentang sebab perseteruan antara Masyumi dengan PKI. Sedangkan skripsi yang akan penulis buat cenderung mengkaji eksistensi Partai Komunis Indonesia, seputar Partai Komunis Indonesia dan penggalangan massa menjelang Pemilihan Umum 1955.

Skripsi yang kedua tulisan Nur Efri Setyadi Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul *Eksistensi Masyumi pada Pemilihan Umum 1955*. Skripsi ini mengkaji tentang awal pendirian Masyumi sebagai organisasi partai politik, peranan Masyumi dalam kancah politik nasional yang terdiri dari tiga bahasan yaitu pada awal kemerdekaan (1945-1950), masa tahun 1950-1955, dan perpecahan masyumi pada pemilihan umum 1955. Nur Efri dalam skripsinya menjelaskan tentang strategi Masyumi dalam memperoleh dukungan untuk menjaga eksistensinya dalam perpolitikan nasional sepeninggal PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia)²⁰ dan NU menghadapi pemilihan umum 1955. Perbedaan Skripsi tersebut berbeda dengan penulisan ini. Perbedaan terletak pada kajian partai, dimana penulis akan menyajikan Partai Komunis Indonesia dalam pemilihan umum 1955, sedangkan skripsi Nur Efri membahas partai eksistensi Masyumi dalam Pemilihan umum 1955.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode adalah cara, jalan, atau petunjuk teknis. Penelitian berarti penyelidikan yang cermat dan teliti terhadap suatu obyek untuk menentukan fakta-fakta untuk menghasilkan produk baru, memecahkan

²⁰ PSII adalah pewaris Sarekat Islam, organisasi massa nasionalis pertama. Pimpinannya sejak lama adalah putra pendiri SI, HOS Tjokroaminoto. Andree Frillard, *Nahdlatul Ulama Vis Negara pencarian isi, bentuk dan makna*, Yogyakarta: LKis, 1999, hlm.431.

suatu masalah, atau untuk menyokong atau menolak suatu teori. Oleh karena itu, metode sejarah dalam pengertiannya yang umum adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis.²¹

Metode penelitian sejarah yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode penelitian sejarah yang dirumuskan oleh Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah mempunyai lima tahapan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (*heuristik*), Kritik Sumber /keabsahan sumber (verifikasi), analisis/sintesis (interpretasi) dan penulisan Historiografi.²²

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah pertama dalam sebuah penelitian. Pemilihan topik berarti kegiatan memilih sebuah permasalahan yang akan ditulis. Dalam sebuah penelitian sejarah, topik yang dipilih adalah topik kesejarahan yang *workable*, yaitu dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia. Penentuan topik skripsi ini telah dipertimbangkan dengan beberapa faktor pendukung dalam penyelesaian skripsi. Faktor tersebut diantaranya adalah minat dan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

²¹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2007, hlm. 53.

²² Kuntowiyoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005, hlm. 90.

b. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah untuk menghimpun jejak-jejak masa lampau yang disebut dengan data sejarah. *Heuristik* diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Sumber sekunder yaitu kesaksian dari saksi orang lain.²³

Pada tahap ini penulis melakukan pencarian sumber sejarah dan data-data dari sekitar peristiwa yang dimaksud serta melakukan kegiatan pengumpulan sumber sejarah. Penulis mencari sumber lisan yaitu pelaku-pelaku sejarah sezaman, arsip dan buku-buku yang berkaitan dengan PKI dan Pemilihan Umum 1955. Penulis menggunakan berbagai literatur yang diperoleh dari perpustakaan di Yogyakarta, antara lain perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Kolese Iqnatius, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan berbagai tempat lain yang menyediakan data yang penulis anggap perlu. Penulis memilih sumber yang memang berkaitan dengan topik karya tulis yang dikaji, tujuannya agar kerangka pemahaman yang didapatkan berdasarkan

²³ I Gde Widja, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, 1989, hlm.18.

sumber-sumber yang relevan dapat disusun secara jelas, lengkap dan menyeluruh.

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heurisken* yang artinya menemukan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah disebut juga sebagai data sejarah, dalam bahasa latin disebut *datum* (tunggal) dan data (jamak). Sumber yang dikumpulkan haruslah sesuai dengan topik sejarah yang dikaji.²⁴ Menurut sifatnya sumber sejarah dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber Primer berasal dari orang yang hidupnya sezaman dengan peristiwa yang dikisahkan. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami peristiwa tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan para pelaku sejarah yang pernah mengetahui dan ikut dalam pemilu 1955 dan buku-buku yang ditulis oleh D.N. Aidit. Beberapa pelaku sejarah yang penulis wawancarai yaitu Bapak Wagiman Susanto, Bapak Kartomo Hadasmo, Bapak Harno Sutiman, Bapak Yoso Tariyo, Bapak Yatno, Bapak Prof. Dr. Syafii Ma'arif. PhD. Penulisan skripsi ini juga menggunakan dokumen dan arsip, sebagai berikut.

²⁴ G.J.Reiner, *A History its Purpose and Method*. a.b. Muin Umar, *Metode dan Manfaat Sejarah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997, hlm.113.

”Pemilihan Umum di Indonesia”, *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu 1 Oktober 1955. (Arsip Daerah)

“PNI, Masjumi, PNI, Nahdlatul Ulama Kekuatannya Berimbang, Jumlah Suaranya tak Berbeda Jauh”, *Kedaulatan Rakyat*, Jumat, 7 Oktober 1955. (Arsip Daerah)

“PM Burhanuddin Harahap, Rakyat tentukan nasibnya para petugas harus jaga agar pemilihan jalan baik Pilih bebas ; jangan ditekan”, *Kedaulatan Rakyat*, 27 September 1955. (Arsip Daerah).

“ Surat PBNU Kepada Zainul Arifin, K.H. Masykur, Moh. Manafijah tentang “ Peninjauan Kembali Tanda Gambar PKI Dalam Pemilihan Umum 1955”. (Arsip).

Aidit, DN. (1959). *Hari Depan Gerakan Tani Indonesia dalam pilihan Tulisan*. Jakarta: Jajasan Pembaharuan.

Aidit, DN. (1964). *Kaum Tani Menggajang Setan-Setan Desa*., Jakarta: Jajasan Pembaharuan.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah kesaksian seorang yang bukan merupakan saksi pandangan mata yakni seseorang yang tidak hadir pada waktu terjadinya peristiwa tersebut.²⁵ Pelapor mungkin pernah berbicara atau pernah membaca cerita maupun saksi mata. Sumber sekunder merupakan sumber yang didapat dari tangan kedua atau dari orang kedua.

Sumber sekunder misalnya buku-buku pendukung yang berkaitan dengan pengetahuan tentang PKI dan Pemilu 1955. Adapun sumber sekunder dalam penulisan ini diantaranya adalah:

Arbi Sanit. (1997). *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka

²⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982, hlm.35.

Pelajar.

Herbert Feith. (1999). "The Indonesian Election of 1955". A.b Nugroho Katjasungkana, dkk. *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia.

Mabes ABRI. (1995). *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia jilid III Konsolidasi dan Infiltrasi PKI (1950-1959)*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.

Roem, Mohammad. (1971). *Tindjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum*, Surabaya: Budaya Documenta.

Subhan SD. (1996). *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Buana.

Alfian Tanjung. (2006). *Mengganyang Komunisme: Langkah dan strategi menghadapi Kebangkitan PKI*. Jakarta: Taruna Muslim Press.

c. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber sendiri berarti usaha untuk menilai, menguji, serta menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan sumber yang autentik (asli).²⁶ Kritik sumber terdiri atas kritik intern dan kritik ekstern.

1) Kritik ekstern

Kritik ekstern bertujuan untuk menyelidiki aspek ekstern sebuah sumber. Aspek yang dimaksud adalah apakah sebuah sumber itu benar-benar sumber sejarah yang penulis perlukan dalam sebuah penulisan. Kritik ekstern mempunyai tugas menjawab tiga pertanyaan, yaitu relevan atau tidaknya, asli atau tidaknya, dan utuh

²⁶ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 99.

atau tidaknya sebuah sumber. Untuk membuktikan keaslian sumber yang penulis peroleh berupa dokumen atau arsip dengan melihat dengan teliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, hurufnya dan semua penampilan luar untuk mengetahui autentisitasnya. Penulis juga melakukan kritik ekstern terhadap sumber lisan dengan mempertimbangkan narasumber yang diwawancarai. Kritik ekstern salah satunya melihat berapa umur narasumber tersebut dan membandingkannya dengan narasumber lainnya yang sezaman.

2) Kritik intern

Kritik intern bertujuan untuk menyelidiki aspek intern sebuah sumber. Aspek yang dimaksud adalah apakah sebuah sumber sejarah dapat memberikan informasi yang penulis butuhkan. Dalam kritik intern ini, penulis harus mengetahui apakah kesaksian yang diberikan sumber dapat dipercaya dan apakah dokumen yang diperoleh itu autentik dan bisa dipercaya.

d. Analisis Sumber (Interpretasi)

Interpretasi adalah menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya, kemudian menganalisa sumber yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Pada tahap ini penulis dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh. Pada tahap interpretasi perlu dilakukan analisis sumber untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam kajian sejarah, karena unsur subyektivitas

dalam suatu penulisan sejarah selalu ada yang dipengaruhi oleh jiwa, zaman, kebudayaan, pendidikan, lingkungan sosial, dan agama yang melingkupi penulisannya.

Analisis sumber perlu dilakukan dengan menjelaskan data-data yang ada atau menguraikan informasi dan mengkaitkannya antara satu sumber dengan sumber lainnya.²⁷ Pada tahap interpretasi ini penulis berupaya untuk menguraikan sumber karena sumber-sumber sejarah terkadang mengandung berbagai kemungkinan. Langkah selanjutnya setelah data terkumpul, kemudian disatukan dan menjadi fakta yang akurat.

e. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Pada tahap ini penulisan sejarah memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga standar mutu cerita sejarah, misalnya prinsip cara membuat urutan peristiwa yang mana memerlukan prinsip-prinsip, seperti prinsip kronologi (urutan waktu), prinsip kaukasi (hubungan dengan sebab akibat) dan bahkan juga kemampuan imajinasi (kemampuan untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa) yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian yang masuk akal dengan bantuan pengalaman. Membuat semacam analogi antara peristiwa di waktu yang lampau dengan tindakan yang telah kita saksikan dengan mata kepala sendiri di waktu sekarang, terutama bagi

²⁷ *Ibid*, hlm.22.

peristiwa-peristiwa yang sulit dicari dasar kronologi dan kaukasi dalam penghubungnya.²⁸

Dalam tahap ini penulis juga dituntut kemampuannya untuk mengembangkan imajinasi dalam merangkai sebuah peristiwa sejarah dengan mengaitkan antara fakta satu dengan lain, sehingga historiografi yang dihasilkan akan bersifat obyektif. Tahap selanjutnya yaitu menyampaikan hasil penelitian secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah menurut kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Sartono Kartodirdjo penggambaran kita mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan, ialah dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya.²⁹ Mengingat penjelasan dari Sartono Kartodirdjo di atas, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan-pendekatan tersebut, antara lain:

Pendekatan politik merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui bermacam-macam kegiatan dalam sebuah sistem politik

²⁸ *Ibid*, hlm.25.

²⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm.4.

atau negara³⁰. Menurut Sartono Kartodirdjo, pendekatan politik adalah pendekatan yang mengarah pada struktur kekuasaan jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan politik adalah pendekatan dan lain sebagainya. Pendekatan ini digunakan dalam kajian tentang proses latar belakang pendirian partai, strategi politik PKI, serta kiprah politik yang dijalankan oleh organisasi yang berhaluan komunis ini.

Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat yang terikat dengan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agamanya, tingkah laku, serta keseniannya.³¹ Pendekatan sosiologi dapat digunakan untuk melihat konflik yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Partai Komunis Indonesia berhasil memanfaatkan keadaan sosial rakyat bawah dalam meraih dukungan massa pada pemilu 1955 dari penduduk tingkat akar rumput, baik penduduk miskin perkotaan, kaum muda, kaum buruh dan petani.

Pendekatan ekonomi merupakan penjabaran dari konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasi yang dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam keadaan ekonomi sehingga dapat dipastikan hukum

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm.8.

³¹ Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm.82.

kaidahnya³² Pendekatan ekonomi dalam hal ini mencakup tentang ekonomi rakyat bawah dimana PKI berupaya menggalang kekuatan dari rakyat bawah dengan pendapatan ekonomi rendah.

Pendekatan Antropologi adalah pendekatan yang dikembangkan untuk mempelajari masalah-masalah budaya suatu tempat.³³ Melalui pendekatan ini akan dipaparkan tentang budaya atau kesenian masyarakat yang digunakan PKI untuk menarik simpati rakyat dalam masa-masa kampanye menjelang pemilu 1955. Melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) PKI berupaya mengangkat kesenian-kesenian untuk memperoleh simpati dan dukungan dari rakyat. Lekra merupakan organisasi *underbouw* PKI dalam bidang kebudayaan.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi yang berjudul ” Strategi Partai Komunis Indonesia dalam Pemenangan Pemilu 1955 ” memiliki sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama ini berisi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode dan pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai awal pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI) dari ISDV sampai berubah menjadi PKI. Dalam

³² Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, Jakarta: Bhatara, 1996, hlm.32.

³³ Abdurahman, *op.cit.*, hlm.14.

bab ini berisi tentang seputar pemberontakan PKI di Indonesia. PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1926-1927. PKI berhasil mencetuskan pergolakan rakyat di beberapa tempat di Indonesia, selain itu dalam bab ini akan mengupas tentang pemberontakan PKI/FDR di Madiun pada tahun 1948 yang membawa citra buruk bagi PKI.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan tentang politik Partai Komunis Indonesia dalam masa awal kemerdekaan 1945- 1950 dan kiprah PKI dari tahun 1950-1955. Alam Demokrasi Liberal yang berlangsung di Indonesia tahun 1950-an juga memberikan kesempatan kepada PKI untuk mengadakan rehabilitasi walaupun sebelumnya partai komunis itu telah melakukan pemberontakan.

Bab ke-empat penulis membahas Strategi Partai Komunis Indonesia dalam kemenangan pemilihan umum 1955. Bagaimana langkah-langkah PKI menghadapi pemilihan umum 1955 dijelaskan dalam bab ini. Langkah-langkah dengan merangkul rakyat bawah sampai kesuksesannya dalam pemilu 1955. Bab ini juga menjelaskan pelaksanaan, sistem pemilihan umum 1955, dan hasil pemilihan umum 1955.

Bab kelima berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab pertama hingga bab ke-empat. Kesimpulan ini merupakan jawaban-jawaban yang menjadi pokok permasalahan dalam rumusan masalah. Dalam kesimpulan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas strategi yang dilaksanakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam upaya kemenangan Pemilu sehingga berhasil menjadi pemenang ke-4 dalam pemilu 1955.

BAB II

SEPUTAR PKI DAN PEMBERONTAKANNYA

A. Latar Belakang Berdirinya Partai Komunis Indonesia

PKI adalah partai politik di Indonesia yang berhaluan komunis¹. Pada awalnya partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda yang bernama Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama *Indische Sosial Democratische Vereeniging* (ISDV) atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai social Demokratis) yang aktif di Hindia Belanda. Sneevliet bersama H.W. Dekker dan Bersgma mencoba menyebarkan paham komunis melalui pers. Sneevliet mendirikan Soara Mardika dan Soara Rakyat, melalui media inilah mereka berhasil merebut wartawan untuk menjadi kader Komunis seperti Darsono.²

Dibawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harusnya diikuti oleh Indonesia. Kemenangan kaum Bolsheviks (Partai Komunis Uni Soviet) membuat Lenin

¹ Menurut Magnis Suseno, Komunisme adalah gerakan dan kekuatan partai-partai Komunis yang lahir sejak revolusi Rusia bulan oktober 1917 dibawah pimpinan W. I. Lenin yang tumbuh menjadi kekuatan politik dan ideologi. Internasional. Komunisme tidak sama dengan Marxisme. Marxisme sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl Mark yang dilakukan oleh Friederic Engels (1820-1895) yang intinya pada ideologi perjuangan kaum buruh industri pada abad ke-19. Marxisme dianggap merupakan salahsatu komponen dalam sistem ideologi Komunisme. Haedar Nasir, *Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001, hlm. 36.

² Alfian Tanjung, *Menggayang Komunisme: Langkah dan strategi menghadapi kebangkitan PKI*, Jakarta: Taruna Muslim Press, 2006, hlm. 5.

bertekad untuk menyebarkan paham komunisme ke dunia internasional dengan mendirikan partai Komunis di setiap negara. Tahun 1917 para tentara dan pelaut Belanda yang telah direkrut oleh ISDV melakukan pemberontakan di Surabaya. Langkah mereka dapat diredam oleh penguasa kolonial Belanda. Sneevliet dan pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda. ISDV terus melanjutkan gerakannya melalui bawah tanah. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa maka keanggotaan ISDV berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia.

Sejak kebangkitan nasional tahun 1908, Sarekat Dagang Islam (SDI) yang kemudian menjadi Sarekat Islam (SI) merupakan salah satu organisasi yang berkembang pesat di Indonesia.³ Sneevliet menyadari adanya hambatan untuk menanamkan ajaran Marxisme di Hindia Belanda. Kaum komunis selanjutnya menerapkan strategi blok di dalam (*Block Within*)⁴ sejak tahun 1916 di dalam tubuh SI dengan tujuan mengembangkan propaganda di antara massa di dalam tubuh SI. Propaganda tentang komunisme diintensifkan dengan cara menumpang pada pertemuan-pertemuan SI. SI tidak melarang adanya keanggotaan rangkap. Adanya sistem keanggotaan rangkap ini

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1994, hlm. 8.

⁴ *Block within* adalah stategi memecah belah organisasi dari dalam organisasi itu sendiri dalam dunia komunis atau dengan kata lain taktik aksi di dalam. Mabas ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid I Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948)*, Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, hlm. 7.

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PKI untuk memecah belah SI dari dalam (*Block Within*).

Perkembangan selanjutnya, pengaruh kiri yang dibawa ISDV ke dalam SI bertambah besar dan menyebabkan konflik internal. Konflik tersebut menyebabkan perpecahan di dalam tubuh SI sampai melahirkan dua SI, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih dipimpin oleh Tjokroaminoto, Agus Salim, Abdul Muis dan lain-lain. Disisi lain ada SI Merah yang sejak 1924 menjadi Sarekat Rakyat (SR) yang dipimpin Semaun. Pada tahun 1920 para aktivis komunis itu pada akhirnya menggunakan istilah komunis secara terang-terangan di dalam partai mereka, oleh karena itu muncullah nama Partai Komunis Indonesia sebagai ganti dari ISDV.⁵

Setelah mendapat dukungan yang besar dari anggota SI, maka ISDV berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda pada bulan Mei 1920. Semaun dipilih sebagai ketuanya dan Darsono dipilih sebagai wakil PKI. Pada bulan Mei 1920, ISDV yang telah berhasil meraih dukungan besar dari para anggota SI, berganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan pada tahun 1924 berganti nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia.⁶ PKI lahir dan membayangkan-bayangi perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Pada akhirnya kaum komunis terpaksa meninggalkan politik blok di dalam dari SI

⁵ Anhar Gonggong, *Pemanfaatan Islam Oleh Kaum Komunis: Beberapa kasus pada awal munculnya gerakan komunis di Indonesia (1914-1927)*, *Persepsi*, 1979, hlm. 61-62.

⁶ Samsudin, *Mengapa G 30 S/PKI Gagal?*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. ix.

pada tahun 1921.⁷ Upaya yang dilakukan PKI berhasil merekrut pemuda untuk dijadikan kader Komunis seperti Semaun. Dibawah pengaruh Semaun, SI cabang Semarang berkembang cukup pesat.

Pada awal abad ke-20, gerakan komunis dengan gerakan lainnya seperti Islam dan Nasionalisme, melakukan perlawanan terhadap penguasa kolonial. Aksi itu berupa konfrontasi yang mengandalkan kekuatan fisik. Keterlibatan PKI pada waktu itu terlihat dengan meletusnya aksi perlawanan yang dilaksanakan sepanjang tahun 1926-1927. Semua perlawanan itu berhasil ditumpas oleh kolonial Belanda. Penguasa kolonial Belanda akhirnya melakukan penangkapan terhadap mereka yang terlibat dalam perlawanan tersebut. Banyak orang-orang komunis yang ditangkap dan dibuang ke daerah Boven Digul di pedalaman Irian Jaya. Hal ini membuat kolonial Belanda melarang kegiatan PKI sejak tanggal 23 Maret 1928. PKI selanjutnya bergerak secara illegal yaitu menjadi sebuah organisasi yang bergerak di bawah tanah.

PKI merupakan partai yang kecil, terisolasi, pimpinan terpecah belah. Pada awalnya PKI menempuh “politik garis keras” yang pernah mengakibatkan peristiwa Madiun dan mengorganisasi serangkaian pemogokan. Kebijakan ini menimbulkan gelombang anti-Komunisme, dan pembersihan terhadap orang-orang komunis.⁸ Setelah pemberontakan PKI tahun 1926 sampai sebelum terjadinya pemberontakan Madiun 1948, PKI

⁷ Williams C, Michael, Arit dan Bulan Sabit: *Pemberontakan Komunis di Banten*, Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2003, hlm. 13.

⁸ Wieringa Saskia Eleonora, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Garba Budaya, 1999, hlm. 199.

cenderung vakum karena mengalami disorganisasi, tetapi setelah kedatangan Praha Alimin dan Musso yang membawa perintah baru dari *Komintern* Moskow. Mereka memberikan pimpinan baru pada PKI serta tujuan yang lebih jelas dan tegas. Hal ini membawa perubahan dengan banyaknya elemen kiri yang bergabung kepada mereka, termasuk Amir Sjarifuddin.

Selama kurun waktu tersebut, PKI berusaha mempertahankan ideologi Komunis dengan jalan kekerasan dan menghalalkan segala cara yang diharapkan dapat mencapai tujuannya. Jalan kekerasan, konfrontatif, dan tak kenal kompromi ini memang dikenal sebagai salah satu ciri khas gerakan komunis dimana-mana. Sikap keras PKI sering membawa dampak buruk, yakni jatuhnya korban jiwa yang banyak di kalangan yang menentang komunis. PKI bergerak kembali secara legal pada 21 Oktober 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Muso kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Muso kemudian memimpin Komunis Indonesia. Dibawah kepemimpinan Musso lahirlah apa yang disebut dengan “konsep Muso” yaitu jalan baru Republik Indonesia. Isinya hanya boleh ada satu partai yang berdasarkan Marxisme-Leninisme. Semua Organisasi kiri yang bergabung dengan FDR, pada bulan Februari 1948 harus bergabung dengan PKI yang kemudian dikendalikan oleh Muso melalui Front Persatuan Nasional.⁹

PKI melakukan pemberontakan untuk kesekian kalinya di Madiun tepatnya bulan September 1948 yang kemudian terkenal dengan istilah *Madiun Affair*. Pemberontakan dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat/PKI

⁹ Alfian Tanjung, *op.cit.*, hlm. 7.

yang berhasil menguasai Madiun dan mendirikan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Dalam waktu beberapa jam mereka telah berhasil merebut kota setelah menyergap pasukan-pasukan yang pro dengan Pemerintah. Markas Staf Pertahanan Jawa Timur, markas CPM, tangsi polisi mereka rebut dan senjatanya diambil. Perwira-perwira yang tidak pro-FDR mereka tangkap dan pagi-pagi tanggal 19 September Pemerintah RI telah ditumbangkan di Madiun.¹⁰ Kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh PKI dapat dicermati dari tulisan di bawah ini:

Kejadian itu terasa begitu mengerikan...beribu-ribu manusia dengan kelewang dan berbagai senjata memekik-mekik bagai serigala haus darah ... mereka berduyun-duyun tidak ada habisnya sambil terus memekik dan memaki-maki kemudian menerjang dengan beringas dan penuh kebencian.¹¹

Pemberontakan PKI/FDR Madiun ini membawa luka yang mendalam bagi Indonesia. BP-KNIP dalam sidangnya tanggal 20 September 1948 memberi kewenangan kepada Presiden Soekarno sepenuhnya untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun. Pada akhirnya pemberontakan PKI/FDR Madiun dapat ditumpas oleh pemerintah. Pemberontakan FDR/PKI Madiun tahun 1948 banyak sekali menelan korban jiwa. Tokoh kunci dalam gerakan tersebut yaitu Muso berhasil di tembak mati. Para tokoh-tokoh komunis yang berhasil meloloskan diri dalam peristiwa tersebut.

¹⁰ Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Buana, 1997, hlm. 235.

¹¹ Tim Penyusun Jawa Pos, *Lubang-lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun*, Jakarta: Grafiti, 1990, hlm. 15.

Selama tahun 1950 keadaan PKI berada dalam kegelapan dan kekacauan, setelah mendapat citra buruk setelah peristiwa Madiun pada bulan September 1948. Pemberontakan FDR/PKI 1948 di Madiun telah menempatkan PKI dalam krisis kedua sejak pemberontakan 1926-1927. Pemberontakan Madiun yang singkat itu membawa citra buruk bagi PKI sebagai penghianat revolusi di tengah saat-saat paling sulit, untuk membangun kecurigaan kaum militer terhadap PKI dan ketegangan antara Masyumi dan PKI yang mendalam.¹² Kegagalan tersebut berdampak buruk bagi Partai Komunis Indonesia dalam meluaskan pengaruhnya dalam masyarakat. Peristiwa Madiun 1948 menyebabkan PKI tercerai-berai, namun dapat segera diatasi dan dibangun kembali oleh kader-kader yang dapat meloloskan diri. PKI dengan gemilang mampu tampil kembali setelah peristiwa Madiun 1948 berkat pimpinan tokoh muda Aidit dan teman-temannya (Lukman, Njoto, dan Sudisman), yang berhasil mengambil alih pimpinan partai pada tahun 1951.

Masa tahun 1950-1951, tokoh-tokoh PKI yang bersembunyi, sesudah tidak divonis mati oleh pemerintah, pelan-pelan muncul kembali. Tahun 1950-an PKI dapat dikatakan berhasil karena dapat menjadi suatu gerakan yang dinamis dan berkembang sangat kuat mengingat sebelumnya PKI merupakan organisasi yang lemah, terpecah belah dan tidak berdaya. PKI mendukung aspek kepentingan rakyat yang sedang dilaksanakan Sukarno. Tugas PKI yaitu ikut dalam menumbangkan kekuatan-kekuatan anti rakyat dari kekuasaan negara. Hal ini dicapai dengan jalan Revolusi dari Atas PKI mendorong

¹² Wieringa Saskia Eleonora, *op.cit.*, hlm. 158.

kekuasaan negara untuk melakukan aksi-aksi revolusioner dan untuk melakukan perombakan-perombakan dalam lembaga-lembaga negara. Sedangkan dalam revolusi dari bawah PKI mengorbankan, mengorganisasi dan memobilisasi rakyat guna mencapai perombakan-perombakan tersebut.¹³

Masa tahun 1951-1952, PKI kembali bergerak di bawah tanah sebagai akibat mereka dalam pemogokan dan kerusuhan. Pada bulan Januari 1951 kepemimpinan PKI diambil alih oleh generasi muda seperti: Aidit, Lukman, Njoto dan Soedisman yang telah berhasil mengambil alih kekuasaan atas Politbiro dari tangan generasi tua yang selamat dari peristiwa Madiun 1948. Aidit menekankan bahwa Marxisme adalah sebuah pedoman untuk bertindak, bukannya dogma yang kaku. Kepemimpinannya membawa pada pragmatisme bagi PKI yang memungkinkan partai ini segera menjadi partai politik yang besar. Pada tahun 1952 PKI bergerak kembali secara legal dan yang tidak terduga justru mendapat kemenangan pada pemilu 1955 yaitu keluar sebagai pemenang ke-4.

B. Seputar Pemberontakan PKI

Setelah PKI merasa bahwa pengaruhnya di dalam tubuh SI cukup besar, kemudian PKI memanfaatkan pengaruhnya untuk menggerakkan massa rakyat. PKI menggunakan bendera SI untuk melakukan pergolakan fisik melawan pemerintah Hindia Belanda. Pada bulan Desember 1924 bersiap-siap

¹³ Tribuana Said. *Perlawanan Pers Indonesia (BPS) terhadap Gerakan PKI*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 24.

mengadakan pemberontakan. Sebenarnya rencana pemberontakan ini tidak disetujui oleh pimpinan-pimpinan mereka yang masih berada di pengasingan, terutama Semaun dan Tan Malaka, namun rencana pemberontakan tetap dilanjutkan. Suatu usaha untuk menggerakkan gelombang pemogokan besar-besaran pada tahun 1925. PKI terdesak untuk bergerak di bawah tanah ketika aparat membubarkan rapat-rapatnya dan menahan pimpinannya. Pada Bulan September 1925, Darsono dan beberapa pimpinan PKI berhasil ditangkap. Darsono lari ke luar negeri yaitu pergi ke Uni Soviet, sedangkan Alimin lari ke Singapura yang akhirnya bergabung dengan Tan Malaka.

PKI kembali melakukan pemberontakan pada tahun 1926-1927 yang dilakukan oleh pimpinan PKI yang masih tersisa. Upaya PKI berhasil mencetuskan pergolakan rakyat di beberapa tempat, diantaranya: Tahun 1926 terjadi pemberontakan di Jakarta, Tangerang, Banten, Bandung, Priangan Timur, Surakarta, Kediri, Banyumas, Pekalongan dan Kudus. Sementara tahun 1927 terjadi pemberontakan di Sawah Lunto, Kota Lawas, Pariaman, Painan dan Lubuk Sikaping. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda.¹⁴ Pergolakan rakyat tersebut gagal karena kurangnya koordinasi dari PKI. Banyak tokoh komunis dan nasionalis yang ditangkap, dipenjarakan bahkan ada yang dibuang ke Digul Tanah Merah, Irian Jaya. Ada tokoh komunis yang berhasil melarikan diri ke Luar negeri yaitu Alimin dan Muso. Sejak gagalnya pergolakan rakyat melawan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1926-1927, kegiatan PKI tidak muncul

¹⁴ Mabes ABRI, *loc.cit.*

kembali. PKI muncul kembali setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Kegagalan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1926-1927 membawa kerugian bagi perjuangan pergerakan nasional. Pengawasan terhadap semua aktivitas partai-partai politik lebih diperketat. PKI hanya berjuang untuk mencapai tujuan politiknya yaitu merebut kekuasaan untuk mendirikan pemerintahan komunis di Indonesia. Pada akhir Oktober sampai awal Desember 1945, di Jawa Tengah muncul gerakan komunis yang dikenal dengan sebutan “Peristiwa Tiga Daerah” yaitu meliputi Tegal, Brebes, dan Pemalang. PKI berhasil menghimpun Massa di daerah-daerah Slawi, Pemalang, dan Brebes. Peristiwa tiga daerah itu akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah yaitu pada tanggal 17 Desember 1945 setelah adanya pembersihan oleh Resimen TKR XVII, situasi keamanan di Tiga daerah tersebut dapat dipulihkan kembali.

Sejalan dengan strategi perjuangan komunis Internasional, FDR/PKI berusaha menggulingkan kekuasaan yang sah. Pada tanggal 27 Februari 1948 sesuai dengan Penetapan Presiden RI No. 9 maka diatur tentang pelaksanaan Reorganisasi dan Rasionalisasi TNI. Mengetahui hal tersebut, FDR/PKI berusaha mempengaruhi anggota Divisi IV Panembahan Senopati di Solo yang dipimpin oleh Kolonel Sutarto. Kekuatan juga berasal dari kekuatan laskar Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Divisi IV Panembahan Senopati dan kekuatan Pesindo ini nantinya yang akan menjadi kekuatan FDR/PKI di daerah Solo dan Madiun.

FDR/PKI melakukan kekacauan di daerah Solo dan sekitarnya untuk mengalihkan perhatian semua pihak. Pada bulan Agustus 1948, terjadi pertentangan antara pasukan Panembahan Senopati dan Kesatuan Siliwangi yang waktu itu sedang pergi ke daerah Solo. Mengatasi masalah ini, pada bulan September 1948, Soekarno menyatakan daerah Solo dalam keadaan darurat perang dan menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer. Sebenarnya aksi-aksi PKI/FDR di daerah Solo ini merupakan bentuk untuk menutupi aksi yang ada di Kota Madiun, dimana pada tanggal 18 September FDR/PKI memproklamlirkan “Negara Soviet Indonesia”.

Pemberontakan FDR/PKI Madiun ini diawali pada tanggal 11 Agustus 1948 Musso kembali dari Uni Soviet dan mengkoordinasikan kembali organisasi-organisasi kiri yang saat itu tergabung dalam FDR untuk membubarkan diri dan bergabung ke dalam PKI. PKI mendorong kaum buruh dan petani untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi dan pemogokan-pemogokan oleh kaum buruh dan petani.¹⁵ Kaum tani didorong agar mengambil alih ladang-ladang milik tuan tanah. Sementara para tuan tanah yang berasal dari kaum santri, para kepala desa, kaum birokrat, pimpinan pusat Republik dan kekuatan militer yang pro pemerintah mengecam aksi tersebut dan sadar bahwa hal itu merupakan ancaman terhadap negara.

Pada tanggal 7 September 1948 para pemimpin PKI mengadakan perjalanan keliling Jawa Timur untuk memberi semangat kepada rakyat agar

¹⁵ M.C. Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, Hlm. 480.

berdiri di belakang PKI yang pada waktu itu sedang menggalang Front Nasional. Pada tanggal 8 September 1948 mereka mengadakan rapat raksasa di Madiun, dilanjutkan di Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu dan Purwodadi hingga tanggal 17 September 1948. Pada tanggal 13 September 1948 telah terjadi pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang pro PKI dengan tentara yang pro pemerintah di Surakarta. Pada tanggal 17 September 1948, Divisi Siliwangi berhasil memukul mundur para pendukung PKI dari kota itu. PKI mundur ke Madiun untuk bergabung dengan satuan-satuan PKI lainnya dan bersiap-siap untuk menghadapi serangan yang diduga akan dilancarkan oleh pemerintah terhadap Madiun.

Pada tanggal 18 September 1948, para pendukung PKI tersebut merebut tempat-tempat yang strategis di daerah Madiun, membunuh tokoh-tokoh pro pemerintah dan mengumumkan melalui radio bahwa suatu pemerintahan Front Nasional yang baru telah terbentuk. Bendera Merah Putih diturunkan dan diganti dengan bendera PKI yang berwarna merah bergambar Palu Arit. PKI kemudian lebih memilih Solo sebagai daerah kekacauan dengan tujuan agar hubungan antara Yogyakarta dan Madiun itu terpecah.¹⁶ PKI memilih Madiun untuk melancarkan aksinya karena Madiun dikenal sebagai basis massa PKI yang cukup kuat. Daerah Madiun juga terdapat banyak buruh. PKI di Madiun sangat kuat karena buruh adalah penggerak PKI kedua setelah kaum petani.

¹⁶ Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 35.

Pemberontakan FDR/PKI Madiun 1948 meninggalkan luka yang sangat mendalam. Banyak kyai dan santri militan yang menjadi musuh PKI, dengan mudah mereka terjang. Tidak itu saja mereka seperti kerumunan lebah menyerbu polsek, menduduki polres, depo militer, kantor distrik militer, kabupaten, kejaksaan, kecamatan, bahkan kelurahan pun tidak lepas dari serbuan mereka.¹⁷ Dalam waktu yang singkat akhirnya Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwantoro, Sukoharjo, Wonogiri, Blora, Pati, Cepu, dan Kudus dikuasai laskar merah. Banyak korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Korban keganasan FDR/PKI tidak pernah diketahui secara pasti. Adanya sumur-sumur tua dan lubang-lubang pembantaian yang dipakai FDR/PKI untuk menghabisi lawan-lawannya merupakan saksi bahwa kebiadaban yang mengerikan pada waktu itu.

Menyikapi situasi negara yang terancam bahaya maka badan kerja BP-KNIP mengadakan sidang darurat untuk mengeluarkan undang-undang pemberian kekuasaan penuh kepada presiden.¹⁸ Kemudian Kolonel Gatot Subroto ditunjuk menjadi Gubernur Militer untuk daerah Jawa Tengah menggantikan pejabat lama yang bergabung dengan PKI. Surakarta dijadikan sebagai pusat komando. Pada tanggal 22 September 1948 Angkatan Perang Republik mulai digerakkan untuk menyerang Madiun. Menurut Panglima

¹⁷ Maksum, *op.cit.*, hlm. 15.

¹⁸ Undang-undang itu berbunyi “Selama 3 bulan terakhir terhitung mulai tanggal 15 September 1948 kepada presiden diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan yang telah ada guna menjamin keselamatan Negara dalam menghadapi bahaya yang memuncak”. *Ibid*, hlm. 38

Besar Soedirman , Madiun harus ditaklukan terlebih dahulu , karena Madiun merupakan pusat atau motor pemberontakan. Pasukan pro pemerintah yang dipelopori oleh Divisi Siliwangi berhasil mendesak para pemberontak. Dalam situasi yang terdesak tersebut, mereka membunuh para pejabat pemerintah dan para pemimpin Masyumi dan PNI, sementara di desa-desa terjadi pembunuhan-pembunuhan.

Pada tanggal 30 September 1948, kaum pemberontak meninggalkan kota Madiun dan terus dikejar oleh pasukan pro pemerintah sampai ke wilayah pedesaan. Pada tanggal 31 September 1948, Musso tewas ketika berupaya melarikan diri dari tahanan. Aidit dan Lukman dikatakan berhasil melarikan diri ke Vietnam, Amir Sjarifuddin dan segerombolan pasukan PKI ditangkap dan selanjutnya ditembak mati. Sekitar 35.000 orang ditangkap. Berapa banyak orang yang tewas selama peristiwa itu tidaklah diketahui, tetapi diduga sedikitnya 8.000 orang.¹⁹

Pada tahun 1950-1951, PKI menggerakkan aksi-aksi pemogokan dan kekerasan. Pelaku-pelaku pemogokan itu umumnya SOBSI, BTI, PKI. Hal ini membuat situasi politik semakin buruk dan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit. Buruh-buruh melakukan pemogokan di sarana-sarana vital seperti pabrik, perkebunan, pelabuhan. Pada awalnya aksi pemogokan itu sebagai respons untuk menandingi kekuatan asing, namun pada akhirnya menjadi suatu ancaman bagi kepentingan nasional. Pada tanggal 13 Februari 1951 Perdana Menteri Natsir mengeluarkan Keputusan No. 1 untuk meredam

¹⁹ Riklefs, *op.cit.*, hlm. 482.

pemogokan itu.²⁰ Keputusan itu tidak menambah keadaan menjadi lebih baik karena pemogokan cenderung dilakukan dengan kekerasan, seperti penyerangan pos polisi Tanjung Priok, pelemparan granat di Bogor, dan kerusuhan di daerah Sumatra Timur. Pemogokan berhasil diredam pada masa Kabinet Sukiman dengan meluncurkan razia massal terhadap orang-orang komunis yang terlibat dalam aksi pemogokan.

²⁰ Subhan SD, *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996, hlm. 31.

BAB III

PKI DALAM KANCAH POLITIK NASIONAL

A. PKI Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya Republik Indonesia. Di pelosok negeri ini kemerdekaan disambut dengan suka cita dan rasa syukur oleh semua elemen bangsa. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, Sistem Parlementer digunakan setelah terjadi desakan oleh sejumlah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu tugas-tugas dari Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).¹ KNIP mengirimkan suatu petisi kepada Presiden Soekarno agar diadakan sidang pleno untuk membahas perubahan sifat lembaga tersebut dari eksekutif menjadi legislatif.

Berdasarkan dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tertanggal 16 Oktober 1945, kekuasaan presiden sebagai orang yang memiliki wewenang atas DPR dan MPR dicabut. Pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang memperbolehkan didirikannya partai-partai politik. Setelah itu lahirlah partai-partai politik di Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI) terbentuk kembali pada bulan Oktober 1945.² Pada tanggal 11 November 1945 KNIP menunjuk Sutan Sjahrir

¹ Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI: Sebuah gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*, Yogyakarta: Caravati Bokks, 2007, hlm. 51.

² M.C. Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 465.

dan Amir Sjarifuddin sebagai pembentuk Kabinet Parlementer. Pada tanggal 13 November 1945, lahirlah Kabinet Parlementer pertama yang dipimpin oleh Sjahrir yang menjabat sebagai perdana menteri.³ Sjahrir yang merupakan tokoh sosialis Indonesia (PSI) memelopori pergantian sistem pemerintahan presidensiil yang termaktub dalam UUD 1945 dan menerapkan sistem parlementer⁴. Sutan Sjahrir telah mengawali budaya parlementer yaitu berulang kali jatuh bangunnya kabinet menjadi gambaran pada sistem parlementer.

Sidang kabinet tanggal 25 Juni 1945 di Yogyakarta untuk meninjau keadaan politik, timbullah perselisihan pendapat.⁵ Akibat mendapat tekanan dari oposisi yang semakin besar terhadap kabinetnya, Sjahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 28 Februari 1946. Pada tanggal 2 Maret 1946 Sjahrir membentuk kabinet lagi. Pada masa Kabinet Syahrir PKI menyelenggarakan Kongres IV pasca proklamasi pada bulan Mei 1946. Pada akhir kongres, PKI mengeluarkan pernyataan politik bahwa PKI tidak akan masuk kabinet, karena dengan masuknya PKI ke dalam kabinet akan memperlemah kedudukan RI.

³ *Ibid*, hlm. 52.

⁴ Sistem Parlementer menempatkan partai-partai politik yang terwakili di DPR sebagai pemegang kekuasaan. Parlemen ini terdiri dari anggota-anggota berdasarkan pengangkatan, bukan atas dasar pemilihan, mengingat faktanya tugas utama republik adalah menghimpun perlawanan menentang Belanda dan beberapa bagian dari wilayah Indonesia telah jatuh dalam kekuasaan Belanda. Ulf Sundhaussen, Refleksi terhadap Parpol dan Pemilu di Indonesia, *PRISMA* No. 8, 1996, hlm. 6.

⁵ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1985, hlm. 59.

Ketika sampai kepada menentukan sikap dalam menghadapi tuntutan dan provokasi Belanda yang akan memecah sayap kiri, unsur-unsur sayap kiri mengambil sikap untuk menarik diri dari pemerintah.⁶

Sjahrir selanjutnya melakukan perundingan dengan Inggris dan Belanda. Persetujuan dicapai pada tanggal 16 Oktober 1946.⁷ Secara umum Sjahrir menerima isi dari perjanjian Linggarjati tersebut. Masyumi dan PNI menolak persetujuan itu, dan mereka bersama membentuk “Benteng Republik”, untuk memblok persetujuan itu dalam KNIP. Sayap kiri kemudian membentuk blok baru terdiri dari Sosialis, Buruh, BTI, PESINDO, dan Partai Komunis, tetapi dengan Masyumi dan PNI sebagai oposisi.

Partai yang awalnya mendukung Sjahrir ternyata tidak mendukung lagi kepada Sjahrir. Keterangan Perdana Menteri Sutan Sjahrir menimbulkan perdebatan sengit dan timbul resolusi sehingga keadaan politik semakin gawat. Golongan kiri (komunis) yang awalnya mendukung Sjahrir ternyata juga berbalik menentanginya. Hal ini tercermin dalam pernyataan politik sayap kiri yang menghendaki rekonstruksi dalam

⁶ Jacques Leclerc, *Audit dan Partai Pada Tahun 1950*, *PRISMA* No. 7 1982 Tahun XI, hlm. 20.

⁷ Isi Persetujuan 16 Oktober 1946 meliputi penarikan kembali pasukan Inggris, pengakuan secara de facto atas kedaulatan RI di Jawa, Madura, dan Sumatra. Pembentukan suatu Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949 yang meliputi seluruh wilayah bekas Nederlands Indie, dengan Ratu Belanda sebagai Kepala Negara secara simbolik. Pengembalian semua milik Belanda. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*, Jakarta: Rola Sinar Perkasa, 1988, hlm. 29.

revolusi. Pokok-pokok pernyataan itu antara lain tentang politik pokok pangkalnya ialah soal staat (negara).⁸ Menurut golongan kiri, negara inilah yang memiliki tugas untuk menyelesaikan revolusi tetapi pemerintah sebagai penentang imperialisme, bukan merupakan suatu kekuasaan yang revolusioner dan agresif.

Orang-orang komunis mulai melakukan aksi melawan Sjahrir. Mereka menganggap bahwa pemerintah kurang agresif dan semakin lemah, sedangkan orang-orang komunis menghendaki sikap yang lebih revolusioner dan agresif. Kabinet Sjahrir yang mendapatkan serangan dari kubu sayap kiri (komunis) yang semula mendukungnya, terpaksa harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 27 Juni 1947. Tanggal 27 Juni 1947 Kabinet Sjahrir domisioner dan kekuasaannya diambil alih oleh Presiden. Kabinet Sjahrir jatuh akibat tikaman dari Amir Sjarifuddin beserta kelompoknya. Jatuhnya kabinet Sjahrir itu menyebabkan hubungan antara Amir Sjarifuddin dengan Sjahrir pecah. Sjahrir dan kawan-kawannya keluar dan membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai akibat perbedaan pendapat dengan partai sosialis. Amir Sjarifuddin tetap menggunakan nama Partai Sosialis.

Setelah Kabinet Sjahrir jatuh Presiden Soekarno memberi tugas satu Tim Formatur yang terdiri dari Amir Sjarifuddin (Partai Sosialis), A.K.Gani (PNI), Sukiman (Masyumi) dan Setiajit (PBI: Partai Buruh

⁸ Mabes ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indoesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Penghianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948)*, Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, hlm. 82.

Indonesia) untuk membentuk kabinet. Adanya tuntutan Masyumi untuk menduduki kursi Perdana Menteri, Kementerian Dalam Negeri dan dua kursi Kementerian lainnya ditolak oleh para anggota Tim Formatur mengakibatkan pembentukan kabinet mengalami kegagalan. Selanjutnya mandat diserahkan kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menunjuk lagi Amir Sjarifuddin, A.K. Gani dan Setiadjid sebagai satu tim formatur baru. Terbentuklah Kabinet Amir Sjarifuddin yang pertama pada waktu itu. Dalam Kabinet Amir Sjarifuddin, Masyumi tidak diikutsertakan tetapi PSII diikutsertakan.

Pada tanggal 21 Juli 1947, pihak Belanda melakukan aksi militer yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda 1. Dalam peristiwa itu, Belanda menangkap Wakil Perdana Menteri A.K. Gani dan Walikota Suwirjo yang berada di Jakarta. Dewan Keamanan PBB mengirimkan keputusan kepada Amir Sjarifuddin agar melakukan genjatan senjata, dan kepada pihak Belanda Dewan Keamanan PBB meminta agar mundur dari batas-batas sebelum dilakukannya aksi militer tersebut.⁹

Kabinet Amir Sjarifuddin, koalisi antara Sayap kiri dan PNI di dominasi oleh komunis. Pada Februari 1948 Amir Syarifudin dan Setiadjit dalam suatu rapat raksasa di Surakarta mengubah sayap kiri menjadi Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR ini beranggotakan PKI, Partai sosialis, Partai Buruh dan PESINDO, SOBSI dan BTI muncul dari kongres partai ke IV sebagai Sekjen Partai dan Njoto sebagai kepala Departemen

⁹ Maksum, *Lubang-lubang Pembantaian: petualangan PKI di Madiun*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990, hlm.3.

Propaganda. Perdana Menteri Amir Sjarifuddin mengajak lagi Masyumi untuk duduk dalam kabinet guna memperkuat dukungan dalam perundingan dengan Belanda. Selanjutnya Masyumi menerima ajakan dari Amir Sjarifuddin maka terjadi *reshuffle*¹⁰ kabinet Amir Sjarifuddin.

Tujuan pemerintahan Kabinet Amir Sjarifuddin adalah untuk memperkuat kabinetnya dalam rangka menghadapi perundingan dengan Belanda. Kabinet Amir Sjarifuddin pada akhirnya menerima persetujuan Renville sehingga banyak partai politik yang menentangnya. Perundingan Renville menyebabkan krisis dalam kabinet. Banyak pemimpin Indonesia yang secara tegas menentang persetujuan Renville. Mereka kecewa karena Renville telah memberikan hak kepada Belanda untuk mengontrol penuh wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Masyumi mendesak kabinet Amir Sjarifuddin turun, PNI juga melancarkan oposisi terhadap Amir Sjarifuddin. Dengan demikian dari golongan komunis (kiri) saja yang mendukung kabinet Amir Sjarifudin.

Tanggal 23 Januari 1948 Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh. Presiden Soekarno menerima pengunduran diri Amir Sjarifuddin dan menggantikannya dengan Kabinet Hatta. Hatta merangkul Masyumi, PNI, dan sayap kiri untuk membentuk Kabinet Koalisi dengan wakil-wakil berimbang. Sayap kiri bersedia tetapi menuntut 10 kursi dalam kabinet dengan posisi yang dikehendaki, namun hal ini ditolak oleh Hatta. Hatta

¹⁰ Secara mendasar jika diterjemahkan *Reshuffle* artinya mengubah atau merombak. Artinya aka nada suatu perubahan yang akan dilakukan. (Editor's Note, Apa itu Reshuffle?, <http://vibizportal.com/note/index/46/40>, 2012, diakses pada tanggal 29 Februari jam 05. 00 WIB.

hanya menawarkan 4 kursi bagi sayap kiri dalam kabinet dan sayap kiri tidak menyetujuinya. Akhirnya pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Hatta diumumkan dan tidak menyertakan sayap kiri. Kabinet Hatta dilantik pada tanggal 3 Februari 1948.

Pada masa Kabinet Hatta terjadi perubahan dari Sayap Kiri menjadi Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang mempunyai jabatan sebagai oposisi. Pada masa pemerintahan kabinet Hatta mendapat tantangan dari Amir Sjarifuddin dan kawan-kawannya. Amir Sjarifuddin bergerak ke luar dan mempengaruhi partai kiri supaya memusuhi Kabinet Hatta. Kelompok mereka adalah FDR yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin dan Muso (yang baru pulang dari Rusia). FDR menyatakan bahwa Kabinet Hatta sebagai kabinet Masyumi atau kabinet Borjuis. Kampanye ini mulai dilakukan melalui rapat-rapat umum dan suara pers FDR. Aksi Pemogokan terjadi di perkebunan Delangu yang didalangi oleh FDR. Hal ini mengakibatkan masalah sampai ke politik dan perburuan. Timbullah pertentangan antara Masyumi dengan FDR. Pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI/FDR di Madiun yang dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifudin. Dalam pemberontakan PKI Madiun tersebut Muso dikatakan tertembak mati, sedangkan Amir Sjarifuddin juga dihukum mati.

Sebagai negara yang baru saja merdeka, hampir semua kekuatan yang ada masih sangat diperhitungkan dalam revolusi menghadapi kekuatan asing. Pada tanggal 4 Februari 1950 pemerintah menegaskan kembali bahwa PKI tidak dilarang dengan catatan apabila mau mematuhi

hukum dan tata tertib negara, hal ini membuat nasib PKI yang semakin jelas dan transparan. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi kelangsungan hidup PKI di Indonesia. Dalam situasi yang diuntungkan tersebut PKI mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan pengaruh dari rakyat.

Presiden Soekarno mengundang partai-partai untuk membicarakan masalah pembentukan kabinet. Pertemuan itu berlangsung selama dua hari dengan peserta yang berbeda. Pada hari pertama, Sabtu 19 Agustus 1950, Presiden mengundang Masyumi, PNI, Parindra, PSI, PNI-Merdeka, Blok Nasional, Parkindo, dan Partai Katolik Indonesia. Hari kedua, Senin 21 Agustus 1950, partai-partai yang diundang presiden adalah PKI, PBI (Partai Buruh Indonesia), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), Partai Murba, dan Partai Sosialis.¹¹ Dalam pertemuan itu membahas tentang keikutsertaan partai-partai dalam kabinet, calon-calon perdana menteri yang diajukan partai-partai dan juga syarat-syarat serta program yang akan dilaksanakan.

Dalam pertemuan itu, PKI mengutus Ngadiman Hardjosubroto, Hutomo Supardan, Djateun Dirdjowijoto, dan Achmad Sumadi. Mereka mengemukakan pandangan tentang kabinet. Masalah yang menjadi titik sentralnya bahwa kabinet harus bertanggung jawab penuh kepada Parlemen, masalah program merupakan yang penting dicanangkan dibandingkan masalah siapa orangnya. Usulan mereka selanjutnya yaitu

¹¹ Subhan SD, *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Buana, 1996, hlm. 13.

perlunya jaminan pelaksanaan hak-hak demokrasi, hak yang layak bagi buruh menyangkut pekerjaan dan upahnya, masalah nasionalisasi perusahaan asing, serta diterapkannya undang-undang agraria nasional. Terbukanya PKI ke pentas politik nasional, eksistensi PKI semakin jelas dan transparan.

Sebagai suatu negara baru, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah yang muncul dalam upaya melakukan dan menata pembangunan politik. Proklamasi kemerdekaan yang merupakan pengakuan Negara RI baik secara *de facto* maupun *de jure*, pada kenyataannya belum kondusif untuk menciptakan suasana yang damai dan stabil. Keadaan demikian tampak dari upaya RI dalam upaya mempertahankan RI dari ancaman yang datang dari luar terutama pada Agresi Militer Belanda ke-2. RI tentunya berusaha menetralisasi ancaman dari dalam, khususnya konflik antar kelompok di dalam negeri. Masa lima tahun pertama pasca proklamasi, antara 1945-1950, umumnya menggambarkan situasi politik seperti itu.

Hal menarik yang penulis ikuti adalah PKI dalam kancah perpolitikan nasional. Pada masa awal kemerdekaan dari tahun 1945-1950 orang-orang komunis memasuki pemerintahan. Suasana politik yang tidak stabil, dimana terjadi pertentangan antara golongan moderat dengan golongan revolusioner tentang cara membela dan mempertahankan kemerdekaan ternyata dimanfaatkan oleh PKI untuk menguasai kondisi sosial politik. Pada kesempatan tersebut orang-orang komunis menyusun

rencana pengambilan kekuasaan daerah yang pada intinya sangat merugikan Republik Indonesia. Di awal tahun 1950, PKI berusaha menempuh jalan panjang untuk membangun kembali dirinya sebagai suatu partai politik dan membuang keburukan maupun kejelekan yang masih disangkutpautkan dengan nama partai akibat pemberontakan FDR/PKI Madiun 1948.

B. PKI Masa Tahun 1950-1955

Pada bagian ini akan dijelaskan PKI dalam kurun waktu 1950-1955. Batasan waktu dalam penelitian skripsi ini hanya sampai tahun 1955, walaupun sebenarnya masih ada gerakan-gerakan PKI pasca 1955. Tahun 1966 Pemerintah melarang organisasi PKI. Retorika politik PKI selama tahun 1950-an seakan-akan bertemu dengan PKI yang banyak. Karena disetiap daerah, waktu, atau situasi, PKI akan memperkenalkan rumusan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi rakyat Indonesia. Satu-satunya landasan ideologis yang ditampilkan adalah penguasaan kata “rakyat”. Rakyat adalah PKI, PKI adalah rakyat.¹² Penguasaan kata rakyat merupakan strategi PKI untuk menarik rakyat.

Alam Demokrasi Liberal yang berlangsung di Indonesia tahun 1950-an memberikan kesempatan kepada PKI untuk mengadakan rehabilitasi walaupun sebelumnya partai komunis itu telah melakukan pemberontakan. Periode 1950-1955 merupakan suatu babak ketika ingatan

¹²*Ibid*, hlm.xiii

tentang revolusi masih segar tetapi kepercayaan akan kehidupan demokrasi yang sehat juga sedang tumbuh dalam rakyat Indonesia. Tahun 1950 sampai tahun 1955 ada empat kabinet yang memerintah, sehingga rata-rata setiap tahun terdapat pergantian kabinet. Kabinet-kabinet tersebut ialah Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953) dan Kabinet Ali I (Juli 1953-Agustus 1955).¹³

Percaturan politik Indonesia tahun 1950-an ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet yang berumur rata-rata kurang dari satu tahun. Jatuh bangunnya kabinet itu pada dasarnya mencerminkan proses politik yang dimainkan oleh partai-partai itu sendiri. Hal ini terjadi karena sulitnya membentuk kabinet koalisi yang mampu bertahan lama, selain itu jumlah partai dan fraksi di parlemen yang banyak dan masing-masing tidak mempunyai dominasi. Kehidupan politik setelah tahun 1950 juga ditandai dengan munculnya sistem pemerintahan koalisi partai-partai politik. Partai politik yang diharapkan sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat, mulai menguasai pemerintahan. Partai politik ini nantinya akan membawa peran dalam perpolitikan Indonesia.

Masa dimana tidak ada dominasi partai politik dikenal sebagai zaman Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal. Selama Demokrasi Parlementer itu, fenomena khas dalam politik Indonesia adalah

¹³ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975, hlm. 81.

jatuh banggunnya partai politik menguasai kabinet. Mereka saling berebut menduduki kursi pemerintahan. Pada umumnya partai politik tersebut membentuk koalisi dari beberapa partai. Sehubungan dengan realita tersebut pada era Demokrasi Parlementer, tampak adanya dua partai besar yang saling bersaing menguasai elit pemerintahan yaitu PNI dan Masyumi.¹⁴

Situasi dan kondisi pada masa Demokrasi Liberal yang terjadi, seperti tekanan dari pemerintahan saat itu yang didominasi oleh koalisi PNI dan Masyumi yang anti komunis yang mengalami pertentangan baik secara ideologis maupun kultural. Hal ini membuat PKI melakukan perubahan strategi politik. Perubahan strategi PKI mulai dilakukan pada tahun 1951 ketika partai itu dipimpin oleh DN. Aidit. Paham dengan "dosa sejarah" yang telah dilakukannya, PKI di bawah pimpinan Aidit melakukan serangkaian upaya perubahan.

PKI dibawah kepemimpinan Aidit mulai melakukan komunikasi politik dengan golongan lain. Setelah D.N.Aidit memperoleh kesempatan merehabilitasi PKI dalam alam Demokrasi liberal, dia dan kawan-kawannya mengambil kesimpulan bahwa untuk memperoleh kesempatan duduk dalam pemerintahan, seperti pada masa sebelum pemberontakan PKI-Madiun, PKI perlu mengadakan aliansi dengan kekuatan-kekuatan

¹⁴ Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) merupakan kelanjutan dari MIAI. Didirikan pada 7 November 1943. Merupakan partai dari golongan Islam, pada masa Jepang hanya NU dan Muhammadiyah saja yang diakui. Farid Wajidi, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm. 49.

politik yang penting. Pada awal tahun lima puluhan di Indonesia terdapat Partai besar, yaitu PNI dan Masyumi. Menurut jalan pemikiran dari PKI, yang potensial dan harus didekati adalah PNI.

Partai besar seperti PNI dan Masyumi seringkali menguasai kabinet koalisi. Persaingan keduanya terlihat saling membagi dalam memimpin kabinet. Sudah sewajarnya jika dalam dunia perpolitikan terjadi perbedaan, dan perbedaan itu justru menimbulkan kecurigaan di pihak masing-masing. Faktor itulah yang pada gilirannya membuat PNI berusaha mendekati kekuatan lain. Pada tahun 1952 PNI semakin didekati PKI.¹⁵ Kedekatan PNI dengan PKI disebabkan adanya persamaan visi, dalam hal ini menyangkut masalah modal asing, kolonialisme, dan masalah Irian Barat.

Berbeda dengan sikap PNI, Masyumi menunjukkan hubungan yang buruk dengan PKI karena memiliki lembaran sejarah yang kelam. Dalam peristiwa Madiun 1948 Masyumi mendapat tekanan yang hebat dari PKI, sehingga ketika PKI aktif kembali pada tahun 1950-an, Masyumi menunjukkan antipati terhadap PKI. Ternyata sikap Masyumi itu tidak hanya menekan PKI, tetapi secara bersamaan bertentangan dengan partai-partai nasionalis, PNI, dan Partai Murba. Masyumi berupaya memperkuat posisinya untuk menghadapi lawan-lawan politiknya terutama PKI, tetapi kenyataannya Masyumi dihadapkan pada masalah mencuatnya konflik internal sehingga memunculkan dua kelompok yang dikenal dengan

¹⁵ Subhan SD, *op.cit.*, hlm. 18.

kelompok reformis dan kelompok tradisional. Konflik itu berdampak pada perpecahan Masyumi.

Betapapun banyak kekuatan politik di Indonesia yang menyangsikan ketulusan PKI sebagai peserta dalam proses demokratisasi, namun keyakinan bahwa demokrasi adalah salah satu tujuan dari revolusi nasional, menyebabkan sikap toleran kepada PKI tidak mudah di hapus. Disamping itu, banyak pula para pemimpin yang menduga bahwa *bloody image* PKI tidak akan memungkinkannya untuk mempengaruhi masyarakat politik.¹⁶ Selanjutnya PKI memperbaiki partainya dengan membuang tokoh-tokoh lama dan menampilkan tokoh baru.

Pada masa kabinet Natsir keberadaan PKI semakin terancam karena pemerintahan Natsir mengeluarkan kebijakan anti komunis. Kebijakan anti komunis pada masa pemerintahan Natsir ditandai dengan adanya larangan rapat-rapat umum dan pengibaran Bendera Merah Putih setengah tiang untuk menghormati kembali pemakaman Amir Sjarifuddin dan teman-temannya dari FDR/PKI yang dihukum mati karena keterlibatan mereka dalam pemberontakan Madiun. Kabinet natsir ini beralasan bahwa Amir Sjarifuddin dan teman-temannya di FDR dan PKI adalah orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan Madiun 1948. Kabinet Natsir tidak berumur lama, hanya bertahan sampai 21 Maret 1951 dan digantikan dengan kabinet Sukiman Wirjosandjojo.

¹⁶ *Ibid*, hlm.xii.

Pada masa Kabinet Sukiman dalam bulan Agustus 1951, orang-orang komunis banyak yang ditangkap. Pemerintah Sukiman melakukan razia dalam bentuk penangkapan anggota-anggota parlemen dan tokoh PKI serta kelompok kiri lainnya di Jakarta dan daerah lainnya. Selama penangkapan berlangsung, Kabinet Sukiman menyatakan bahwa pemerintah telah menginstruksikan kepada alat negara, polisi dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penangkapan terhadap mereka yang dianggap terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok, Bogor dan peristiwa lainnya.¹⁷ Ketua Fraksi PKI Sakirman memprotes keras tindakan razia oleh pemerintah tersebut. Ia menganggap penangkapan itu sebagai pelanggaran HAM dan demokrasi. Hal ini membuat PKI dilumpuhkan untuk sementara waktu, namun PKI meminta pertanggungjawaban pemerintah. Melalui *Harian Rakjat*, PKI menuduh pemerintah bahwa penangkapan itu merupakan tindakan spekulasi karena mereka yang ditangkap sebagian besar adalah anggota dan calon anggota PKI.

Ketika kabinet Sukiman jatuh pada tanggal 23 februari 1952, sebagai akibat persetujuan *Mutual Security Act* (MSA) dengan Amerika Serikat berupa bantuan peralatan senjata dan bantuan ekonomi yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Soebardjo (Masyumi), CC PKI mengeluarkan pernyataan politik yang pada hakikatnya menawarkan kepada PNI untuk membentuk kabinet tanpa Masyumi. Kabinet baru yang dibentuk dibawah pimpinan Mr. Wilopo dari

¹⁷ Mabes ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid III Konsolidasi dan Infiltrasi PKI (1950-1959)*, Jakarta, 1995, hlm. 17.

PNI (April 1952-Juni 1953) ternyata terdapat pula menteri-menteri dari Masyumi, tetapi PKI tetap menyatakan dukungannya walaupun kecewa karena Masyumi diikutsertakan. Pernyataan dukungan PKI itu berisi pemberitahuan kepada partai-partai pendukung kabinet bahwa PKI bersedia mendukung mereka dengan satu imbalan yang ringan, yaitu agar partai-partai politik menghapuskan kecurigaan dan sikap anti terhadap PKI beserta organisasi-organisasi massanya (ormas-ormasnya). Jika dilihat bahwa PKI mengambil sikap mendukung kabinet Wilopo dengan catatan sepanjang kabinet progresif dan nasional.

Sesuai dengan garis kanannya, maka PKI pada tanggal 22 April 1952 segera mengeluarkan pernyataan bahwa PKI mendukung kabinet Wilopo. Dukungan tersebut segera diikuti tindakan nyata yaitu pada tanggal 30 April 1952, pemimpin PKI melarang SOBSI melakukan aksi-aksi pemogokan-pemogokan yang dilakukan buruh (SOBSI) akhirnya berakhir. Langkah selanjutnya yang dilakukan PKI yaitu melakukan pendekatan dengan PNI dengan cara mengajak PNI untuk ikut serta dalam suatu panitia Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1952. PNI menerima ajakan dari PKI dan akhirnya mereka membentuk sebuah komite bersama. Komite ini kemudian menyatakan bahwa mereka mengharapkan agar kehidupan demokrasi di terapkan pada setiap kehidupan dan mengajak semua rakyat untuk bersatu dalam kerjasama untuk merebut Irian Barat.

Upaya PKI tersebut berhasil dan sejumlah pimpinan PNI mulai bekerja sama dengan PKI. Kerja sama itu berpuncak pada usaha menjatuhkan kabinet Mr. Wilopo oleh PNI sendiri, meskipun kabinet itu dipimpin oleh seorang tokoh PNI. Sebagai penyebabnya ialah peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara, yakni insiden antara polisi dan penyerobot tanah perkebunan milik negara yang didukung oleh PKI. Hal tersebut membuat Kabinet Mr. Wilopo jatuh. Setelah kabinet Mr. Wilopo jatuh, PKI mengeluarkan pernyataan yang menuntut pembentukan kabinet baru sesuai dengan Front Persatuan yang di dalamnya termasuk PKI, tetapi tanpa Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Krisis kabinet berlangsung agak lama dan beberapa formatur telah menemui kegagalan. Dalam pernyataan berikutnya, PKI meniadakan tuntutan untuk duduk di dalam kabinet baru.

Setelah satu bulan, terbentuknya kabinet baru dibawah pimpinan Mr. Ali Sastroamidjojo (Juli 1953-Juli 1955) dengan menteri-menteri dari berbagai partai kecil, tetapi tanpa Masyumi dan PSI. Kabinet ini disebut kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo 1. Pada masa kabinet ini, komunis berkembang cukup pesat tampak pada jumlah anggota yang semakin meningkat antara bulan Maret dan November 1954 dinyatakan bahwa jumlah anggota partai ini meningkat tiga kali lipat dari 165.206 menjadi 500.000 dan pada akhir tahun 1955 mencapai jumlah satu juta.¹⁸ Hal ini karena kabinet Ali Sastroamidjojo melindungi PKI dan dibukanya

¹⁸ M.C. Riclefs. *op.cit.*, hlm. 374.

kedutaan oleh Moskow dan Peking di Jakarta yang memberikan nasihat dan dukungan kepada PKI.

Pernyataan PKI dalam mendukung kabinet itu disebutkan bahwa kabinet itu sebagai suatu kemenangan gemilang daripada demokrasi terhadap fasisme. Selama masa pemerintahan kabinet Mr.Ali Sastroamidjojo 1, PKI memberikan dukungannya secara gigih pada PNI. Kabinet Mr.Ali Sastroamidjojo 1 tidak berhasil mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia, tetapi PKI tetap membela kabinet Mr.Ali Sastroamidjojo I. Setiap kali kabinet terancam perpecahan dari dalam, PKI mengadakan pembelaan yang keras untuk kabinet dan menyerang kelompok-kelompok yang akan menjatuhkannya.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh karena terjadi pertentangan dengan Angkatan Darat, setelah menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri menunjuk Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD tanpa berkonsultasi dengan petinggi Angkatan Darat lainnya. Pada saat pelantikan Bambang Utojo, para perwira memboikot tidak hadir, sebagai bentuk penolakan pengangkatan tersebut. Akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamidjojo I mengembalikan mandat kabinet kepada Wakil Presiden Moh.Hatta. Kabinet selanjutnya digantikan oleh Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956). Kabinet ini mendapat tentangan dari kaum oposisi. Melalui media Harian Seluruh Indonesia (PNI) dan Harian Rakyat, PKI pada awalnya menyerukan ketidaksenangannya terhadap kabinet Burhanuddin Harahap karena berasal dari Masyumi. PKI

menyadari bahwa pemilu 1955 sudah ada di depan pintu selanjutnya bersifat lunak terhadap Kabinet Burhanuddin sesuai dengan strategi kanannya. Pada tanggal 19 Agustus 1955 PKI mengeluarkan pernyataan dukungan kepada Kabinet Burhanuddin.¹⁹ PKI mempunyai organisasi yang baik dan dana yang kuat siap melaksanakan pemilu dan termasuk jago di lapangan. Slogan-slogan PKI dapat membangkitkan sentimen rakyat. Pemilu 1955 akhirnya dapat terlaksana pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.

¹⁹ Soegiarso Soerojo, *op.cit.*, hlm. 67.

BAB IV

PKI DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM 1955

A. Strategi PKI dalam Pemilihan Umum 1955

1. Konsolidasi Organisasi

Peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 merupakan sebuah peristiwa yang membawa citra buruk bagi PKI. Peristiwa tersebut juga membuat hancurnya kekuatan PKI karena kegagalannya melakukan kudeta terhadap Pemerintah RI. Pasca pemberontakan Madiun, Alimin sebagai pimpinan PKI menghendaki PKI sebagai partai kader. Partai Kader artinya partai yang kuat secara kualitas atau kelompok kecil yang militan. Para kader¹ PKI disebar ke dalam kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok buruh, petani, wanita, pemuda desa dan lainnya. Strategi Alimin itu mendapat tentangan dari golongan muda. Aidit yang termasuk golongan muda menganggap bahwa partai kader tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Pada sidang Pleno Central Commite Partai (CC) tanggal 7 Januari 1951, Aidit dan kawan-kawannya berhasil memegang puncak pimpinan dan sekaligus menguasai politbiro.² Di dalam Politbiro tersusun D.N. Aidit

¹ Kader adalah orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan atau partai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke empat diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

² MABES ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid III: Konsolidasi dan Infiltrasi PKI 1950-1959*, Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, hlm. 9.

sebagai ketua, Lukman sebagai Ketua II dan Njoto sebagai Ketua III. Di dalam Central Commitee, D.N. Aidit sebagai Sekretaris Jenderal, Lukman, Njoto dan Sudisman sebagai anggotanya. Konflik internal dalam tubuh partai berhasil diselesaikan dan kelompok tua disingkirkan.

Ditangan Aidit, Njoto, Lukman, Sarkiman, dan Sudisman inilah PKI berhasil melakukan konsolidasi partai.³ D.N. Aidit mengajukan suatu program baru yang dinamakan dengan “*Jalan Baru*”.⁴ Mengetahui kondisi sulit pasca pemberontakan Madiun 1948, PKI dibawah pimpinan Aidit melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan partai salah satunya yaitu membuka kembali cabang-cabang PKI di Jawa dan Sumatra. PKI juga mulai melaksanakan Front Persatuan Nasional dan pembangunan partai kembali. Di awal tahun kepemimpinan D.N.Aidit berambisi memperkuat partai di Pulau Jawa dan juga membuka cabang-cabang terutama di Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Melalui Harian Rakyat (HR), PKI berupaya membendung opini negatif dan menggalang simpati rakyat dari berbagai golongan. Melalui HR inilah program-program PKI disalurkan kepada simpatisan. Pendek kata, HR bukan saja pelaksana dari kerja penerangan, propaganda, dan pengorganisasian bidang politik, tapi dengan sadar koran ini

³ Ahmad Syafii Ma'arif, *wawancara*, 13 Februari 2012.

⁴ Tujuan program jalan baru itu untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa PKI berjuang melalui garis perlembagaan Negara, menggunakan jalan damai dan demokratis. Aidit bersama teman-temannya menerapkan politik yang melibatkan massa rakyat dan membangun partai dalam kelompok-kelompok kecil. Hal tersebut sebelumnya memang ditinggalkan dari politik Alimin dalam tubuh PKI.

memposisikan diri sebagai generator di bidang kebudayaan.⁵ Koran ini menggunakan gaya bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat kelas menengah ke bawah yang notabennya PKI memang bergerak ke rakyat bawah.

Pada setiap organisasi, pembagian tugas diperjelas dengan alat-alat kelengkapan partai yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan. Organisasi partai khususnya di tingkat pusat dapat membentuk sekretariat atau Departemen agit-prop (agitasi-propaganda), Departemen Tani, Departemen Pemuda, Departemen Ilmu dan Kebudayaan, Departemen Ekonomi, dan sebagainya.⁶ Komposisi keanggotaan PKI memiliki karakteristik yang disebut *direct structure* dan *indirect structure*.⁷ Proses pengenalan dan pendidikan kader komunis dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui rapat-rapat, kursus-kursus politik. Bertambahnya jumlah anggota PKI pada awal konsolidasi ini semakin membuat PKI bangkit kembali dari keterpurukannya akibat peristiwa Madiun 1948.

⁵ Rhoma Dwi Aria Yuliantri, Bibit Semai Koran Kiri Komunis di Indonesia, *BASIS*, Yogyakarta: Yayasan BP Basis, 2009, hlm. 15.

⁶ Subhan SD, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955*, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1996, hlm. 47.

⁷ *Direct structure* yaitu komposisi anggota PKI dapat dilihat sebagai individu yang sadar masuk dan mengikatkan diri ke dalam partai tersebut. Sedangkan jika dilihat dari *indirect structure*, PKI memperoleh anggota secara otomatis dari organisasi massa yang berafiliasi di bawah PKI seperti anggota BTI, SOBSI, Baperki, Gerwani, dan lainnya. *Ibid*, hlm. 48.

Banyak para pemuda desa miskin menjadi Kader PKI yang tugasnya melakukan peninjauan ke desa-desa.⁸

Sejalan dengan program baru PKI, Aidit melakukan kerjasama dengan golongan non-komunis dan mencoba bersikap simpati terhadap golongan agama. Sesuai dengan garis strategi itu, dalam menghadapi pemilihan umum 1955, PKI mengadakan aliansi dengan PNI. PKI memanfaatkan persaingan yang terjadi antara PNI dengan Masyumi. PKI juga berusaha memanfaatkan partai atau fraksi yang bersedia maupun menolak bekerjasama dengan PKI. PKI menarik garis siapa lawan dan siapa yang dapat dijadikan kawan untuk sementara waktu. Wakil-wakil PKI di Parlemen sudah cukup aktif sejak PKI mulai memanfaatkan perselisihan antara Masyumi dengan PNI untuk mengadakan kerjasama dengan PNI di tingkat Parlemen. Dukungan yang diperoleh PNI dan PKI sangat membantu meningkatkan hubungan antara sejumlah tokoh PNI dan PKI. Inilah startegi yang dipakai PKI dalam berbagai kesempatan.

Langkah PKI selanjutnya yaitu berusaha mencegah masyumi agar tidak dapat bekerjasama dengan PNI. PNI dibawah pimpinan Sidik Djojokusarto lebih cenderung memilih bekerjasama dengan PKI daripada dengan Masyumi. PNI menganggap bahwa bekerjasama dengan PKI lebih menguntungkan dalam menghadapi masa-masa kampanye pemilihan umum. Sesuai dengan strategi kanannya, pada tanggal 22 April 1952 PKI

⁸ Yatno, *wawancara*, 4 Februari 2012.

mengeluarkan pernyataan bahwa PKI mendukung Kabinet Wilopo. Dukungan tersebut diikuti tindakan yang nyata yaitu pimpinan PKI melarang SOBSI melakukan aksi-aksi pemogokan pada tanggal 30 April 1952. Pemogokan-pemogokan yang dilakukan buruh (SOBSI) itu akhirnya berakhir.

Upaya lain yang dilakukan PKI dalam melaksanakan program Front Persatuan yaitu dengan menjadi Panitia hari-hari besar nasional. Upaya PKI sukses, wakil dari PKI Sumardi terpilih menjadi Ketua Panitia Perayaan 17 Agustus 1952. Pemilihannya berlangsung di kota Jakarta pada tanggal 3 Juli 1952. Wakil ketua terpilih wakil SOBSI, PNI, dan wakil Persatuan Marhaen Indonesia (PERMAI) sebagai sekretaris. Masyumi dan PSI tidak ikut dalam panitia tersebut. Terpilihnya wakil PKI sebagai pimpinan panitia mendapat reaksi dari Masyumi yang menilai kepanitiaan tersebut bersifat komunis.

Bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan secara terbuka antara PKI dan PNI adalah memanfaatkan kewibawaan Presiden Soekarno. Berbagai slogan atau pernyataan Soekarno diambil alih seolah-olah itu slogan atau pernyataan PKI, sehingga banyak rakyat yang mengidentifikasi PKI dengan Soekarno lebih daripada mengidentifikasikan PNI. Adanya sedikit keraguan bahwa para pemimpin PKI sanggup melaksanakan tugas *public relation* mereka yaitu mendekati Presiden, tidak lagi diragukan lagi bahwa PKI dengan cepat dan mudah memanfaatkan pintu-pintu menuju istana Presiden yang terbuka dengan

sedikit usaha dari para menteri PNI. PKI mulai memainkan peran baru dari pendukung pemerintahan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Presiden melalui sebuah pendekatan yang bersahabat.

Aidit sebagai tokoh komunis pada waktu itu menyerukan untuk melakukan penggalangan berbagai kekuatan. Hal ini didukung dengan sifat revolusi dimana revolusi Indonesia ialah demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat yaitu revolusi dari masyarakat luas yang dipimpin oleh proletariat dan ditunjukkan untuk melawan imperialisme, feodalisme dan kaum *borjuis komprador*⁹. Revolusi Indonesia memiliki banyak sekutu di dalam dan luar negeri oleh karena itu menurut PKI berkewajiban ke dalam mengorganisasi dan mempersatukan kaum buruh, kaum tani, kaum intelektual, pengusaha kecil, pengusaha nasional, semua yang anti imperialisme dan anti-feodalisme, dan semua golongan minoritas. Ke luar, artinya bersatu dengan proletariat internasional, dengan semua rakyat yang tertindas, bangsa-bangsa yang terjajah dan *nasion-nasion* yang memandang kita sederajat, yang mencintai kemerdekaan nasional, demokrasi rakyat dan perdamaian dunia.¹⁰ Dalam wadah Front Persatuan Nasional itu sebenarnya seringkali dimanfaatkan oleh golongan komunis untuk mendapat dukungan rakyat. Keterlibatan PKI dalam front Persatuan

⁹ Borjuis Komprador adalah borjuis besar (agen-agen) yang secara langsung melayani kepentingan kapitalis asing yang digemukkan oleh mereka. Di dalam revolusi Indonesia Menurut PKI borjuis komprador bukan kekuatan pendorong tetapi penghalang.

¹⁰ Subhan SD, *op.cit.*, hlm.43.

Nasional tidak lain demi kelangsungan partai khususnya, dan golongan komunis di Indonesia umumnya.

PKI melihat bahwa orang yang senasib akan merasa dekat satu dengan lainnya, seperti juga antara buruh tani, petani miskin, pekerja-pekerja lepas dan petani sedang terdapat persamaan nasib. Hal ini memberikan dasar bagi persatuan mereka, bersatu dalam rangka membentuk suatu kekuatan yang dapat dipergunakan untuk melindungi hak-hak mereka. Persekutuan antara buruh tani, petani miskin, pekerja-pekerja lepas dan petani sedang memenuhi syarat ajaran kepentingan dari Komunisme yaitu orang-orang atau golongan-golongan yang memiliki kepentingan sama dalam hal ini hubungan kerja di bidang pertanian, akan bersatu membentuk suatu front.

2. Pendekatan PKI kepada Golongan Petani

Pemilu 1955 merupakan hal penting yang akan dihadapi oleh PKI. PKI melakukan berbagai strategi dalam meraih kemenangan. Sejalan dengan strategi PKI menjelang Pemilihan Umum 1955, Aidit menyatakan bahwa kewajiban yang harus dilakukan kaum komunis yang pertama-tama ialah menarik petani ke dalam Front Persatuan Nasional. PKI mulai melakukan propaganda-propaganda dengan tema melenyapkan sisa-sisa feodalisme, kapitalisme dan anti tuan tanah. PKI memberikan janji-janji kepada petani yang tidak memiliki tanah dan petani miskin akan diberi tanah sebagai milik perseorangan jika PKI menang dalam Pemilihan

Umum. Janji-janji muluk PKI kepada petani ini, untuk membujuk mereka agar memilih PKI. PKI menjadikan desa-desa sebagai basis partai. Desa-desa dijadikan basis dalam menyusun kekuatan yang telah runtuh maupun tempat pengawetan kekuatannya. Paham komunis tumbuh di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang ditimbulkan oleh golongan kapitalis.

Kedekatan petani dengan PKI dimungkinkan karena adanya perubahan sosial-ekonomi yang dipicu pendidikan dan politik yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Masuknya nilai baru, terutama di pedesaan, mendorong kebingungan masyarakat akan warisan budaya dan sejarah yang dari generasi ke generasi mereka pelihara secara ketat. Kebingungan sosial yang terjadi cenderung mendorong orang bersikap radikal, atau mencari wadah baru di luar lembaga masyarakat yang ada. Kondisi tersebut membuat masyarakat melihat PKI-lah yang mampu mewadahi kebutuhannya. Memang PKI-lah yang menjalankan gerakan dan bertindak secara radikal. PKI terkadang juga mempraktekkan sikap moderat. PKI juga bersedia berkompromi dengan gerakan yang warnanya lain. Sikap PKI ini cuma taktik belaka yang diterapkan sebelum mampu berdiri sendiri.

Harapan-harapan petani akan perbaikan nasibnya selama ini belum juga terwujud. Petani di desa-desa merasa tidak ada yang memperjuangkan nasibnya lagi, mereka melihat dirinya sebagai akibat keadaan dimana

mereka sendiri tidak dapat keluar dari dalamnya.¹¹ Pemimpin yang dianggap ratu adil bagi petani diharapkan membawa perubahan yang lebih baik kepada mereka, nyatanya gagal juga. Dalam keadaan inilah PKI datang kepada petani dengan strategi menyesuaikan diri kepada keadaan petani. PKI mengetahui benar apa yang menjadi kemauan petani dengan usaha mengorganisasi resolusi dan tuntutan tentang tanah yang sudah dan ingin digarap petani. Terjalinlah Kerjasama antara PKI dengan petani dimana kedua belah pihak saling membutuhkan. Petani memerlukan suatu nilai baru yang tegas dan ini dapat dipenuhi PKI melalui ideologi mereka. Petani juga membutuhkan pengganti pemimpin mereka yang telah jatuh dalam masa perubahan sosial. Dalam hal ini dapat ditemukan dalam diri PKI. Sebaliknya PKI memerlukan suatu massa untuk mendukung partai khususnya dalam upaya kemenangan pemilu 1955.

Propaganda pembagian tanah yang dilakukan PKI kepada petani miskin, terutama di daerah Jawa memang sangat menarik sehingga mereka bersedia menjadi anggota BTI atau organisasi massa PKI lainnya. Aidit berpendapat bahwa PKI harus menjadi partai yang besar dan banyak anggotanya agar dapat mempengaruhi partai yang lain. Konferensi partai bulan Mei 1952 memutuskan untuk memperluas keanggotaan partai menjadi 100.000 dalam waktu 6 bulan. Berbagai langkah diambil untuk memperluas keanggotaan PKI.

¹¹ Arbi Sanit, *Badai Revolusi sketsa kekuatan politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 119.

Dijamin oleh massa pengikut yang besar sejak memanfaatkan SOBSI, PKI kemudian mengalihkan perhatiannya kepada sejumlah kelompok tani dan organisasi-organisasi pemuda yang masih berhubungan dengan asosiasi-asosiasi mereka. Dalam kedua macam kelompok ini, PKI dengan efektif mampu memegang kendali komando pusat dari kelompok-kelompok terpenting seperti BTI dan Pemuda Rakyat atau pengganti Pesindo, salah satu kelompok pemuda sosialis.¹²

PKI juga mendirikan dan mengembangkan koperasi bagi petani. Bentuk koperasi desa yang didirikan adalah kopersi produksi, konsumsi, dan kredit. PKI menggerakkan usaha koperasi atas keputusan Koperasi Tani Nasional PKI dalam tahun 1951 yang berkesimpulan menghilangkan antipati petani kepada koperasi”.¹³ PKI telah memanfaatkan koperasi agar dapat memperkuat partainya, selain itu koperasi merupakan sistem ekonomi yang dekat dengan sosialisme. PKI mengalami kesulitan karena tingkat pendidikan petani umumnya rendah dan faktor-faktor tradisi yang ada, untuk itulah PKI mengirimkan kader-kadernya yang sistem kerjanya benar-benar baik. Keadaan petanilah yang membawa mereka memutuskan lebih memilih bekerjasama dengan PKI. Pada masa-masa kampanye, PKI melakukan agitasi-agitasi kepada golongan petani akan memperjuangkan hak milik tanah untuk mereka, meskipun tidak tahu kenyataannya janji-janji itu terlaksana atau tidak.¹⁴

¹² Jeanne S. Mintz, *Mohammed, Marx and Marhaen: The Roots of Indonesian Socialism*. A.b. Jeanne S. Mintz (Zulhilmiyasri) , *Muhammad, Marx, Marhaen Akar Sosialisme Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 199.

¹³ Arbi Sanit, *op.cit.*, hlm. 143.

¹⁴ Kartomo Hadi Asmoro, *wawancara*, 28 Januari 2012.

Landasan utama strategi PKI mendekati petani sebenarnya berdasarkan penafsiran Lenin terhadap Marxisme, tentang petani. Petani dianggap sejajar dengan kaum buruh. Petani juga dianggap sebagai golongan yang dieksploitasi melalui faktor-faktor produksi. PKI membedakan masyarakat pedesaan menjadi dua bagian yaitu kelas *revolusioner* dan kelas “*reaksioner*”.¹⁵ Kelas revolusioner yaitu kaum intelektual yang terdiri dari guru-guru desa, para pengrajin dan tukang, pedagang kecil, pekerja kantor, buruh perkebunan, buruh industri dan petani. Kelas reaksioner terdiri dari tuan tanah, lintah darat, tukang ijon, tengkulak, kapitalis birokrat dan para petani kaya. Pendekatan PKI kepada Petani dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dalam menghadapi pemilihan umum 1955. Dukungan PKI terhadap kemenangan PKI dalam pemilu 1955 sangat besar. Petani memberikan suara sebanyak 16, 4 % dari jumlah suara yang diperoleh PKI.

Keberhasilan PKI menjadi partai ke-4 besar dalam Pemilu 1955 tersebut juga karena keuletan PKI dalam usahanya mendekati tiga group kekuatan yang satu sama lain bersaing mempengaruhi massa tani. Pertama, adalah Lurah beserta pembantu-pembantunya, para pamong desa dan golongan tuan tanah. Kedua, adalah dukun dan guru-guru mistik, dalang, dan pendekar pencak silat yang terkemuka. Ketiga, pemuda-pemuda desa,

¹⁵ Arbi Sanit, Kegiatan PKI di Kalangan Petani Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 50-an, *Majalah Persepsi*, 1989, hlm. 148.

mantan pejuang atau gerilyawan, mahasiswa yang gagal, guru sekolah, orang-orang berpendidikan yang memberontak terhadap tradisi desa.¹⁶

3. Pendekatan PKI kepada Golongan Buruh

Strategi lain yang ditempuh PKI yaitu bergerak di kalangan buruh dalam menghadapi Pemilu 1955. Kaum buruh yang merasa dirinya selalu tertindas oleh kaum Imperialis tertarik dengan Partai Komunis Indonesia karena dianggap dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Selama ini kaum buruh tertarik dengan PKI karena bergerak kepada kerakyatan. Agitasi-agitasi dan propaganda dari PKI, mampu menarik kaum buruh dengan janji-janji melindungi kaum buruh.¹⁷ PKI menggerakkan organisasi buruh di berbagai bidang profesi dengan SOBSI sebagai wadah induknya.

SOBSI adalah organisasi buruh yang federatif di mana organisasi-organisasi buruh bergabung. Organisasi paling besar dibawah naungan PKI yaitu SOBSI yang anggotanya meliputi buruh-buruh di Indonesia.¹⁸ Organisasi ini sangat besar karena pada waktu itu memang jumlah buruh di Indonesia cukup besar. Organisasi ini berjuang dalam mempertahankan kepentingan kaum buruh sejak didirikannya pada tahun 1945, ternyata

¹⁶ Arbi Sanit, *PKI suatu Analisa Mengenai Sumber Kekuatan Politik di Djawa Tengah dan Djawa Timur Tahun 1951-1965*, Djakarta, 1969, hlm. 189.

¹⁷ Harno Sutiman, *wawancara*, 4 Februari 2012.

¹⁸ Kartomo Hadi Asmoro, *wawancara*, 28 Januari 2012.

dikuasai oleh orang-orang komunis. PKI mulai menancapkan pengaruhnya ke dalam tubuh SOBSI sejak bulan Maret 1952. PKI mengadakan disiplin partai terhadap pimpinan SOBSI yang non komunis di tingkat bawah. Pada November 1954 secara umum kepemimpinan SOBSI dari tingkat tertinggi sampai terendah didominasi oleh orang-orang PKI. Di dalam tubuh SOBSI, PKI dengan cepat mampu mengambil alih kembali kendali atas orang-orang yang sempat lepas dari PKI akibat peristiwa Madiun.

Pada Kongres Kedua SOBSI bulan Januari 1955, kepemimpinan SOBSI sepenuhnya diisi oleh orang-orang PKI. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi PKI untuk semakin menancapkan pengaruhnya kepada kaum buruh karena semua organisasi buruh merupakan elemen yang penting bagi PKI dalam usahanya menguasai massa perkotaan dan di pedesaan. Sejak tanggal 1 Maret 1952 CC PKI menyerukan agar SOBSI memainkan peranan dalam Front Persatuan nasional, dan karakter radikal SOBSI diperbaharui untuk mendukung politik Front Persatuan Nasional PKI.

Secara umum dapat dikatakan bahwa SOBSI telah memberikan keuntungan bagi PKI dalam tiga hal pokok, yaitu (1) memobilisasi massa bagi PKI, (2) melancarkan strategi front Persatuan Nasional dan (3) membantu PKI dalam agitasi dan propaganda. Sampai tahun 1955 Organisasi buruh (SOBSI) dikuasai oleh PKI. Jadi dengan memanfaatkan SOBSI yang anggotanya cukup banyak, sehingga PKI akan meraih dukungan dalam Pemilu 1955.

4. Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP)

Melalui sidang Politbiro CC PKI pada tahun 1954, PKI telah merumuskan metode revolusi yang dianggap paling sesuai dengan kondisi Indonesia, yaitu “Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP)”. Metode revolusi diantaranya (1) perjuangan gerilya di desa yang terdiri dari kaum buruh dan petani miskin, (2) perjuangan revolusioner kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh angkutan, dan (3) bekerja secara intensif di kalangan musuh, terutama di kalangan Angkatan bersenjata.¹⁹ MKTBP merupakan suatu konsep subversi PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya, menetralisasi lawan-lawan politiknya, serta mencari dukungan yang luas dikalangan rakyat.

Sesuai dengan program MKTBP, langkah pertama yang dilakukan PKI adalah perjuangan gerilya di desa-desa. Di desa-desa PKI menggalang kaum petani untuk meraih dukungannya. Kader-kader PKI kemudian mulai masuk ke desa-desa, mengorganisir, dan merangsang petani untuk berpikiran revolusioner. Slogan-slogan “turunkan sewa tanah”, “turunkan pajak tanah”, “hapuskan kerja rodi”, dan lain sebagainya menjadi ramai di desa-desa. Strategi yang lebih dikenal sebagai strategi “Turun ke desa, hidup, makan, dan bekerja bersama petani” nampaknya efektif untuk mendongkrak popularitas PKI dimata rakyat.

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, Jakarta: 1994, hlm. 37.

Strategi PKI terhadap kaum petani pada masa kepemimpinan Aidit mulai dirumuskan dalam Kongres Nasional PKI ke-V tahun 1954. Program agraria PKI tersebut didasarkan kepada tulisan Aidit dengan tegas mengkritik program "Nasionalisasi Tanah" yang menurutnya tidak sesuai dengan revolusi Indonesia dan memisahkan para kader dengan massa kaum tani serta membuat kecurigaan kaum petani. Kecurigaan yang dimaksud oleh Aidit adalah tentang prinsip tanah milik perseorangan atas tanah yang digaungkan dengan semboyan "Nasionalisasi Semua Tanah". Menurut Aidit, program yang bermaksud menjadikan semua tanah sebagai milik negara akan membuat kecurigaan petani yang menganggap hal tersebut hanya tipuan untuk mengambil tanah milik mereka.

Sebelum merumuskan program agraria, Aidit terlebih dahulu menyampaikan analisis kondisi sebagai berikut:

Sebagai suatu negeri yang sudah dikuasai oleh sistem kapitalisme, feodalisme di Indonesia sudah tentu tidak penuh lagi, sudah tidak 100% lagi. Yang masih ada di Indonesia sekarang ialah sisa feodalisme yang penting dan berat. Ini dapat kita lihat dari kenyataan: pertama, masih adanya hal monopoli tuan tanah besar atas tanah yang dikerjakan oleh kaum tani yang sebagian terbesar tidak mungkin memiliki tanah dan karena itu terpaksa menjerumuskan tanah dari tuan tanah menurut syarat apa saja; kedua, ialah pembayaran sewa tanah dalam bentuk barang kepada tuan tanah merupakan bagian sangat besar dari hasil panen kaum tani dan yang mengakibatkan kemelaratan bagian terbesar kaum tani; ketiga, ialah sistem sewa tanah dalam bentuk kerja di tanah tuan tanah, yang menempatkan bagian terbesar kaum tani dalam kedudukan hamba; yang terakhir ialah tumpukan hutang yang menimpa bagian besar kaum tani dan yang menetapkan mereka dalam kedudukan budak terhadap pemilik tanah.²⁰

²⁰ DN. Aidit, *"Hari Depan Gerakan Tani Indonesia dalam pilihan Tulisan"*, Jakarta: Jajasan Pembaharuan, 1959, hlm.159.

Sesuatu yang dibutuhkan PKI adalah melakukan pekerjaan partai dikalangan petani. Aidit menyadari bahwa kesadaran kader partai untuk bekerja di kalangan kaum tani masih belum optimal. Hal itu di dasarkan kepada jumlah kader yang masih sedikit dari kalangan kaum tani serta belum adanya anggota partai yang benar-benar mengerti hubungan agraria dengan tuntutan kehidupan petani. Aidit menyerukan pentingnya pekerjaan di kalangan petani. Pekerjaan dikalangan petani diharapkan dapat menggalang masa. Pekerjaan yang dimaksud adalah membantu kaum petani dalam melakukan perlawanan terhadap para tuan tanah serta melalui pekerjaan mengorganisasi dan mendidik kaum tani.

Salah satu rumusan Kongres Nasional PKI Ke-V pada tahun 1954 telah menyatakan bahwa tidak mungkin bagi PKI untuk memimpin Front Persatuan Nasional tanpa mengorganisasi massa petani dan memasukannya sebagai bagian dari front . Sejak saat itu Aidit dengan gencar menyerukan kepada kader PKI untuk melakukan penelitian ke pedesaan. Hal tersebut antara lain disampaikan Aidit dalam berbagai publikasi yang dibuatnya. Aidit menyerukan kadernya untuk ”Turun ke Bawah” melakukan penelitian terhadap permasalahan kepemilikan tanah.

Sedjak tahun 1951 kaum Komunis Indonesia sudah berusaha menggunakan metode riset dalam pekerjaan Partai. Misalnja, kita pernah berusaha untuk mengetahui persoalan agraria, kaum tani dan gerakan tani setjara „tanja-djawab”, setjara angket (questionnaires), dengan djalan mengedarkan formulir2 jang memuat daftar pertanyaan dengan kolom2 jang harus didisi oleh kader-kader Partai tertentu.²¹

²¹ DN Aidit, *Kaum Tani Menggajang Setan-Setan Desa*, Djakarta: Jajasan Pembaharuan, 1964, hlm. 10

Metode riset dalam pekerjaan partai di kalangan kaum petani sudah dilakukan PKI sejak tahun 1951. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara dan kuesioner yaitu menyebarkan pertanyaan yang harus diisi oleh kader. Metode penelitian ini tidak berjalan dengan baik karena banyak formulir yang tidak kembali kepada komite yang mengirimkannya. Melihat keadaan tersebut, PKI menganggap metode ini keliru karena para kader tidak secara langsung berhubungan dengan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan. Langkah Aidit selanjutnya dengan menyerukan kepada para kader partai untuk melakukan pekerjaan dikalangan kaum tani dengan mendidik dan mengorganisasi kaum tani dalam perjuangan melawan para tuan tanah, kaum rekasioner, dan imperialis untuk mendapatkan tuntutan bagian dan kebutuhan kesehariannya.

Cara-cara yang dilakukan PKI kepada petani masih terbatas dengan melakukan propaganda tentang masalah tanah dan nasib petani. PKI juga menggunakan Front Persatuan Tani (FPT) yang dibentuk pada tanggal 2 Juli 1951 sebagai sayap gerakan komunis terhadap kaum tani. Hal tersebut semakin bertambah besar di akhir tahun 1951 sebelum akhirnya terjadi fusi antara berbagai organisasi tani ke dalam BTI yang sudah dikuasai oleh PKI.

Pada waktu menjelang Pemilu 1955 tidak terlepas dari kepiawaian kader-kader PKI sehingga PKI menjadi besar. Kepiawaian mereka membuat PKI menjadi besar dan Berjaya. Mereka mampu membuat perkiraan-perkiraan ke depan, yang mencakup tingkat nasional maupun

internasional, mengevaluasi perkembangan dan melihat serta memanfaatkan peluang-peluang dari perkiraan dan hasil evaluasi tadi serta mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Disiplin organisasi PKI yang tinggi, menjadikan PKI tumbuh sebagai organisasi yang solid, jika dibandingkan dengan partai lainnya di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa PKI adalah suatu partai yang berdisiplin baik dan tidak korup pada waktu itu. Kader-kader benar-benar dilatih pada waktu itu sehingga dapat memberikan loyalitas yang besar kepada partainya.²² Kesungguhan dari kader-kader itu dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam mempengaruhi banyak pedesaan dalam tugasnya sebagai kader.

Program kedua dari MKTBP adalah aksi revolusioner di kota melalui kaum buruh. PKI berusaha mengambil simpati buruh dengan mendekati serikat dan organisasi buruh yang ada, diantaranya adalah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang berskala luas dan nasional. SOBSI mengaku memiliki massa buruh hingga 2,5 juta anggota dan membawahi 25 serikat buruh di setiap kabupaten. Pendekatan PKI kepada SOBSI diharapkan dapat menambah kekuatan yang berlipatganda. Organisasi buruh yang bernaung dibawah SOBSI antara lain; Serikat Buruh Gula (SBG), Serikat Pegawai Daerah (SEPDA), Serikat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU), Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI), Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB), Serikat Buruh Pos dan Telegraf (PTT),

²² Wagiman Susanto, *wawancara*, 28 Januari 2012.

Serikat Buruh Angkatan Udara (SERBAUD), Serikat Buruh Tekstil, Persatuan Buruh Minyak, Serikat Buruh Industri Rokok, Serikat Pegawai Pemerintahan (SPP), Serikat Buruh Kementrian Pertahanan (SBKP), Serikat Buruh Kependidikan (SBK), Serikat Buruh Film Indonesia (SARBUFIS), Serikat Buruh Dok dan Pelayaran Indonesia.

Pada awalnya SOBSI didirikan untuk kepentingan buruh, namun sejak didirikannya pada tahun 1945, SOBSI telah dikuasai oleh kaum komunis. Pada tahun 1952, PKI melakukan disiplin partai yang bertujuan untuk membersihkan SOBSI dari pengaruh non-komunis. PKI juga memberikan pelatihan kader, pelatihan anggota, pelatihan administrasi, dan metode aksi pemogokan bagi seluruh anggota SOBSI. Secara umum kehadiran SOBSI memberikan keuntungan yang sangat besar bagi PKI terlebih dalam menghadapi pemilihan umum 1955. Keanggotaan SOBSI yang banyak tentunya akan menambah jumlah suara yang akan diperoleh PKI nanti dalam Pemilu 1955.

Program ketiga adalah melakukan pekerjaan intensif dikalangan tenaga bersenjata musuh. Hal ini dilakukan karena PKI menganggap bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah salah satu musuh utama mereka. Hal ini didasari oleh pemahaman tentara yang diusung TNI berbeda dengan pemahaman tentara yang diusung oleh PKI. Pemahaman PKI tentang tentara adalah (1) Tentara harus meniru Red Army, (2) Tentara harus dibimbing oleh opsir atau komisar politik (3) Tentara harus berwatak anti penjajah. Beberapa hal yang ditawarkan oleh PKI,

hanya poin ketiga saja yang memiliki kesamaan dengan konsep tentara yang diusung oleh TNI, yaitu bahwa tentara berwatak anti penjajah. Sedangkan untuk poin pertama dan kedua jelas sangat bertentangan dengan konsepsi tentara versi TNI. Alasan tersebut cukup menjadi dasar bagi PKI untuk melakukan pekerjaan intensif dikalangan bersenjata musuh. Pekerjaan disini diartikan sebagai suatu usaha infiltrasi dengan tujuan memperlemah posisi TNI.

Program Perwira Politik (PEPOLIT) merupakan usaha awal infiltrasi yang dilakukan PKI terhadap TNI. Program selanjutnya adalah pendekatan yang dilakukan PKI terhadap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), hal ini dilakukan karena posisi TNI AU yang sangat termarginalkan dibanding dua angkatan lainnya. Pendekatan yang dilakukan PKI terhadap TNI AU dilakukan antara lain dengan mendukung TNI AU dalam program pembelian senjata dari Uni Soviet dan membantu dalam program modernisasi dan jetnisasi pesawat tempur, seperti MIG 17, MIG 21, TU 16, dan lain sebagainya.

Upaya-upaya ini dilakukan untuk memunculkan gengsi TNI AU dibandingkan dengan dua angkatan lainnya. TNI AU selanjutnya memberikan kompensasi kepada PKI dalam pemakaian lapangan udara untuk pembinaan angkatan kelima. PKI juga membentuk Polit Biro khusus yang menangani infiltrasi di tubuh TNI, Biro ini sebagai penghubung yang ditempatkan pada pusat-pusat TNI khususnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Tugas pokok Biro ini meliputi infiltrasi,

pembinaan dan pelantikan, serta pencatatan dan pemanfaatan anggota terjaring. Usaha-usaha yang dilakukan PKI ini jauh dilakukan setelah tahun 1955.

Pelaksanaan MKTBP yang bekerja secara intensif dikalangan musuh terutama dikalangan Angkatan Bersenjata dilakukan oleh kader-kader PKI yang benar-benar terpilih karena tingkat kerahasiaannya yang tinggi dalam hal ini. Oleh karena itu, Politbiro CC PKI memutuskan untuk hanya memberi wewenang sepenuhnya kepada D.N. Aidit selaku Ketua PKI untuk merealisasikan MKTBP tersebut. Dalam mencapai sasaran itu, maka PKI menyusupkan kader-kadernya yang dianggap tangguh ke dalam partai-partai politik dan organisasi masyarakat. Dalam hal ini memang kader-kader PKI yang sudah dilatih diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan dari program-program partai. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan membina anggota-anggota partai politik dan organisasi masyarakat yang sudah menjadi pengikut PKI disebut dengan fraksi²³.

²³ Dalam setiap fraksi ditunjuk Ketua dan Sekretaris Fraksi. Tugas Sekretaris fraksi adalah menerima perintah dari pimpinan komite PKI setempat dan meneruskannya kepada semua anggota fraksi. Fraksi PKI pada dasarnya merupakan sel PKI yang berada di partai-partai politik dan organisasi masyarakat. Untuk mengikat kesetiaan anggota sel-sel PKI tersebut, setiap anggota partai politik dan organisasi masyarakat yang bersimpati menjadi anggota PKI diambil sumpahnya oleh pembinaanya. Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 38.

5. Optimalisasi Propaganda dan Kampanye Menjelang Pemilu 1955

Propaganda yang dilakukan PKI bertujuan menjaring orang agar memihak PKI. Propaganda diharapkan dapat meyakinkan orang atas tujuan-tujuan PKI agar yang dipengaruhi tersebut melihat apa yang diajukan kepadanya merupakan suatu keuntungan. Propaganda merupakan bagian pokok dari kehidupan Partai Komunis Indonesia. Sumber dari mana propaganda PKI didasari, bermacam-macam bentuknya, terutama teori-teori partai yang diolah dari ideologi Marx-Lenin dan Mao, sesuai dengan kondisi dan kontradiksi yang ada dalam masyarakat yang menjadi sasaran PKI.²⁴ Seperti yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, merupakan daerah dimana keadaan ekonominya buruk secara umum, dengan begitu PKI menafsirkan keadaan itu merupakan akibat dari penghisapan dan penindasan imperialis tuan tanah, setan-setan desa dan pamong desa. PKI disarankan agar menguasai milik mereka dengan jalan apapun termasuk jalan kekerasan.

Propaganda yang dilakukan PKI dengan cara mengadakan kursus-kursus seperti kursus baca tulis, kursus politik yang bagi petani dianggap hal yang menarik, kegiatan kebudayaan seperti wayang, ludruk, dan lainnya. Beberapa cara itu dipakai PKI sebagai alat propaganda dan alat penyalur ideologi partai. Propaganda didasarkan kepada keadaan petani bertujuan memperbaiki keadaan petani. Ada hal yang menarik dalam

²⁴ Arbi Sanit, *PKI suatu Analisa Mengenai Sumber Kekuatan Politik di Djawa Tengah dan Djawa Timur Tahun 1951-1965*, *op.cit.*, hlm. 80.

kampanye ini karena partai-partai lain atau partai pemerintah sendiri tidak ada yang bertindak nyata dan sederhana yang dapat dipahami oleh petani yang berpikirnya secara sederhana.

Dalam melaksanakan kampanye, PKI menggunakan tiga tema yang menyentuh emosi masyarakat, (1) PKI menampakkan dirinya sebagai pembela Pancasila, (2) PKI menampilkan figur Presiden Soekarno, dan yang (3) PKI menampakkan diri sebagai pembela kaum tertindas. Propaganda yang menyentuh emosi rakyat ialah adanya pernyataan, bahwa satu-satunya calon mereka untuk Presiden adalah Bung Karno, seolah-olah partai lain tidak menghendaki yang demikian. Pada masa-masa kampanye PKI, foto Presiden Sukarno dipajang dan dibuat dalam ukuran besar.²⁵

PKI juga menggunakan metode kampanye yaitu kegiatan kesejahteraan sosial. Bagi PKI, kegiatan semacam itu dimaksudkan tidak hanya untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga untuk membangun basis massa yang lebih permanen. Slogan-slogan PKI yaitu ” kegiatan kecil tapi bermanfaat”, aktivis PKI di desa-desa tidak hanya memimpin dalam tuntutan-tuntutan politik lokal saja seperti menurunkan sewa tanah dan suku bunga utang, serta memperbaiki pembagian air desa, tetapi juga dalam kegiatan non politik, seperti mengorganisir pemakaian alat-alat pertanian secara bersama-sama, gotong royong untuk pesta, kerja bakti, mengadakan kursus-kursus baca tulis, pembangunan saluran air, dan membantu korban kebakaran atau banjir.

²⁵ Mabes ABRI, *op.cit.*, hlm. 48.

Upaya kesejahteraan sosial yang diupayakan PKI tersebut semakin mendapat dukungan dari masyarakat khususnya di desa-desa.

Cara lain yang dilakukan PKI antara lain melalui rapat-rapat umum, pembicaraan langsung kepada petani, mengadakan sidang-sidang khusus, mengadakan kunjungan ke rumah-rumah penduduk. Cara tersebut merupakan suatu hal yang umum digunakan untuk menarik massa dalam kampanyenya. PKI melakukan kampanye Pemuda Rakyat ke pedesaan untuk menarik simpati para pemuda di desa-desa yang notabnya kurang mampu (miskin). Disamping PKI juga mendekati pelajar. Organisasi pelajar yang di dekati PKI adalah Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). Menjelang pelaksanaan pemilu para pemuda desa atau kader-kader PKI ada yang mendatangi setiap rumah untuk memilih tanda gambar Palu Arit yang dilakukan pada malam hari. PKI juga terkadang menggunakan ancaman-ancaman kepada rakyat untuk memilih PKI, sehingga orang-orang memilih PKI karena takut keselamatannya terancam.²⁶

D.N. Adit dalam melaksanakan strategi kanannya menggunakan cara-cara yang lebih damai. Persiapan-persiapan pemilu telah matang dipersiapkan oleh PKI. PKI mencarter bus-bus untuk mengangkut rakyat ke rapat-rapat raksasa, dimana mereka diperlengkapi dengan topi pandan, tikar, minuman, serta makan. Bahkan dihibur dengan berbagai

²⁶ Yoso Tariyo, *wawancara*, 4 Februari 2012

pertunjukkan dan tarian.²⁷ Rakyat dari desa berduyun-duyun mengikuti rapat raksasa. PKI juga menyebarkan dan memasang poster-poster sampai ke desa-desa pedalaman.

Seorang tokoh Partai Komunis Indonesia Rewang, menegaskan bahwa dalam masa-masa kampanye PKI menjelaskan manifest pemilihan umum dan tentang metode kampanye ditempuh dengan macam-macam cara yaitu dengan mengikutsertakan seni dan budaya dalam kampanye.²⁸ PKI berusaha untuk menarik simpati atau dukungan dari para seniman dan budayawan. PKI juga menganggap bahwa kebudayaan akan dapat dijadikan suatu kekuatan revolusi yang ampuh. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, PKI membentuk organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pada tanggal 17 Agustus 1950 di Jakarta. Propaganda PKI dalam bidang budaya dimotori oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Lekra selalu mengeluarkan semboyan yang menarik; “Seni untuk rakyat, seni untuk revolusi”. Misalnya untuk daerah Bayat Klaten sendiri, bahwa Lekra mengadakan kesenian tari-tarian dan lagu genjer-genjer yang diadakan di daerah Klewer dimana banyak yang tertarik dengan kesenian ini.²⁹

²⁷ Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*, Jakarta : Rola Sinar Perkasa, hlm. 68.

²⁸ Penjelasan Rewang (Tokoh Partai Komunis Indonesia) dalam Video Pembelajaran Sejarah tentang Pemilu 1955 milik Labolatorium Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta.

²⁹ Yoso Tariyo, *wawancara*, 4 Februari 2012.

Kesenian tari-tarian dan nyayian genjer-genjer di daerah ini PKI mampu menarik simpati rakyat.

Dalam kebudayaan, Lekra menggunakan kesenian di dalam masyarakat seperti wayang, ludruk dan kesenian lainnya untuk menarik simpati rakyat. Melalui pertunjukan seni di desa-desa yang diadakan Lekra, tersirat pesan garis partai yaitu komunis sehingga diharapkan memang dapat menarik simpati rakyat.³⁰ Rewang juga menjelaskan bahwa kadang-kadang polisi membantasi agar partai satu dengan yang lainnya tidak saling menyerang. Batasan-batasan yang diberikan itu terkadang dilanggar dalam pidato kampanye partai-partai, meskipun demikian tidak menimbulkan pertentangan fisik antar partai satu dengan lainnya. Sekalipun insiden bisa terjadi namun tidak mempunyai arti politik.

Pada masa berkampanye, PKI juga giat sekali dalam memperagakan lambangnya dan terus mempertahankan keunggulan itu selama masa kampanye menjelang pemilu 1955. Lebih jauh lagi bahwa banyak papan peraga lambang partai terpasang di kota-kota besar dan kota-kota kecil, begitupun dengan desa tidak terlupakan. Sangat banyak papan peraga terbuat dari besi pelat dengan ukuran dan isi yang seragam-jelas buatan dari pabrik. PKI tidak tertandingi dalam daya-cipta memanfaatkan apa saja untuk memperagakan tanda gambarnya, dari

³⁰ Wagiman Susanto, *wawancara*, 28 Januari 2012.

layang-layang hingga dekor panggung pertunjukan desa.³¹ PKI juga membuat pamflet dan brosur untuk dijual atau dibagikan secara massal.

Di bidang pers, PKI mampu menguasai kantor berita ANTARA, dan beberapa koran pendukung yang siap menyebarkan propaganda-propaganda Komunisme kemana saja. Pada masa ini pastilah diperlukan dana yang besar dalam pembiayaan partai ini, untuk itu PKI memperoleh dana dari pengusaha-pengusaha Tionghoa di Indonesia dan kemungkinan besar dana diperoleh dari negara-negara komunis melalui kedutaan dan kantor perwakilan dagang mereka di Jakarta.

Pada pemilihan umum 1955 untuk memilih calon anggota parlemen yang pertama dilaksanakan kampanye-kampanye. Kampanye itu dinamakan kampanye “Pohon Partai”, “Kebun Partai”, “Ayam Partai”, “Kambing Partai”, artinya pohon, kebun, ayam dihibahkan kepada partai, yang disebarluaskan hingga ke tingkat-tingkat bawah dan dijadikan sebagai tradisi.³² Cara-cara itulah yang ditempuh PKI untuk merekrut dana, meskipun secara material hasilnya kecil namun secara moral PKI berusaha menebalkan semangat cinta partai pada anggota dan pengikutnya.

Pada masa-masa kampanye ada juga laporan tentang intimidasi-intimidasi dari PKI. Laporan-laporan tentang intimidasi-intimidasi menjelang akhir kampanye dan pada hari pemungutan suara datang dari

³¹ Herbet Feith, *The Election of 1955*, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 32.

³² *Ibid*, hlm. 35.

hampir seluruh penjuru negeri Indonesia. Salah satu wilayah yang banyak intimidasi adalah daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salahsatu informasi yang didapatkan penulis yaitu untuk daerah Klaten Jawa Tengah, adanya penangkapan dan ancaman dari oknum PKI kepada orang-orang di desa apabila tidak memilih tanda gambar palu arit, sehingga banyak juga orang-orang desa yang memilih PKI karena takut nyawanya terancam. Itulah salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan oleh PKI dalam pemilihan umum 1955.³³

Metode kampanye PKI juga dilakukan dengan kegiatan kesejahteraan sosial. Di daerah-daerah PKI membangun berbagai prasarana publik seperti jembatan, sekolah, rumah-rumah, bendungan, jalan, selokan, dan menyelenggarakan kursus pemberantasan buta huruf.³⁴ PKI juga membentuk berbagai organisasi kemasyarakatan yang sangat diminati dalam kesenian sampai olahraga. Bagi PKI, kegiatan semacam itu tidak hanya dimaksudkan untuk menang dalam pemilihan umum , tetapi juga untuk membangun basis massa yang lebih permanen. Upaya tersebut membuat keanggotaan PKI pada tahun 1954 sampai menjelang pemilu 1955 melonjak dari 165.605 menjadi 1 juta orang. Semua tokoh-tokoh

³³ Intimidasi terjadi ketika pemuda-pemuda Komunis bersenjata pisau dan pentungan untuk tugas pengamanan desa bergerak dari rumah ke rumah pada malam hari mengumpulkan tanda tangan dan cap ibu jari keanggotaan organisasi-organisasi front komunis, atau mengancam menculik orang-orang yang tidak memilih palu arit. *Ibid.* hlm. 69.

³⁴ Baskara T. Wardana, *Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955, BASIS*, Yogyakarta: Yayasan BP Basis, 2004, hlm. 10.

PKI turun langsung untuk berkampanye, seperti Aidit untuk daerah Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan Palembang, sedangkan Lukman untuk daerah Banyuwangi dan Surabaya, Njoto untuk daerah Bandung, Subang, Ciamis dan Ir. Sakirman untuk mahasiswa di daerah Yogyakarta. PKI berhasil keluar sebagai partai ke-4 terbesar di samping PNI, Masyumi dan NU.

6. Pendekatan PKI terhadap Kaum Wanita

Hal menarik dari PKI dalam meraih dukungan menjelang Pemilu 1955 tidak dilakukan kepada kaum pria saja, namun PKI juga melakukan pendekatan kepada kaum wanita. Ketika kepemimpinan PKI dipegang oleh Aidit, peranan kaum wanita ditingkatkan karena kaum wanita cukup berperan dalam bidang sosial ekonomi. Kaum wanita Indonesia yang bekerja sebagai buruh industri, buruh tani, dan buruh perkebunan yang pada umumnya miskin mudah ditarik pada kegiatan organisasi. Perhatian serius dari pimpinan PKI kepada kaum wanita dimulai pada bulan Januari 1955, karena jumlah anggota PKI wanita sangat kecil.

Di dalam manifesto Pemilihan Umum PKI yang dibuat pada bulan Maret 1954 berbunyi” Untuk kaum wanita memilih PKI berarti emansipasi dan jaminan persamaan hak”. PKI menjanjikan akan memperjuangkan persamaan hak dalam empat hal pokok dibidang perkawinan, ekonomi, perburuhan, dan pertanian jika PKI menang dalam pemilu. Di bidang perkawinan, akan memperjuangkan kebebasan memilih suami, persamaan

hak dalam bidang warisan dan perceraian dan hak-hak yang sama bagi anak-anak mereka. Pada bidang ekonomi, wanita diperbolehkan berpartisipasi dalam proses produksi seperti halnya laki-laki. Di bidang perburuhan, tidak ada diskriminasi bagi kaum wanita dengan gaji yang sama, sedangkan dalam bidang pertanian, kaum wanita akan mendapatkan pembagian tanah yang luas seperti kaum pria.³⁵

PKI mendekati Gerakan wanita Indonesia (Gerwani)³⁶ yang merupakan organisasi wanita dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan pada rakyat bawah mulai menitikberatkan perhatiannya pada Pemilu 1955. Ketika kampanye pemilu dimulai, Gerwani memutuskan untuk mengambil bagian dan mendukung kampanye-kampanye untuk para calon PKI, namun tidak mengajukan nama-nama calonnya sendiri, walaupun Gerwani mendapat kebebasan politik tertentu.³⁷

Para tokoh dan kader-kader terbaik dari Gerwani ikut terlibat dalam melakukan kampanye-kampanye pemilu dengan langsung turun ke jalan untuk meraih dukungan dari rakyat khususnya wanita. Pada masa kampanye-kampanye pemilihan umum 1955, Gerwani menyampaikan tuntutan-tuntutan masalah perempuan diantaranya undang-undang

³⁵ Mabes ABRI, *op.cit.*, hlm. 64.

³⁶ Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada awalnya bernama Gerakan Wanita Sedar (Gerwis). Gerwis didirikan pada tanggal 4 Juni 1950. Ketika Gerwis mengadakan Kongres yang kedua di Jakarta Pada tahun 1954 Gerwis diganti dengan nama Gerwani. *Ibid.*, hlm. 66-67.

³⁷ Hikmah Diniah, *Gerwani bukan PKI: sebuah gerakan feminis Terbesar di Indonesia*, Yogyakarta: CarasvatiBooks, 2007, hlm. 101.

perkawinan yang demokratis, adanya hak-hak yang sama untuk kaum perempuan, juga hak atas tanah dan upah. Jika Anggota Gerwani di Parlemen, diharapkan dapat menggunakan kedudukannya untuk menyampaikan semua tuntutan itu dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal ini merupakan suatu keuntungan bagi PKI dalam meraih suara dalam pemilu 1955 dengan dukungan anggota-anggota dari Gerwani.

Upaya PKI untuk menarik kaum wanita Indonesia yang tergolong intelektual atau memiliki jabatan yang tinggi dalam birokrasi pemerintahan Indonesia tidaklah mudah karena mereka tabu mendengar kata “komunis”, disamping itu para istri takut kedudukan suami mereka tergeser. PKI menempuh jalan dengan mengumpulkan mereka di suatu tempat tertutup, kemudian diterangkan bahwa ideologi komunis itu suatu ideologi yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan sifatnya terbuka. PKI juga menarik perhatian kaum wanita dengan cara membentuk kelompok *andjangsono*³⁸. Kelompok ini bertugas membantu mereka saat tertimpa musibah atau sedang ada acara pesta. Agar lebih meyakinkan kaum wanita kepada PKI maka diadakan aksi-aksi untuk membela kepentingan kaum wanita. Pendekatan PKI kepada kaum wanita ternyata berhasil dalam mempengaruhi mereka agar tertarik dengan komunis, untuk itu kesempatan meraih suara dalam pemilu 1955 akan semakin besar.

³⁸ Andjangsono adalah kelompok kecil dari organisasi Ibu-ibu dengan kegiatan sosial. Mereka ini telah digunakan PKI dan Ormas-ormasnya khususnya pada saat Pemilu 1955.

B. Pemilihan Umum 1955

1. Landasan Hukum pemilu 1955

Pemilihan Umum yang pertama diselenggarakan dibawah berlakunya UUD Negara kesatuan 1950.³⁹ Undang-undang Pemilihan Umum No.7 Tahun 1953 beserta peraturan pelaksanaannya (PP No. 9/1954) merupakan pelaksanaan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 35 yang berbunyi: “Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala dan jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”. Pasal 135 ayat 2 menyebutkan: “Anggota Konstituante dipilih oleh Warga Negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia.”⁴⁰

Pasal 35 dan 135 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tersebut merupakan dasar hukum formil yang mendasari Undang-Undang Pemilihan Umum yang bersifat umum, dan berkesamaan dalam arti universal dan *equal surfrage*, langsung dan untuk seluruh Indonesia, sebab sejak negara kita memakai Undang-Undang 1945, sejak proklamasi kemerdekaan, bahkan sejak perjuangan Kebangsaan, cita-cita mempunyai

³⁹ Mohamad Roem, *Tindjauan Pemilihan Umum I&II dari sudut hukum*, Bandung: Hudaya Documenta, 1971, hlm. 8.

⁴⁰ Imam Suhadi, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977: Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1981, hlm. 1.

pemerintahan sendiri yang bertanggungjawab kepada rakyat dengan pemilihan umum sudah ada. Negara Indonesia memaknai kedaulatan rakyat berarti kerakyatan yang menjadi dasar kekuasaan Negara, dihubungkan ketentuan persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk selama lima tahun, sekaligus memilih presiden dan wakil presiden serta menentukan GBHN, demikian juga konstitusional bahwa harus ada *responsible government*, ialah pertanggungjawaban presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengadakan pemilihan umum dalam setiap lima tahun sekali.

1. Asas-asas pemilu

a. Umum

Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak untuk memilih dan dipilih.

b. Langsung

Untuk memberikan suaranya pemilih harus datang sendiri di tempat pemberian suara yang sudah ditentukan. Dalam memberikan suaranya setiap orang tidak boleh dengan perantaraan orang lain atau diwakilkan.

c. Rahasia

Pada waktu pemilih memberikan suaranya, tidak boleh diketahui atau disaksikan orang lain karena sifatnya sangat rahasia. Para pemilih dijamin kerahasiannya sehingga tidak ada orang lain yang akan mengetahui apa yang dipilihnya.

d. Bebas

Pemilih memberikan suaranya menurut kehendak atau hatinuraninya sendiri, tidak boleh dipengaruhi orang lain, baik langsung atau tidak langsung, baik tekanan-tekanan, ancaman-ancaman pisis maupun fisik.

e. Berkesamaan

Semua wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum. Dengan sendirinya setiap warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan berhak ikut memilih. Jadi tidak ada wakil rakyat yang diangkat, dan tidak ada sebagian rakyat yang tidak ikut dalam pemilihan umum.⁴¹

2. Sistem Pemilu 1955

Dasar pokok sistem pemilihan ada dua yaitu sistem *proporsional representative* dan sistem distrik. Pertama dalam satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil dengan pertimbangan suara yang diperoleh masing-masing calon maka juga disebut multi member *constituency*. Kedua (distrik) dalam satu daerah pemilihan hanya memilih seorang wakil saja, maka disebut *single member constituency*. Sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum No. 7 tahun 1953 menggunakan sistem

⁴¹ Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. hlm. 80-81.

proporsional representative dikombinasikan dengan *stelsel* daftar (*lystelsel*).⁴²

Keuntungan sistem *proporsional representative* yaitu jumlah kursi yang diperoleh partai-partai sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh, bahkan tidak ada suara yang hilang, setiap suara diperhitungkan, dalam arti suara yang diperoleh suatu partai dalam suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan dengan suara partai itu dari daerah lain untuk menggenapkan suara yang diperlukan atau memperoleh kursi tambahan. Sistem *proporsional representative* dikatakan representatif, karena tidak ada suara yang hilang sehingga golongan-golongan yang kecilpun mendapat wakil dan sistem *proporsional representative*, tepat bagi masyarakat heterogen. Kelemahan dari sistem *proporsional representative* yaitu menjurus kepada disintegrasi partai-partai sehingga mendorong multi partai, calon-calon terpilih lebih loyal kepada partai. Multi partai membuat kesulitan terbentuknya pemerintahan yang stabil, karena untuk membentuk pemerintah harus berdasarkan koalisi, sehingga dukungan kepada kabinet mudah goyah.

3. Pelaksanaan Pemilu 1955

Sebelum pelaksanaan Pemilu 1955, PKI dihadapkan pada masalah nama daftar dan tanda gambar yang mereka pakai dalam Pemilu yang telah

⁴² Stelsel Daftar (*lystelsel*) ialah setiap partai atau golongan mengajukan daftar calon secara kolektif dalam daftar, sehingga bagi pemilih cukup memilih(dengan menusuk) tanda gambar partai, dan menurut Undang-Undang ini boleh juga memilih seorang yang ada dalam daftar dengan menulis calon tersebut. Imam Suhadi, *op.cit.*, hlm. 20-21.

disetujui oleh Panitia Pemilihan Indonesia. PKI menggunakan jargon” PKI dan orang-orang tak berpartai” serta memakai tanda gambar palu arit”. Hal tersebut mendapat protes dari berbagai pihak institusi maupun partai politik. Mereka menganggap bahwa jargon PKI tersebut dapat menguntungkan PKI karena jumlah orang tak berpartai lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang menjadi anggota partai. Protes itu antara lain berasal dari lembaga seperti HMI, GP Anshor, GPII. Protes datang dari partai politik yaitu Masyumi dan NU. PB NU juga mengajukan surat kepada para kader atas protesnya terhadap nama daftar dan tanda gambar PKI.

Bersama ini kami permaklumkan dengan hormat, bahwa sebagaimana Saudara2 ketahui tanda gambar P.K.I. yang dipergunakan di dalam Pemilihan Umum yang telah di umumkan oleh “Panitia Pemilihan Indonesia yang tertjantung “ P.K.I. dan orang-orang yang tak berpartai “ yang menurut pertimbangan kami hal itu sungguh2 merupakan siasat mereka yang tidak jujur untuk menipu rakyat Indonesia di dalam Pemilihan Umum nanti, karena djumlah rakyat yang belum /tidak masuk Partai itu benar2 merupakan djumlah yang tidak sedikit.⁴³

Dengan surat dari PB NU yang ditujukan kepada kader-kader mereka dalam kabinet memperjuangkan agar hal tersebut ditinjau kembali dalam sidang-sidang kabinet. Masyumi tidak ketinggalan, dalam keterangan yang disampaikan oleh Jusuf Wibisono juga melakukan protes yang menyatakan bahwa cara PKI tersebut bertentangan dengan UU No.7/1953 tentang Pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat

⁴³ Dalam surat PB NU tanggal 10 Juni 1954 No. 3060/Int/iv/-’54 tentang Peninjauan Kembali tanda gambar PKI dalam Pemilihan Umum 1955. Surat itu ditunjukkan kepada kader NU yang berada dalam kabinet yaitu Zainul Arifin, K.H. Masykur, Moh. Manafijah. (Arsip PB NU).

serta Peraturan Pemerintah No.9/1954. Hal yang dilakukan PKI tersebut berarti tidak memberi kebebasan kepada orang tak berpartai untuk memilih sesuai dengan kehendaknya. Menyikapi berbagai protes tersebut, PKI melalui Keterangan Pers Sekjen DN. Aidit membantah tuduhan pelanggaran UU No.7/1953 dan memberikan keterangan tentang hal tersebut.

Pada 29 September 1955, lebih dari 39 juta orang Indonesia datang ke tempat pemungutan suara. Sebanyak 37.875.299 atau 87.65 persen dari 43.104.464 orang yang terdaftar sebagai pemilih setahun sebelumnya, memberikan suara secara sah.⁴⁴ Untuk mengadakan persiapan-persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-undang No. 7 tahun 1953 dalam pasal 17 menentukan 5 macam badan penyelenggaraan pemilihan yaitu :

a. Panitia Pemilihan Indonesia

Panitia ini merupakan penyelenggaraan pemilihan pusat dan tertinggi untuk seluruh wilayah Indonesia dan untuk warga Negara yang berada di luar negeri, dan bertugas mempersiapkan pemilihan anggota Konstituante dan DPR. Ketua, wakil ketua dan anggotanya diangkat oleh presiden.

b. Panitia Pemilihan Daerah

Di setiap daerah pemilihan yang 16 buah itu dibentuk panitia pemilihan daerah, yang bertugas untuk membantu panitia pemilihan

⁴⁴ Herbett Feith, *op.cit.*, hlm. 57.

Indonesia. Ketua, wakil ketua yang diangkat dari anggota panitia, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri kehakiman.

c. Panitia Pemilihan Kabupaten

Tugas membantu panitia pemilihan daerah di Kabupaten, ketua dirangkap oleh Bupati karena jabatannya.

d. Panitia Pemungutan Suara

Camat karena jabatannya merangkap ketua, tugasnya adalah membantu dan menyelenggarakan pemilihan di daerahnya masing-masing. Panitia ini mengesahkan daftar-daftar pemilih sementara yang ditetapkan oleh panitia pendaftaran pemilih di desa-desa dalam daerahnya, dan menyelenggarakan pemungutan suara-suara dan perhitungan suara-suara yang pertama.

e. Panitia Pendaftaran pemilih

Di setiap kedudukan Kepala desa dibentuk panitia pendaftaran pemilih. Kepala desa karena jabatannya merangkap menjadi ketua, tugasnya membantu persiapan pemilihan dalam daerahnya, dan khususnya melakukan pendaftaran pemilih-pemilih dan menetapkan daftar-daftar pemilih sementara.⁴⁵

Pada waktu pelaksanaan pemilu datang, semuanya berlangsung dengan aman dan tertib. Pada tanggal 29 September kemarin telah berlangsungnya pemungutan suara dari segenap bangsa Indonesia yang sudah di idam-idamkan beberapa waktu, sekarang berlangsung dengan

⁴⁵ Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, op, cit., hlm. 84-85.

aman, tenteram dan sentosa.⁴⁶ Sebelum tempat-tempat pemungutan suara buka, para pemilih sudah antusias datang terlebih dahulu. Ketegangan-ketegangan yang sempat muncul menjelang pemilu menjadi sirna begitu saja. Orang tampak bersemangat ikut memilih, tidak terkecuali ibu-ibu yang sedang hamil tua. Dilaporkan, sejumlah ibu bahkan melahirkan anak di tempat pemilihan. Pemilu ini merupakan pemilu yang pertama kali bagi bangsa Indonesia jadi wajar saja apabila ada beberapa kesalahan yang terjadi. Misalnya seorang pemilih mencoblos tanda gambar contoh yang ada di dinding. Pemilu pertama 1955 dikatakan adil dan semua orang bebas menyampaikan suaranya.

Pelaksanaan pemilihan umum, dalam konteks UUD yang berlaku dan sistem pemerintahan diwaktu itu saja rasa sudah dilaksanakan sebaik-baiknya. Hak pilih dan hak dipilih sebagai hak asasi diakui dan dilaksanakan dengan sebebaskan, dengan “rules of the game”, yang dihormati oleh semua golongan dan dilindungi oleh yang berkuasa dengan setjara adil.⁴⁷

Pada pemilu 1955 banyak orang yang datang dari jauh dengan jalan kaki hanya untuk menuju tempat pemungutan suara. Bagi mereka jarak yang jauh bukanlah harga yang terlalu mahal untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut. Pemilu 1955 menunjukkan tingginya partisipasi rakyat tercermin dalam jumlah orang yang ikut mencoblos, yakni 91,4 persen dari mereka yang telah terdaftar. Pada tanggal 15 Desember 1955 suasana jalan-jalan raya tidak sesepi ketika

⁴⁶ Pemilihan Umum di Indonesia, *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu 1 Oktober 1955, hlm 1, kolom 3

⁴⁷ Mohamad Roem, *op.cit.*, hlm. 12.

pemilihan pada bulan September 1955, tetapi partisipasi masyarakat hampir sama tingginya. Pemilu 1955 ini dilaksanakan dengan keamanan yang baik oleh pemerintah sehingga ketertiban terjaga sebagaimana mestinya . Tentang pelaksanaan Pemilihan umum itu nanti pemerintah hanya menyalurkan soal2 yang mengenai ketertiban, menjamin keamanan sehingga pemilihan umum itu akan berhasil sebagaimana kita harapkan.⁴⁸

C. Hasil Pemilu 1955

Penghitungan suara pada tanggal 29 September 1955 selesai pada tanggal 29 November 1955. Hasil dari Pemilu itu muncul berbagai tanggapan dalam memaknai Pemilu 1955. Menurut Herbert Feith menekankan bahwa banyak kejutan yang muncul dari hasil Pemilu 1955 itu.⁴⁹ Pada pemilu 1955 PNI, NU, PKI begitu berhasil sedangkan Masyumi tidak berhasil sesuai dengan harapannya. Pemilu 1955 juga menandai lahirnya politik kedaerahan, dimana Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi basis dukungan bagi PNI, NU, dan PKI. Daerah Jawa Barat dan Luar Jawa menjadi sumber kekuatan bagi Masyumi.

Pemilu 1955 dapat dikatakan demokratis dan lancar. Sebuah pemilu dikatakan menarik tidak hanya dilihat dari hasilnya melainkan dari proses dan manfaat dari hasil pemilu tersebut. Proses pemilu 1955 dapat tercermin dari upaya menjadikan peristiwa lima tahun sekali itu sebagai momentum

⁴⁸ PM Burhanuddin Harahap, Rakjat tentukan nasibnja para petugas harus djaga agar pemilihan djalan baik Pemilih bebas ; djangan ditekan, *Kedaulatan Rakyat*, 27 September 1955, hlm. 1, kolom 3.

⁴⁹ Baskara T Wardnana, *op.cit.* hlm. 13.

pendidikan politik bagi rakyat secara menyeluruh. Dilihat dari manfaatnya dengan adanya pemilu, orang diingatkan bahwa politik bukan hanya menjadi urusan para elit, melainkan urusan seluruh warga masyarakat. Elit politik ada untuk melayani rakyat.

Tabel Hasil Pemilihan Umum Parlemen 1955⁵⁰

No	Partai	Jumlah Suara Sah	Persentase Seluruh Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22.3	57
2	Masyumi	7.903.886	20.9	57
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18.41	45
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16.36	39
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2.89	8
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2.66	8
7	Partai Katolik	770.740	2.04	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1.99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	541.306	1.43	4
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1.28	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0.64	2
12	Partai Buruh	224.167	0.59	2
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0.58	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0.55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0.53	2
16	Murba	199.588	0.53	2
17	Baperki	178.887	0.47	1
18	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0.47	1
19	Gerinda	154.792	0.41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0.40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0.39	1
22	PIR Hazairin	114.644	0.30	1
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0.22	1
24	AKUI	81.454	0.21	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0.21	1
26	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0.19	1
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0.17	1
28	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0.14	1
29	Lain-lain	1.022.433	2.71	-
	Total	37.185.299	100.0	257

⁵⁰ Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia. a.b Nugroho Katjasungkana, dkk, *op.cit.* hlm. 84.

Menurut hasil perolehan sementara dalam pemilu 1955, PKI kalah suara dengan PNI yang berhasil memperoleh suara 8.434.653, Masyumi memperoleh suara 7.903.886, NU memperoleh suara 6.955.141 sedangkan PKI hanya memperoleh suara 6.179.914. PKI menjadi peringkat yang keempat, hal ini merupakan suatu yang menakjubkan karena dengan masa silam PKI ternyata tidak berpengaruh besar terhadap hasil pemilu 1955. Fenomena PKI, dalam Pemilu 1955 untuk parlemen dinilai berbagai pihak sangat mengejutkan.

Citra negatif PKI akibat tragedi Madiun 1948, serta peran partai ini dalam aksi mogok sepanjang tahun 1950-1951, seolah menjadi angin lalu. Darah yang menetes di ujung palu dan arit para anggota partai ini seolah-olah tak berarti bagi pendukungnya. Suara buat PKI pun mengalir deras terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemenangan PKI juga menunjukkan bahwa strategi-strategi yang dilakukan dalam meraih dukungan massa menjelang pemilu 1955 berhasil membawa PKI ke dalam empat partai besar yang memenangkan pemilu. Berdasarkan angka2 yang masuk sekarang, baik dari Djawa maupun diluar Djawa maka perbedaan suara yang didapat keempat partai besar tidaklah seberapa sehingga kursi2 yang dapat direbut masing2 partai boleh dikatakan akan berimbang saja.⁵¹

⁵¹ “PNI, Masjumi, PNI, Nahdlatul Ulama Kekuatannya Berimbang, Djumlah Suaranya tak Berbeda Djauh”, *Kedaulatan Rakjat*, Jumat, 7 Oktober 1955. (Arsip Daerah).

Pada Pemilu 1955, PKI mengantongi 6.176.914 suara atau 16,3 persen dari 37.875.299 suara pemilih yang sah. Ia memang kalah dari PNI (memperoleh 8.343.653 atau 22,1 persen), Masyumi (7.903.886 suara atau 20,9 persen), dan dari NU yang mendapatkan suara 6.955.141 atau 18,4. Keempat partai terakhir ini mendapatkan suara 77,7 persen. Jika dibandingkan dengan perolehan suara PKI dengan Partai Syarikat Islam (PSII) dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo), yang duduk di posisi lima serta enam. PSII hanya mengantongi 1.091.160 (2,9 persen) dan Parkindo 1.003.325 (2,7 persen). PNI dan Masyumi masing-masing mendapat 57 kursi di parlemen, NU 45 kursi dan PKI 39 kursi.

Pemilih PKI sebagian besar berada di Jawa (89,8 persen), menyusul Sumatera (8,6 persen), lalu terkecil di pulau-pulau lain. Secara khusus PKI merajalela di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan, di Jawa Tengah, di sebelas kabupatennya, PKI meraih lebih 50 persen suara atau di urutan tertinggi. Daerah yang dimaksud yaitu meliputi Semarang, Grobogan, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Blora, Cilacap, Temanggung, Gunung Kidul, Kota Semarang, dan terakhir Kota Yogyakarta. Di situlah basis utama PKI. Sebanyak 38,1 persen suara PKI diperoleh dari Jawa Tengah.

Prestasi yang sama juga terjadi di 13 kabupaten di Jawa Timur, seperti Madiun, Kediri, Blitar, Kota Surabaya. Posisi pertama tetap ditempati oleh NU. Jatim, ini berlaku hingga kini, memang boleh disebut kantong utama Nahdliyin karena NU menempati posisi tertinggi hanya di provinsi tersebut. PNI dan Masyumi di urutan berikut. PKI memperoleh 37,7 persen suaranya dari provinsi

terujung Jawa ini. Komposisi menarik ditemui di Jawa Timur dimana terjadi persaingan ketat NU dengan PKI.

Kiprah PKI di kedua daerah itu, berkaitan dengan keterbelakangan sosial dan ekonomi. Sebut saja daerah Surakarta, Yogyakarta bagian selatan, Semarang, Madiun, dan Kediri, yang kenyataannya memang jauh dari kondisi makmur. Kemiskinan membuat PKI menancapkan pengaruhnya di daerah-daerah yang ekonomi dan sosialnya lemah. Hasil Pemilu 1955 menunjukkan bahwa pemilih di Sumatera pada umumnya bergabung dengan partai-partai Islam, terutama Masyumi. PKI sendiri tidak terlalu dominan, namun posisi partai ini berada pada grafik menaik.

Pemilu pertama diadakan hanya lima tahun sekali setelah pengakuan kedaulatan sangat mengagumkan karena besarnya antusias seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti pesta demokrasi itu. Pemilu 1955 juga menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menerima sistem parlementer itu dengan semangat yang tinggi dan luar biasa. Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa mereka berusaha mempraktikkan demokrasi, salah satunya dengan mengikuti jalannya pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1955.

Tabel Hasil Pemilihan Umum Konstituante 1955⁵²

No	Partai	Jumlah Suara Sah	Persentase Seluruh Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23.97	119
2	Masyumi	7.789.619	20.59	112
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18.47	91
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16.47	80
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2.80	16
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2.61	16
7	Partai Katolik	748.591	1.99	10
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1.84	10
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1.44	8
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1.23	7
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0.58	3
12	Partai Buruh	332.047	0.88	5
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	0.40	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0.35	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0.47	3
16	Murba	248.633	0.66	4
17	Baperki	160.456	0.42	2
18	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0.43	2
19	Gerinda	157.976	0.42	2
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0.43	2
21	Persatuan Daya (PD)	169.222	0.45	3
22	PIR Hazairin	101.509	0.27	2
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0.20	1
24	AKUI	84.862	0.22	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0.10	1
26	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	143.907	0.38	2
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	55.844	0.15	1
28	R. Soejono Prawirisoedarso	38.356	0.10	1
29	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0.09	1
30	Partai Tani Indonesia	30.060	0.08	1
31	Radja Keprabonan	33.660	0.09	1
32	Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI)	39.874	0.11	
33	PIR NTB	33.823	0.09	1
34	L.M. Idrus Effendi	31.988	0.08	1
35	Lain-lain	426.856	1.13	1
	Jumlah	37.837.105		514

⁵² Komisi pemilihan umum, 2009, *Pemilihan Umum 1955*, <http://www.kpu.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2012, Pukul: 08.00 WIB.

Pada pemilihan anggota konstituante, suara PKI mengalami peningkatan jika dibandingkan pada pemilihan anggota parlemen baik jumlah suara maupun jumlah kursi yang diperoleh. Dalam Pemilu konstituante, PKI memperoleh suara sebesar 6.232.512. Dilihat dari keseluruhan perolehan suara yang ada di daerah dapat disimpulkan bahwa PNI : 4 daerah tidak memperoleh kursi; Masyumi: 1 daerah tidak memperoleh kursi; NU: 6 daerah tidak memperoleh kursi; dan PKI : 8 daerah tidak memperoleh kursi. Banyaknya kejutan dari hasil pemilu 1955 menandai lahirnya politik kedaerahan yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi basis dukungan bagi PKI, PNI, dan NU, sementara Jawa Barat dan Luar Jawa menjadi sumber kekuatan Masyumi. Selain itu hasil Pemilu 1955 membuat kekecewaan bagi sejumlah pihak karena kemenangan PKI yang menjadi 4 besar dalam perolehan suara.

Ketakutan pada menguatnya PKI juga dialami kelompok-kelompok keagamaan, mengingat PKI adalah partai komunis yang bagi mereka identik dengan ateisme. Mereka khawatir, dengan makin meluasnya pengaruh PKI maka makin banyak orang yang tak beragama. Sebenarnya, pada tataran politis, menguatnya PKI berarti makin lemahnya dukungan terhadap para pemimpin partai yang mengklaim agama sebagai basisnya.⁵³

Pemilu 1955 menunjukkan bahwa kelompok elit politik dari berbagai kalangan takut pada setiap upaya penggalangan massa rakyat bawah, buruh, petani, kaum muda, dan kaum miskin perkotaan, yang secara baik dilakukan oleh PKI menjelang pemilu 1955. Hasil Pemilu 1955 juga menunjukkan bahwa dengan afiliasi serikat dagangnya dan gerakannya pada rakyat bawah, PKI mampu meraih tingkat kekuatan politik dan kemampuan bergerak yang tinggi dan tidak terduga sebelumnya.

⁵³ Baskara T. Wardana, *op.cit.*, hlm. 14.

BAB V

KESIMPULAN

Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam perjalanannya telah melakukan beberapa pemberontakan di daerah-daerah di Indonesia. PKI kembali melakukan pemberontakan pada tahun 1926-1927. PKI berhasil mencetuskan pergolakan rakyat di beberapa tempat di Indonesia. Pergolakan rakyat tersebut gagal karena kurangnya koordinasi dari PKI. Pada tahun 1927 PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya PKI bergerak di bawah tanah. PKI muncul kembali setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. PKI aktif lagi pada tanggal 21 Oktober 1945. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang berisi memberi kesempatan partai-partai politik untuk berdiri, sehingga partai politik banyak yang bermunculan pada waktu itu.

PKI/FDR melakukan pemberontakan di Madiun tepatnya bulan September 1948 yang kemudian terkenal dengan istilah *Madiun Affair*. Pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Pemerintah RI. Dalam pemberontakan tersebut banyak sekali menelan korban jiwa. Pemberontakan Madiun yang singkat itu membawa citra yang buruk bagi PKI sebagai penghianat revolusi. Namun PKI berhasil menjadi pemenang ke-4 dalam pemilu 1955. Kemenangan PKI menjadi 4 besar dalam pemilu 1955 merupakan hasil dari keberhasilan PKI dalam menerapkan strateginya. Strategi PKI dimulai dengan melakukan konsolidasi dalam tubuh partai. Pada waktu itu memang kelompok tua disingkirkan digantikan oleh kelompok muda Aidit dan teman-temannya

(Lukman, Njoto, Sarkiman dan Sudisman), dan konflik internal dalam tubuh berhasil diselesaikan. Setelah melakukan konsolidasi partai PKI juga melakukan pendekatan dengan golongan non komunis yaitu PNI dan NU. PKI memanfaatkan persaingan yang terjadi antara PNI dengan Masyumi. PKI menarik garis siapa lawan dan siapa yang dapat dijadikan kawan untuk sementara waktu. Wakil-wakil PKI di Parlemen sudah cukup aktif sejak PKI mulai memanfaatkan perselisihan antara Masyumi dengan PNI untuk mengadakan kerjasama dengan PNI ditingkat Parlemen.

Dalam menghadapi Pemilu 1955, PKI melakukan pendekatan kepada petani. Strategi PKI menjelang Pemilihan Umum 1955 yaitu menarik petani ke dalam Front Persatuan Nasional. PKI mulai melakukan propaganda-propaganda dengan tema melenyapkan sisa-sisa feodalisme, kapitalisme dan anti tuan tanah. PKI ingin mewujudkan revolusi sosial di Indonesia, menjadikan masalah pertanahan dan nasib petani sebagai hal yang penting. Polarisasi yang telah dibuat PKI dalam perkembangannya menjadi konsepsi PKI dalam melakukan pertentangan kelas antara para tuan tanah dengan buruh tani. PKI melaksanakan program agraria. Desa-desa dijadikan basis dalam menyusun kekuatan yang telah runtuh maupun tempat pengawetan kekuatannya. Melalui strategi tersebut, PKI mampu bersaing dengan partai lain.

Selain pendekatan kepada golongan petani, PKI juga melakukan pendekatan kepada kaum buruh yang tertindas oleh kaum kapitalis. Dalam melakukan pendekatan kepada kaum buruh, PKI memanfaatkan SOBSI yang

berada dibawah naungannya. Pada Kongres Kedua SOBSI pada bulan Januari 1955 kepemimpinan SOBSI sepenuhnya diisi oleh orang-orang PKI. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi PKI untuk semakin menancapkan pengaruhnya kepada kaum buruh karena semua organisasi buruh merupakan elemen yang penting bagi PKI dalam usahanya menguasai massa perkotaan dan pedesaan. Selain itu PKI juga membuat berbagai organisasi *underbouw* partai yang pastinya menambah keanggotaan partai.

Melalui sidang Politbiro CC PKI pada tahun 1954, PKI telah merumuskan metode revolusi yang dianggap paling sesuai dengan kondisi Indonesia, yaitu “Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan” (MKTBP). Metode revolusi diantaranya: (1) perjuangan gerilya di desa yang terdiri dari kaum buruh dan petani miskin, (2) perjuangan revolusioner kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh angkutan, dan (3) bekerja secara intensif di kalangan musuh, terutama di kalangan Angkatan bersenjata. MKTBP ini merupakan suatu konsep subversi PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya, menetralisasi lawan-lawan politiknya, serta mencari dukungan yang luas dikalangan rakyat.

PKI juga melakukan Propaganda dan agitasi dalam menghadapi pemilu 1955. Propaganda merupakan bagian pokok dari kehidupan Partai Komunis Indonesia. Salah satu keunggulan PKI adalah kemampuannya berkomunikasi, agitasi dan propagandanya yang sangat tinggi. Strategi Partai Komunis Indonesia menjelang pemilu 1955 dilaksanakan dengan merangkul rakyat bawah seperti petani, golongan buruh, wanita, dan elit bawah lainnya. Hal ini

berhasil dilakukan terbukti dengan semakin besar jumlah pengikut PKI pada waktu menjelang pemilu 1955. Dalam kampanye-kampanyenya PKI dengan sengaja menghindari kaum elite baik tingkat nasional maupun lokal, tetapi lebih mengarahkan diri kepada tingkat akar-rumput antara lain masyarakat miskin di perkotaan, kaum muda, kalangan buruh dan petani. Propaganda yang dilakukan PKI dengan cara mengadakan kursus-kursus seperti kursus baca tulis, kursus politik yang bagi petani dianggap hal yang menarik, kegiatan kebudayaan seperti wayang, ludruk, dan sebagainya. Beberapa cara itu dipakai PKI sebagai alat propaganda dan alat penyalur ideologi partai.

Menghadapi Pemilu 1955, PKI Mengangkat masalah kemiskinan dan kehidupan rakyat yang buruk akibat kekuasaan imperialisme yang masih berlanjut atas perekonomian Indonesia. Metode kampanye PKI dilakukan dengan kegiatan kesejahteraan sosial. PKI semakin mendapat dukungan dari masyarakat khususnya di desa-desa. PKI juga melakukan pendekatan kepada perempuan, PKI mendekati wanita (Gerwani) dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan pada rakyat bawah mulai menitik beratkan perhatiannya pada Pemilu 1955. Perolehan suara PKI dalam Pemilu 1955, merupakan suatu yang menakjubkan karena dengan masa silam PKI ternyata tidak berpengaruh besar terhadap hasil pemilu 1955. PKI berhasil menerapkan strateginya dalam upaya kemenangan pemilihan umum 1955.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aidit, DN. (1959). *"Hari Depan Gerakan Tani Indonesia dalam pilihan Tulisan,* Djakarta: Jajasan Pembaharuan.
- _____. (1964). *Kaum Tani Menggajang Setan-Setan Desa,* Djakarta: Jajasan Pembaharuan.
- Alfian Tanjung. (2006). *Menggayang Komunisme: Langkah dan starategi menghadapi kebangkitan PKI.* Jakarta: Taruna Muslim Press.
- Amin, S.M. (1967). *Indonesia dibawah Rezim Demokrasi Terpimpin.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Andreas Pandiangan. (1997). *Pemilihan Umum dan Legitimasi Orde Baru: Studi Pengelolaan Basis Dukungan dan Struktur Kekusaan.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Andree Frillard. (1999). *Nahdlatul Ulama Vis Negara pencarian isi, bentuk dan makna,* Yogyakarta: LKis.
- Anhar Gonggong. (1979). *Pemanfaatan Islam Oleh Kaum Komunis: Beberapa kasus pada awal munculnya gerakan komunis di Indonesia (1914-1927),* Persepsi.
- Arbi Sanit. (2000). *Badai revolusi: Sketsa kekuatan politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bibit Suprpto. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Di Indonesia,* Jakarta: Balai Aksara.
- _____. (1997). *Partai, Pemilu dan Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. (1969). *PKI suatu Analisa Mengenai Sumber Kekuatan Politik di Djawa Tengah dan Djawa Timur Tahun 1951-1965,* Djakarta.
- Dudung Abdurrahman. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah.* Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

- Farid Wajidi. (1994). *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Feith, Herbert. (1999). "The Indonesian Election of 1955". A.b Nugroho Katjasungkana, dkk. *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gottschalk, Louis. (1982). "*Understanding History*". A.b. Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Haedar Nasir. (2001). *Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Hasan Shadily. (1984). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hikmah Diniah. (2007). *Gerwani bukan PKI: sebuah gerakan feminis terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: CarasvatiBooks.
- Imam Suhadi. (1981). *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977: Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII.
- Jurusan Pendidikan Sejarah. (2006). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Lili Romli. (2006). *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lukman, MH. (1963). *Adjakan PKI Kepada Kaum Pengusaha Nasional*. Jakarta: Yayasan Pembaharuan.
- Mabes ABRI. (1995). *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid I Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948)*, Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- . (1995). *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia jilid III Konsolidasi dan Infiltrasi PKI (1950-1959)*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.

- Maksum dkk. (1990). *Lubang-lubang Pembantaian: Petualangan PKI di Madiun*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mintz, Jeane. S (2003). *Mohammed, Marx and Marhaen: The Roots of Indonesian Socialism*. A.b. Jeanne S. Mintz (Zulhilmiyasri) , Muhammad, Marx, Marhaen Akar Sosialisme Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo. (2005). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljanto, (1978). *Pergolakan tahun 1926-1927: Pemberontakan PKI atau pemberontakan rakyat?*. Yogyakarta: IKIP Sanata Dharma.
- Mohamad Roem. (1971). *Tinjauan Pemilihan Umum I&II dari sudut hukum*, Bandung: Hudaya Documenta.
- Poerwantana. (1994). *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern*. A.b Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Reiner, G.J. (1997). *A History its Purpose and Method*. a.b. Muin Umar, *Metode dan Manfaat Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samsudin. (2005). *Mengapa G 30 S/PKI Gagal?*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Samsuri. (2004). *Politik Islam anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Safiria Insani Press.
- Sartono Kartodirdjo.(1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- _____. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1994). *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Sidi Gazalba. (1996). *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, Jakarta: Bhratara.
- Sjamsuddin, Hallius & Ismaun. (1996). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Soe Hok Gie. (1997). *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Buana.
- Soegiarso Soerojo.(1988). *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*, Jakarta: Rola Sinar Perkasa.
- Subhan S.D. (1996). *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955*. Yogyakarta: Bentang Buana.
- Tim Narasi. (2009). *100 Tokoh yang mengubah Indonesia*. Jakarta: NARASI
- Tim Penyusun Jawa Pos. (1990). *Lubang-lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun*. Jakarta: Grafiti.
- Tribuana Said. (1983).*Perlawanan Pers Indonesia (BPS) terhadap Gerakan PKI*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Widja, I Gde. (1989). *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*: Jakarta.
- Wieringa Saskia Eleonora. (1999). *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya.
- Williams C, Michael. (2003). *Arit dan Bulan Sabit: Pemberontakan Komunis di Banten*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.

Skripsi

- Nur Efri Setyadi. (2011). Eksistensi Masyumi pada Pemilihan Umum 1955. Skripsi. Yogyakarta: FISE UNY.
- Wasul Nuri. (2008). Perseteruan Partai Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia 1945-1960. Skripsi. Yogyakarta: fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sumber dari Arsip:

- ”Pemilihan Umum di Indonesia”, *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu 1 Oktober 1955. (Arsip Daerah)
- “PNI, Masjumi, PNI, Nahdlatul Ulama Kekuatannya Berimbang, Jumlah Suaranya tak Berbeda Jauh”, *Kedaulatan Rakyat*, Jumat 7 Oktober 1955. (Arsip Daerah)
- “PM Burhanuddin Harahap, Rakyat tentukan nasibnya para petugas harus jaga agar pemilihan jalan baik Pilih bebas ; jangan ditekan”, *Kedaulatan Rakyat*, 27 September 1955. (Arsip Daerah).
- “ Surat PBNU Kepada Zainul Arifin, K.H. Masykur, Moh. Manafijah tentang “ Peninjauan Kembali Tanda Gambar PKI Dalam Pemilihan Umum 1955”. (Arsip).

Sumber dari Jurnal :

- Baskara T. Wardaya.(2004). Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955. *Basis* edisi no. 03-04 Maret-April 2004. Tahun ke-53.
- Rhoma Dwi Aria Yuliantri.(2009). Bibit Semai Koran Kiri Komunis di Indonesia, *BASIS* edisi no. 01-02 Januari-Februari 2009. Tahun ke-58.

Sumber dari Majalah :

- Imawan Riswandha.(1991). Pemilu sebagai mekanisme demokrasi politik di Indonesia. *Prospektif*.
- Jacques Leclerc. (1982). Aidit dan Partai Pada Tahun 1950. *PRISMA* No. 7 Tahun XI.
- Ulf Sundhaussen. (1996). Refleksi terhadap Parpol dan Pemilu di Indonesia. *PRISMA* No. 8 Tahun XXV.
- Anhar Gonggong. (1979). Pemanfaatan Islam Oleh Kaum Komunis: Beberapa kasus pada awal munculnya gerakan komunis di Indonesia (1914-1927), *Persepsi*.

Sumber dari Internet

Iwan dahnial. 2009. Pemilu 1955. <http://iwandahnial.wordpress.com/2009/04/07/suasana-pemilu-ri-tahun-1955/>. Diakses Pada tanggal 13 Februari 2012 Pukul: 05.00 WIB.

Komisi pemilihan umum. 2009. Pemilihan Umum 1955. <http://www.kpu.go.id/>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2012 Pukul: 08.00 WIB .

_____. 2012. Partai Komunis Indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesia. Diakses pada tanggal 14 Februari 2012 Pukul: 20.00 WIB.

_____. 2008. Dipa Nusantara Aidit. (<http://www.tanmalaka.estrancy.cz/clanky/tokoh-kiri-indonesia/dipa-nusantara-aidit.html>). Diakses Pada tanggal 13 Februari 2012. Pukul: 07.00 WIB.

_____. 2011. Lukman. http://id.wikipedia.org/wiki/M.H._Lukman). Diakses Pada tanggal 13 Februari 2012 Pukul: 06.10 WIB.

_____.2009.Njoto.(http://www.facebook.com/note.php?note_id=184053675545). Diakses Pada tanggal 13 Februari 2012 Pukul: 05.30 WIB.

Sumber dari Video:

Video Documenter Pembelajaran Sejarah tentang "Pemilu 1955" milik Labolatorium Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN FOTO-FOTO

Lampiran 1.: Lambang PKI



Sumber: _____.2012. Partai Komunis Indonesia.
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesia. Diakses pada tanggal
14 Februari 2012 Pukul: 20.00 WIB

Lampiran 2: Foto D.N. Aidit



Sumber: _____. **2008.** Dipa Nusantara Aidit.
(<http://www.tanmalaka.estranky.cz/clanky/tokoh-kiri-indonesia/dipa-nusantara-aidit.html>). Diakses Pada tanggal 13
Februari 2012. Pukul: 07.00 WIB.

Lampiran 3: Foto M.H Lukman



Sumber : _____. 2011. Lukman.
http://id.wikipedia.org/wiki/M.H._Lukman. Diakses Pada tanggal
13 Februari 2012 Pukul: 06.10 WIB

Lampiran 4: Foto Njoto



Sumber: _____.2009. Njoto.
(http://www.facebook.com/note.php?note_id=184053675545). Diakses
Pada tanggal 13 Februari 2012 Pukul: 05.30 WIB.

Lampiran 5: Gambar Partai-partai pada pemilu 1955



Sumber: Iwan dahnial. 2009. Pemilu 1955.

<http://iwandahnial.wordpress.com/2009/04/07/suasana-pemilu-ri-tahun-1955/>. Diakses Pada tanggal 13 Februari 2012 Pukul: 05.00 WIB.

Lampiran 6: Wawancara dengan Bapak Wagiman Susanto



Sumber: Koleksi Pribadi

Di Ambil Pada tanggal 28 Januari 2012

Nama : Bapak Wagiman Susanto
Umur : 83 Tahun
Alamat : Summersari, Moyudan, Sleman. Yogyakarta

Lampiran 7: Wawancara dengan Bapak Yatno



Sumber: Koleksi Pribadi

Diambil pada tanggal 4 Februari 2012

Nama : Yatno
Umur : 81 Tahun
Alamat : Bayat, Klaten, Jawa Tengah

Lampiran 8: Wawancara dengan Bapak Yoso Tariyo



Sumber: Koleksi Pribadi

Diambil pada tanggal 4 Februari 2012

Nama : Yoso Tariyo
Umur : 84 Tahun
Alamat : Bayat, Klaten, Jawa Tengah

Foto 1.5 : Wawancara dengan Bapak Harno Sutiman



Sumber: Koleksi Pribadi

Diambil pada tanggal 4 Februari 2012

Nama : Harno Sutiman
Umur : 80 Tahun
Alamat : Bayat, Klaten, Jawa Tengah

Foto 1.6 : Foto Narasumber :Prof. Dr. Syafii Ma'arif. PhD.



Sumber : http://www.anandkrishna.org/images/testi_syafii_maarif.jpg

Diakses tanggal 23 Februari 2012 pukul 05.00 WIB.

Lampiran Kuesioner

Lampiran 8 : Kuesioner

KUESIONER

1. Apakah Bapak pernah mengikuti pemilihan Umum 1955?
2. Apa yang anda ketahui tentang Partai Komunis Indonesia?
3. Faktor apa yang membuat PKI dapat bangkit kembali pasca 1948?
4. Bagaimanakah strategi atau langkah yang diambil PKI dalam menghadapi pemilihan Umum 1955?
5. Benarkah PKI bergerak kepada rakyat kecil di desa-desa?
6. Apa yang membuat rakyat kecil tertarik untuk memilih PKI?
7. Bagaimanakah Agitasi-agitasi dan Propaganda PKI menjelang pemilu 1955?
8. Organisasi apa saja yang berada di bawah naungan PKI dan apakah organisasi itu berpengaruh terhadap PKI?
9. Apakah ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan PKI menjelang pemilu 1955?
10. Bagaimanakah pelaksanaan pemilu 1955 jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu setelahnya?
11. Mengapa golongan petani dan buruh banyak yang ikut PKI?
12. Bagaimanakah Hasil pemilu 1955?

Lampiran Tabel-Tabel

Tabel. 1
Hasil Pemilihan Umum Parlemen 1955

No	Partai	Jumlah Suara Sah	Persentase Seluruh Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22.3	57
2	Masyumi	7.903.886	20.9	57
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18.41	45
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16.36	39
5	Partai Syarikat Indonesia (PSII)	1.091.160	2.89	8
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2.66	8
7	Partai Katolik	770.740	2.04	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1.99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1.43	4
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1.28	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0.64	2
12	Partai Buruh	224.167	0.59	2
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0.58	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0.55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0.53	2
16	Murba	199.588	0.53	2
17	Baperki	178.887	0.47	1
18	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0.47	1
19	Gerinda	154.792	0.41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0.40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0.39	1
22	PIR Hazairin	114.644	0.30	1
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0.22	1
24	AKUI	81.454	0.21	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0.21	1
26	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0.19	1
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0.17	1
28	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0.14	1
29	Lain-lain	1.022.433	2.71	-
	Total	37.185.299	100.0	257

(Sumber: Feith, Herbert. (1999). *"The Indonesian Election of 1955"*. a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.)

Tabel. 2
Hasil Pemilihan Umum Konstituante 1955

No	Partai	Jumlah Suara Sah	Persentase Seluruh Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23.97	119
2	Masyumi	7.789.619	20.59	112
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18.47	91
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16.47	80
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2.80	16
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2.61	16
7	Partai Katolik	748.591	1.99	10
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1.84	10
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1.44	8
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1.23	7
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0.58	3
12	Partai Buruh	332.047	0.88	5
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	0.40	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0.35	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0.47	3
16	Murba	248.633	0.66	4
17	Baperki	160.456	0.42	2
18	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0.43	2
19	Gerinda	157.976	0.42	2
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0.43	2
21	Persatuan Daya (PD)	169.222	0.45	3
22	PIR Hazairin	101.509	0.27	2
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0.20	1
24	AKUI	84.862	0.22	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0.10	1
26	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	143.907	0.38	2
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	55.844	0.15	1
28	R. Soejono Prawirisoedarso	38.356	0.10	1
29	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0.09	1
30	Partai Tani Indonesia	30.060	0.08	1
31	Radja Keprabonan	33.660	0.09	1
32	Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI)	39.874	0.11	
33	PIR NTB	33.823	0.09	1
34	L.M. Idrus Effendi	31.988	0.08	1
35	Lain-lain	426.856	1.13	1
	Jumlah	37.837.105		514

(Sumber: _____, Pemilihan Umum 1955, <http://www.kpu.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2012, Pukul 08.00 WIB)

Tabel. 3
Perolehan suara Keseluruhan Partai-partai pada Pemilihan Umum 1955
Parlemen dan Konstituante

No	Partai	Suara Dalam Parlemen	Suara Dalam Konstituante	Perbedaan
1	PNI	8.434.653	9.070.218	+635.565
2	Masyumi	7.903.886	7.789.619	-114.267
3	Nahdlatul Ulama	6.955.141	6.989.619	+34.192
4	PKI	6.176.914	6.232.512	+55.598
5	PSII	1.091.160	1.059.922	-31.238
6	Parkindo	1.003.325	988.810	-14.515
7	Partai Katolik	770.740	748.591	-22.149
8	PSI	753.191	695.932	-57.259
9	IPKI	539.824	544.803	+4.979
10	Perti	483.014	465.359	-17.655
11	GPPS	219.985	152.892	-67.093
12	PRN	242.125	220.652	-21.473
13	PPPRI	200.419	179.346	-21.073
14	Partai Murba	199.588	248.633	+49.045
15	Partai Buruh	224.167	332.047	+107.880
16	PRI	206.261	134.011	-72.250
17	PIR-Wongsonegoro	178.481	162.420	-16.061
18	PIR-Hazarin	114.644	101.509	-13.135
19	Permai (Persatuan Marhaen Indonesia)	149.287	164.386	+15.099
20	Baperki	178.887	160.456	-18.431
21	Gerinda	154.792	157.976	+3.184
22	Partai Persatuan Daya	146.054	169.222	+23.168
23	PRIM	72.532	143.907	+71.375
24	AKUI	81.532	143.907	+71.375
25	Acoma	64.514	55.844	+8.670
26	PPTI	85.131	74.913	+10.218
27	PRD	77.919	39.278	+38.641
28	R.SoedjonoPrawirodarso dan kawan-kawan	53.306	38.356	-14.949

(Sumber: Feith, Herbert.(1999).” “The Indonesian Election of 1955”. A.b Nugroho Katjasungkana, dkk, Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia”. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.)

Tabel 4.
Hasil Pemilihan Umum Parlemen dan Konstituante
Menurut Daerah (Distrik) Pemilihan¹

1. Jawa Timur

Partai	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	2.251.069	2.329.991	+78.992
Masyumi	1.109.742	1.119.595	+9.853
NU	3.370.554	3.260.392	-110.162
PKI	2.299.602	2.266.801	-32.801
PSII	43.357	43.458	+5.501
Parkindo	36.506	34.840	-1.666
Katolik	13.976	11.769	-2.207
PSI	59.093	59.902	+809
IPKI	-	-	-
Perti	2.078	1.792	-286
Partai Buruh	51.333	149.796	
Partai Murba	16.384	32.194	
PRN	32.131	17.297	
PPPRI	48.333	44.410	
Permai	54.148	57.417	
PIR (W)	13.807	12.971	
Baperki	35.489	33.369	
GP Panca Sila	22.565	14.026	
AKUI	78.281	82.370	
PRI	100.076	63.220	
Soedjono Prawirosoedarso	47.191	38.356	
Koesadi P.M.	64.522	30.986	

2. Jawa Tengah

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	3.019.568	3.171.588	+152.020
Masyumi	902.387	892.556	-9.831
NU	1.772.306	1.822.902	+50.596
PKI	2.326.108	2.305.041	-21.067
PSII	62.922	69.355	+6.433
Parkindo	35.652	46.220	+10.568
Katolik	40.738	38.976	-1.762
PSI	30.819	26.685	-4.134
IPKI	21.233	23.248	+2.015
Perti	-	-	
Partai Buruh	90.994	82.672	
Partai Murba	20.827	23.725	

¹ (Sumber: Feith, Herbert. (1999). *"The Indonesian Election of 1955"*. a.b

Nugroho Katjasungkana, dkk. *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. Jakarta:

Kepustakaan Populer Gramedia.)

PRN	53.285	55.595	
PPPRI	47.850	40.823	
Permai	27.641	38.021	
PIR (W)	60.811	58.747	
Baperki	44.743	43.908	
Gerinda	154.792	157.967	
GP Panca Sila	12.364	10.377	
AKUI	-	-	
PRI	38.674	21.304	
Soedjono Prawirosoedarso	-	-	
Koesadi P.M.	-	-	
Raja Kaprabonan	16.682	12.402	
Sarsadi Ariohudojo	15.562	18.375	
Tani Makmur	12.404	11.962	
KPRSI (Komite Pemilihan Rakyat Seluruh Indonesia)	10.286	10.453	
A Djakartana	43.050	38.944	
Soeroto	13.115	13.569	
Persatuan bekas Pegawai Negeri Indonesia	26.612	16.139	

3. Jawa Barat

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	1.541.927	1.586.507	+44.580
Masyumi	1.844.442	1.761.406	-83.036
NU	673.466	692.755	+19.289
PKI	755.643	827.858	+72.215
PSII	393.174	384.790	-8.384
Parkindo	14.262	19.879	+5.617
Katolik	6.054	6.104	+60
PSI	220.108	238.136	+18.028
IPKI	441.270	450.091	+8.821
Perti	-	-	
Partai Murba	121.312	142.434	
PRN	69.035	53.280	
PPPRI	36.025	37.385	
Permai	43.539	48.211	
PIR (W)	21.407	18.265	
Baperki	38.375	33.596	
GP Panca Sila	219.985	152.892	
PRIM	59.156	143.907	
PRI	23.001	19.396	
Gerakan Banteng RI	35.632	32.084	
PRD	77.919	39.278	
Raja Kaprabonan	26.588	21.258	
PTI (Partai Tani Indonesia)	33.894	28.918	
Partai Republik	19.194	11.699	
Partai Kebangsaan Indonesia	16.215	13.515	
Odo Suramihardja			
KPRSI	19.193	21.123	
Gerpis (Gerakan Pilihan Sunda)	11.923	14.345	
Acoma	18.227	34.073	
Prabu Kresno	34.252	27.946	
	28.215	28.457	

4. Jakarta Raya

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	152.031	173.580	+21.549
Masyumi	200.460	180.488	-19.972
NU	120.667	124.923	+4.256
PKI	96.363	89.612	-6.751
PSII	23.245	19.971	-3.274
Parkindo	17.456	17.667	+217
Katolik	7.570	7.052	-518
PSI	34.949	27.136	-3.813
IPKI	14.586	12.313	-273
Perti	-	-	
Baperki	26.944	23.384	

5. Sumatra Selatan

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	213.766	257.528	+43.762
Masyumi	628.386	594.662	-33.724
NU	115.938	136.008	+20.070
PKI	176.900	168.095	-8.805
PSII	149.239	132.439	-16.800
Parkindo	4.696	3.892	-804
Katolik	3.817	3.889	+72
PSI	21.873	19.875	-1.998
IPKI	-	-	-
Perti	42.912	41.321	-1591
Partai Buruh	17.111	18.595	
Baperki	10.178	8.496	
Tani Makmur	20.562	16.833	

6. Sumatra Tengah

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	42.558	56.512	+13.954
Masyumi	797.692	797.897	+205
NU	71.959	78.164	+6.205
PKI	90.513	98.583	+8.070
PSII	32.753	30.898	-1.854
Parkindo	8.983	7.875	-1.108
Katolik	-	-	-
PSI	24.573	30.969	+6.396
IPKI	6.512	9.699	+3.187
Perti	351.768	337.081	-14.687
Pemsji (Islam)	12.072	10.576	
MTKAAM (a)	13.485	11.369	
Partai Islam Indonesia	31.066	26.894	
PPTI	35.156	33.516	

7. Sumatra Utara

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	329.657	332.782	-3.125
Masyumi	789.910	762.404	-27.506
NU	87.773	103.823	+16.050
PKI	258.875	277.546	+18.671
PSII	26.393	26.719	+326
Parkindo	291.319	292.794	+1.475
Katolik	29.009	29.938	+929
PSI	18.229	15.257	-2.972
IPKI	9.688	11.309	+1.621
Perti	78.358	75.177	-3.181
Partai Buruh	20.264	23.646	
PPPRI	14.306	11.992	
PIR (W)	27.510	19.096	
Baperki	4.674	4.044	
PPTI	27.084	21.459	
Gereja Pantekosta	12.357	10.817	
KRSST	19.000	8.043	

8. Kalimantan Barat

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	64.195	74.123	+9.928
Masyumi	155.173	152.715	-2.458
NU	37.945	37.123	-822
PKI	8.526	8.680	
PSII	3.030	1.863	-1.167
Parkindo	-	-	-
Katolik	2.505	2.259	-246
PSI	15.909	13.848	-2.061
IPKI	7.289	5.993	-1.296
P. Daya	146.054	157.490	-1.296

9. Kalimantan Selatan

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	46.440	60.860	+14.420
Masyumi	252.296	236.513	-15.783
NU	380.874	390.561	9.687
PKI	17.210	20.092	+2.882
PSII	6.717	4.916	-1.801
Parkindo	10.642	13.221	-2.519
Katolik	484	-	
PSI	5.307	4.664	-643
IPKI	19.383	13.997	-5.386
Perti	-	-	-
P. Daya	11.641	11.732	
PPTI	16.429	14.074	
Baperki	2.152	1.981	

10. Kalimantan Timur

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	43.067	50.940	+7.873
Masyumi	44.347	38.610	-5.731
NU	20.795	24.304	+3.509
PKI	8.209	8.762	+553
PSII	7.401	5.521	-1.880
Parkindo	2.585	4.223	+1.638
Katolik	4.153	4.025	-128
PSI	13.029	12.008	-1.021
IPKI	-		
Perti	-		
Baperki	-		

11. Sulawesi Utara

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	102.855	132.140	+29.285
Masyumi	189.198	192.313	+3.115
NU	21.619	23.744	+2.125
PKI	33.204	37.541	+4.337
PSII	173.364	166.148	-7.216
Parkindo	144.273	138.614	-5.659
Katolik	17.042	16.508	-534
PSI	9.292	9.445	+153
IPKI	-	-	-
Perti	-	-	-
Baperki	2.195	2.100	

12. Sulawesi Selatan

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	46.334	85.144	+38.810
Masyumi	446.255	502.357	+56.102
NU	159.193	173.291	+14.098
PKI	17.831	23.402	+5.511
PSII	114.798	106.280	-8.518
Parkindo	118.850	114.524	-4.326
Katolik	9.024	9.354	+334
PSI	6.770	8.780	+2.010
IPKI	1.679	2.481	+802
Perti	-	-	
Baperki	1.462	1.164	
Partai Buruh	15.876	15.682	
PRN	13.384	21.101	
PKR (Partai Kedaulatan Rakyat)			
La Ode Hadi	21.512	22.597	
PIR (H)	33.269	5.263	
PPP La Idrus Effendi	12.527	14.012	
	46.835	31.915	

13. Maluku

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	30.218	36.602	+6.384
Masyumi	117.440	122.615	+5.175
NU	-	-	-
PKI	4.792	4.934	+142
PSII	11.310	9.162	-2.148
Parkindo	108.920	109.262	+342
Katolik	18.710	18.896	+186
PSI	1.458	1.814	+356
IPKI	2.773	2.649	-124
Perti	-	-	-
PIR (H)	19.068	18.204	

14. Nusa Tenggara Timur

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	65.027	154.386	-3.596
Masyumi	157.972	18.111	+427
NU	17.684	6.626	+1.618
PKI	5.008	22.452	-594
PSII	23.046	178.582	-24.997
Parkindo	203.579	477.053	+17.794
Katolik	459.255	2.070	+594
PSI	1.476	1.936	+302
IPKI	1.634	3.207	-280
Perti	3.487	56.705	
PIR (H)	59.257	34.531	
PRN	22.312		
Front Rakyat	60.107		
Front Nasional	22.129		
Baperki	3.784		

15. Nusa Tenggara Barat

	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Perbedaan
PNI	464.398	512.000	+47.602
Masyumi	264.719	258.358	-6.361
NU	104.282	102.294	-1.988
PKI	66.067	78.363	+12.296
PSII	7.020	5.804	-1.216
Parkindo	2.944	3.217	+273
Katolik	1.188	1.290	+102
PSI	233.371	190.267	-43.104
IPKI	-	-	-
Perti	-	-	-
Partai Buruh	8.618	12.159	
PIR (H)	33.457	-	
PRN	14.386	6.582	
Baperki	3.859	1.981	

Tabel. 5
Perincian Kursi Menurut Daerah Pemilihan

Wilayah	PNI	Masyumi	NU	PKI
1. Jawa Timur	14	7	20	14
2. Jawa Tengah	19	6	11	15
3. Jawa Barat	11	13	5	5
4. Jakarta Raya	1	2	1	1
5. Sumatra Selatan	2	4	1	1
6. Sumatra Tengah	-	6	-	1
7. Sumatra Utara	3	6	1	2
8. Kalimantan Barat	1	1	-	-
9. Kalimantan Selatan	-	2	3	-
10. Kalimantan Timur	-	-	-	-
11. Sulawesi Utara/Tengah	1	1	-	-
12. Sulawesi Tenggara/ Selatan	1	5	2	-
13. Maluku	-	1	-	-
14. Nusa Tenggara Timur	1	1	-	-
15. Nusa Tenggara Barat	3	2	1	-
Total	57	57	45	39

Sumber : _____. 2004. Pemilihan Umum Tahun 1955. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia).

B120090084

Surat PBNU
Kepada ZAINUL ARIFIN, K.H. MASYKUR,
MOH. MANAFIJAH

tentang

**PENINJAUAN KEMBALI
TANDA GAMBAR PKI DALAM
PEMILIHAN UMUM 1955**

U-15.02 / B.PB / 0084.1



Museum
NAHDLATUL ULAMA
Tim Kerja Museum NU
Graha Astra Nawa, Jl. Gayungsari Timur 35 Surabaya

Surat PBNU

Kepada ZAINUL ARIFIN, K.H. MASYKUR, MOH. HANAFLJAH

tentang

**PENINJAUAN KEMBALI
TANDA GAMBAR P.K.I. DALAM PEMILIHAN UMUM
1955**

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

1. Sudara R. Surjoningsprodjo, di Madura.
2. Pimpinan Lapunu Pusot, di Djakarta.
3. Arsip.